

PROFIL PERIKANAN GURITA

HASIL DIAGNOSA BERBASIS RISET AKSI PARTISIPATIF

**Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang,
Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan,
Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan**



The Nature
Conservancy

Konservasi
Alam Nusantara



CONSERVATION
INTERNATIONAL



KONSERVASI
INDONESIA



YAYASAN
KONSERVASI LAUT
(YKL) INDONESIA

INFORMASI DOKUMEN

Judul Dokumen	: Profil Perikanan Gurita. Hasil Diagnosa Berbasis Riset Aksi Partisipatif - Profil, Kondisi Baseline, dan Arah Pengembangan Pengelolaan Perikanan di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan
Judul Program	: Pengelolaan Perikanan Gurita Berbasis Masyarakat dan Data untuk Mengurangi Tekanan terhadap Terumbu Karang di Calon Kawasan Konservasi Pulau Sembilan
Pelaksana Program	: Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia
Lokasi Program	: Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan
Dukungan Program	: <i>Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act</i> (TFCCA)
Periode Data Baseline	: 2026
Tahun Penyusunan	: 2026

Dokumen ini disusun sebagai hasil diagnosa perikanan berbasis riset aksi partisipatif sekaligus baseline kondisi sosial-ekonomi dan sistem perikanan di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang, Desa Pulau Harapan, Kabupaten Sinjai. Dokumen memuat karakteristik perikanan dengan perhatian khusus pada perikanan gurita, pola pemanfaatan sumber daya, rantai pasok, kondisi sosial-ekonomi dan tata kelola, para pihak, serta diagnosa faktor-faktor kunci bagi pengembangan pengelolaan perikanan.

Dokumen ini merupakan bagian dari pelaksanaan program yang didukung melalui *Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act* (TFCCA) dan digunakan sebagai dasar pembelajaran, perencanaan, monitoring perubahan, dan pengembangan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat secara bertahap, partisipatif, kolaboratif, berbasis data, dan adaptif.

KATA PENGANTAR

Dokumen **Dokumen Hasil Diagnosa Perikanan Berbasis Riset Aksi Partisipatif** disusun sebagai bagian dari pelaksanaan Program “**Pengelolaan Perikanan Gurita Berbasis Masyarakat dan Data untuk Mengurangi Tekanan terhadap Terumbu Karang di Calon Kawasan Konservasi Pulau Sembilan**” yang dilaksanakan oleh Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia.

Dokumen ini menyajikan gambaran kondisi awal (*baseline*) perikanan berdasarkan proses riset aksi partisipatif bersama masyarakat. Diagnosa mencakup karakteristik dan pola perikanan, perikanan gurita, wilayah dan musim penangkapan, rantai pasok, kondisi sosial-ekonomi, tata kelola, peran perempuan, serta para pihak yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang.

Lebih dari sekadar menggambarkan profil perikanan, dokumen ini mengidentifikasi modal, kesenjangan, dan faktor-faktor kunci pengelolaan sebagai dasar untuk merumuskan strategi dan arah pengembangan pengelolaan perikanan ke depan. Data dan pengetahuan masyarakat menjadi landasan penting dalam membangun proses pengelolaan yang partisipatif, berbasis data, kolaboratif, dan adaptif terhadap kondisi sosial-ekologi Pulau Sembilan.

Dokumen ini merupakan potret kondisi pada saat diagnosa dilakukan dan dapat terus diperbarui seiring berkembangnya data monitoring, pengetahuan, dan pembelajaran selama proses pengelolaan. Dengan demikian, hasil diagnosa diharapkan dapat menjadi rujukan bersama bagi masyarakat, pemerintah, dan para pihak dalam pengambilan keputusan serta pengembangan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat.

Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang, Pemerintah Desa Pulau Harapan, Pemerintah Kecamatan Pulau Sembilan, Pemerintah Kabupaten Sinjai, serta seluruh pihak yang telah memberikan pengetahuan, informasi, dan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar pembelajaran dan pengembangan pengelolaan perikanan yang semakin kuat, kolaboratif, dan berkelanjutan di Pulau Sembilan.

Makassar, 2026

Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia

DAFTAR ISI

INFORMASI DOKUMEN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN	viii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Pentingnya Perikanan Gurita	1
1.2. Konteks Wilayah dan Perikanan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang	2
1.3. Pentingnya Diagnosa Perikanan.....	3
1.4. Tujuan Penyusunan Profil dan Diagnosa Perikanan	5
1.5. Pendekatan Implementasi Program.....	6
BAB 2. PROFIL PENANGKAPAN GURITA	8
2.1. Sejarah, Wilayah Tangkap, dan Musim	8
2.2. Karakteristik Perikanan Gurita	18
2.3. Rantai Pasok Perikanan Gurita	41
2.4. Struktur dan Tata Kelola Perikanan.....	51
BAB 3. PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN	60
3.1. Identifikasi Para Pihak dalam Pengelolaan Perikanan	60
3.2. Peran dan Kepentingan Para Pihak	67
3.3. Analisis Pengaruh dan Kepentingan Para Pihak.....	70
BAB 4. DIAGNOSA FAKTOR-FAKTOR KUNCI PENGELOLAAN PERIKANAN	78
4.1. Aspek Motivasi (<i>Motivation</i>)	79
4.2. Aspek Kondisi yang Mendukung (<i>Enabling Conditions</i>).....	80
4.3. Aspek Kesiapan Pelaksanaan (<i>Implementation</i>)	83
4.4. Sintesis Diagnosa Faktor-Faktor Kunci.....	86
BAB 5. STRATEGI DAN PETA JALAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PERIKANAN.....	89

5.1.	Arah Pengembangan Pengelolaan Perikanan	89
5.2.	Strategi Pengembangan Pengelolaan Perikanan	90
5.3.	Formulasi Strategi Berdasarkan Hasil Diagnosa	95
5.4.	Peta Jalan Pengembangan Pengelolaan Perikanan	97
5.5.	Kerangka Perubahan Pengelolaan Perikanan	100
5.6.	Arah Implementasi dan Prioritas Pengembangan	106
BAB 6.	PENUTUP	112
6.1.	Kesimpulan	112
6.2.	Rekomendasi	114
6.3.	Penutup	115
DAFTAR PUSTAKA		116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gurita Hasil Tangkapan Nelayan	x
Gambar 2. Perahu nelayan parkir usai melakukan penangkapan gurita	7
Gambar 3. Hasil tangkapan gurita dari perairan Pulau Kambuno menjadi bagian penting penghidupan masyarakat pesisir.....	9
Gambar 4. Peta Partisipatif Wilayah Penangkapan Masyarakat Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang.....	15
Gambar 5. Istri nelayan membawa gurita hasil tangkapan suaminya ke pengepul tingkat pulau	20
Gambar 6. Perawatan perahu nelayan sebelum kegiatan penangkapan	26
Gambar 7. Pocong-Pocong alat tangkap gurita berbahan utama kain.....	29
Gambar 8. Bole-bole alat tangkap gurita	30
Gambar 9. Pengepul membayar hasil penjualan gurita nelayan	33
Gambar 10. Penanganan gurita di Tingkat pengepul menggunakan es	36
Gambar 11. Perempuan membawa gurita dalam wadah untuk dijual ke pengepul	37
Gambar 12. Penimbangan gurita dan komoditas perikanan lainnya di Tingkat pengepul pulau	40
Gambar 13. Bagan Alur Rantai Pasok Perikanan Gurita Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang	50
Gambar 14. Matrix Pengaruh dan Kepentingan ParaPhak dalam Pengelolaan Perikanan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang Kecamatan Pulau Sinjai	74
Gambar 15. Kerangka Perubahan Pengelolaan Perikanan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sejarah dan Tren Perikanan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang.....	10
Tabel 2. Wilayah Penangkapan Utama Nelayan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang.....	14
Tabel 3. Kalender Musim Perikanan di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang.....	17
Tabel 4. Karakteristik Nelayan dan Pola Operasi Perikanan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang	23
Tabel 5. Jenis-Jenis Armada Penangkapan.....	27
Tabel 6. Jenis dan Karakteristik Alat Tangkap Nelayan	32
Tabel 7. Biaya Operasional Penangkapan Berdasarkan Jenis Armada	35
Tabel 8. Klasifikasi Ukuran dan Harga Gurita.....	39
Tabel 9. Daftar Aktor dan Fungsi dalam Rantai Pasok Gurita.....	42
Tabel 10. Karakteristik Rantai Pasok Menurut Tingkat Pelaku.....	46
Tabel 11. Struktur Pengelolaan	55
Tabel 12. Identifikasi Para Pihak dalam Pengelolaan Perikanan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang	62
Tabel 13. Diagnosa Faktor Kunci Aspek Motivasi.....	79
Tabel 14. Diagnosa Faktor Kunci Kondisi yang Mendukung.....	81
Tabel 15. Diagnosa Faktor Kunci Kesiapan Pelaksanaan	83
Tabel 16. Sintesis Diagnosa Faktor-Faktor Kunci Pengelolaan Perikanan.....	86
Tabel 17. Formulasi Strategi Pengembangan Pengelolaan Perikanan	96
Tabel 18. Peta Jalan Pengembangan Pengelolaan Perikanan.....	99
Tabel 19. Prioritas Pengembangan Pengelolaan Perikanan	106
Tabel 20. Indikasi Perubahan dalam Pengembangan Pengelolaan Perikanan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang.....	110

DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN

Akronim/ Singkatan/ Istilah	Keterangan
ABK	Anak Buah Kapal; anggota atau awak yang ikut dalam operasi penangkapan menggunakan suatu armada.
Baseline	Kondisi awal yang menjadi titik acuan untuk melihat perkembangan atau perubahan kondisi perikanan dan pengelolaannya.
Babinsa	Bintara Pembina Desa; unsur TNI Angkatan Darat yang menjalankan fungsi pembinaan teritorial di tingkat desa/kelurahan.
Bhabinkamtibmas	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; unsur Kepolisian yang menjalankan fungsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa/kelurahan.
CDK	Cabang Dinas Kelautan; unit kelembagaan pemerintah provinsi yang menjalankan fungsi kelautan pada wilayah kerja tertentu.
Champion	Tokoh atau individu penggerak yang memiliki kemauan, pengaruh, atau kapasitas untuk mendorong dan menjadi penggerak dalam proses pengelolaan perikanan di tingkat masyarakat maupun para pihak.
CO	Community Organizer (CO); pengorganisir masyarakat yang berperan dalam pendampingan, pengumpulan informasi, komunikasi, dan fasilitasi proses bersama masyarakat.
DKP	Dinas Kelautan dan Perikanan.
KKD	Kawasan Konservasi Daerah; istilah yang digunakan dalam dokumen untuk merujuk pada konteks pengembangan kawasan konservasi di wilayah Pulau Sembilan.
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan.
KUB	Kelompok Usaha Bersama (KUB); kelompok masyarakat yang dibentuk untuk menjalankan atau mengembangkan kegiatan usaha secara bersama.
KUR	Kredit Usaha Rakyat; skema pembiayaan usaha yang pernah diakses atau diperkenalkan kepada masyarakat nelayan.
One day one trip	Pola operasi penangkapan ketika nelayan berangkat dan kembali pada hari yang sama.
PAR	Participatory Action Research / Riset Aksi Partisipatif; pendekatan riset yang melibatkan masyarakat secara aktif

Akronim/ Singkatan/ Istilah	Keterangan
	dalam pengumpulan pengetahuan, analisis kondisi, pembelajaran, dan proses perubahan.
Pas Kecil	Dokumen kebangsaan kapal yang digunakan sebagai bukti pendaftaran dan legalitas bagi kapal berukuran tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
Pokmaswas	Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas); kelompok masyarakat yang berperan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Polairud	Kepolisian Perairan dan Udara; unsur Kepolisian yang menjalankan fungsi kepolisian pada wilayah perairan dan udara.
PSDKP	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; fungsi/unit pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
Punggawa	Aktor dalam sistem sosial-ekonomi perikanan yang umumnya berperan sebagai pemilik atau penyedia modal, sarana produksi, dan/atau pembeli hasil tangkapan nelayan.
Sawi	Nelayan yang memiliki hubungan kerja atau permodalan dengan punggawa dan menjalankan kegiatan penangkapan.
Sawakung	Istilah lokal untuk pola operasi penangkapan dengan bermalam atau berada di laut selama beberapa hari, terutama untuk menjangkau wilayah penangkapan yang lebih jauh.
Taka'	Istilah lokal yang digunakan masyarakat untuk menyebut hamparan karang atau wilayah perairan dangkal berkarang, yang banyak dimanfaatkan sebagai wilayah penangkapan dan pada lokasi tertentu untuk aktivitas lainnya.
UPI	Unit Pengolahan Ikan (UPI); unit usaha yang melakukan penanganan dan/atau pengolahan hasil perikanan dalam rantai pasok.
MEL	<i>Monitoring, Evaluation, and Learning</i>
PSDKP	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
SETARA	Sekolah Tanpa Ragu
TFCCA	<i>Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act</i>
YKL Indonesia	Yayasan Konservasi Laut Indonesia

Gambar 1. Gurita Hasil Tangkapan Nelayan



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Pentingnya Perikanan Gurita

Perikanan skala kecil merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain menyediakan sumber pangan dan pendapatan, aktivitas perikanan membentuk sistem penghidupan yang berkaitan erat dengan kondisi sumber daya, musim, cuaca, teknologi penangkapan, akses pasar, serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Ketergantungan terhadap sumber daya laut semakin penting pada masyarakat pulau kecil karena keterbatasan ruang dan pilihan mata pencaharian.

Salah satu sumber daya yang memiliki nilai ekonomi penting dalam perikanan skala kecil adalah gurita. Penangkapan gurita umumnya dilakukan dengan teknologi yang relatif sederhana dan mengandalkan pengetahuan nelayan mengenai habitat, musim, pasang surut, kondisi perairan, serta perilaku gurita. Karakter tersebut membuat perikanan gurita relatif mudah dimasuki oleh nelayan skala kecil, tetapi pada saat yang sama sangat bergantung pada kondisi sumber daya dan habitat yang menopangnya.

Secara ekologis, gurita memiliki keterkaitan dengan ekosistem terumbu karang dan habitat bentik lainnya yang digunakan sebagai tempat berlindung, mencari makan, dan menjalankan siklus hidupnya. Keterkaitan tersebut menjadikan keberlanjutan perikanan gurita tidak dapat dipisahkan dari kondisi habitat, intensitas pemanfaatan sumber daya, praktik penangkapan, serta pengelolaan wilayah perairan tempat aktivitas perikanan berlangsung.

Gurita juga merupakan komoditas yang terhubung dengan pasar yang lebih luas. Pada tingkat nasional, kelompok komoditas cumi, sotong, dan gurita termasuk komoditas utama ekspor perikanan Indonesia. Pada tahun 2024, kelompok komoditas tersebut mencatat nilai ekspor sekitar USD874,12 juta atau 14,7% dari total nilai ekspor perikanan Indonesia, meningkat sekitar 14,6% dibandingkan tahun sebelumnya (KKP, 2025).

Nilai ekonomi dan permintaan pasar tersebut memberikan peluang bagi penghidupan nelayan, tetapi juga menempatkan perikanan gurita dalam hubungan yang lebih kompleks antara sumber daya, nelayan, pengepul, pasar, dan ekosistem. Manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh pola penangkapan, struktur rantai pasok, pembentukan harga, akses terhadap informasi pasar, serta posisi nelayan dalam hubungan perdagangan.

Karena itu, perikanan gurita perlu dipahami sebagai bagian dari suatu sistem sosial-ekologis. Kondisi sumber daya dan ekosistem memengaruhi aktivitas dan hasil perikanan, sementara keputusan dan praktik pemanfaatan oleh manusia pada gilirannya memengaruhi keberlanjutan sumber daya. Pengelolaan yang efektif membutuhkan pemahaman terhadap hubungan tersebut serta keterlibatan masyarakat yang secara langsung memanfaatkan dan bergantung pada sumber daya.

Dalam konteks Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang, perikanan gurita merupakan bagian dari sistem perikanan skala kecil yang lebih luas. Nelayan tidak selalu bergantung pada satu komoditas, tetapi memanfaatkan berbagai sumber daya sesuai musim, kondisi perairan, teknologi penangkapan, dan peluang ekonomi. Oleh karena itu, memahami perikanan gurita tidak dapat dilakukan secara terpisah dari karakteristik perikanan lainnya, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, ekosistem, rantai pasok, serta kelembagaan dan tata kelola sumber daya di tingkat lokal.

1.2. Konteks Wilayah dan Perikanan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang

Kecamatan Pulau Sembilan merupakan wilayah kepulauan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Secara administratif, kecamatan ini terdiri atas empat desa, yaitu Pulau Buhung Pitue, Pulau Harapan, Pulau Padaelo, dan Pulau Persatuan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kecamatan Pulau Sembilan tercatat sebanyak 8.128 jiwa, terdiri atas 4.060 laki-laki dan 4.068 perempuan (BPS Kabupaten Sinjai, 2025).

Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang merupakan bagian dari Desa Pulau Harapan dan menjadi lokasi utama diagnosa perikanan dalam dokumen ini. Desa Pulau Harapan memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.534 jiwa pada tahun 2024, terdiri atas 1.742 laki-laki dan 1.792 perempuan, serta merupakan desa dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Pulau Sembilan (BPS Kabupaten Sinjai, 2025).

Karakter wilayah kepulauan membentuk hubungan yang erat antara masyarakat dengan laut. Perairan di sekitar pulau menjadi ruang penghidupan, mobilitas, interaksi sosial, sekaligus ruang pemanfaatan berbagai sumber daya perikanan. Perikanan tangkap dan budidaya rumput laut menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat, disertai berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang menopang kebutuhan rumah tangga.

Hasil riset aksi partisipatif menunjukkan bahwa masyarakat Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang menjalankan aktivitas perikanan dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber daya sesuai musim, wilayah penangkapan, kondisi perairan,

alat tangkap, serta peluang pasar. Sistem penghidupan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga tidak selalu bergantung pada satu jenis komoditas atau aktivitas, tetapi dapat menyesuaikan strategi penghidupan berdasarkan kondisi yang dihadapi (YKL Indonesia, 2026a).

Dalam konteks ekonomi yang lebih luas, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih memiliki posisi penting bagi Kabupaten Sinjai. Pada tahun 2025, kategori tersebut memberikan kontribusi sekitar 46,49% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sinjai, menunjukkan besarnya peranan sektor berbasis sumber daya alam terhadap perekonomian daerah (BPS Kabupaten Sinjai, 2026).

Perairan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang juga merupakan bagian dari bentang ekosistem pesisir dan laut yang mendukung berbagai aktivitas perikanan skala kecil. Terumbu karang dan habitat pesisir lainnya memiliki fungsi ekologis penting bagi berbagai jenis sumber daya yang dimanfaatkan masyarakat. Pada ruang sosial-ekologis inilah aktivitas penangkapan, penghidupan masyarakat, perdagangan hasil perikanan, dan kepentingan konservasi saling berinteraksi.

Gurita menjadi salah satu komoditas yang dimanfaatkan dalam sistem perikanan tersebut. Namun, perikanan gurita tidak berdiri sendiri. Aktivitas nelayan, perubahan komoditas target, musim penangkapan, teknologi, akses pasar, dan kondisi sumber daya membentuk sistem perikanan yang dinamis. Karena itu, kondisi perikanan gurita perlu dibaca dalam konteks keseluruhan sistem perikanan skala kecil yang berkembang di kedua pulau.

Pemahaman terhadap konteks tersebut menjadi penting sebagai dasar untuk melihat kondisi awal perikanan secara utuh, termasuk hubungan antara sumber daya dan ekosistem, aktivitas penangkapan, sosial-ekonomi masyarakat, rantai pasok, kelembagaan, serta praktik tata kelola yang berkembang di tingkat lokal.

1.3. Pentingnya Diagnosa Perikanan

Pengelolaan perikanan membutuhkan informasi yang memadai mengenai kondisi sumber daya, aktivitas pemanfaatan, masyarakat yang bergantung pada perikanan, serta faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang memengaruhinya. Pada perikanan skala kecil, informasi tersebut tidak selalu tersedia secara lengkap dalam statistik formal, sementara sebagian besar pengetahuan mengenai dinamika perikanan berada pada masyarakat yang berinteraksi langsung dengan sumber daya.

Nelayan memiliki pengetahuan mengenai wilayah penangkapan, musim, perubahan hasil tangkapan, kondisi perairan, penggunaan alat tangkap, dan

perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Pada saat yang sama, perempuan, pengepul, kelompok masyarakat, pemerintah, dan aktor lainnya memiliki pengetahuan dan peran berbeda dalam sistem perikanan. Keseluruhan informasi tersebut perlu dibaca secara bersama untuk memahami bagaimana suatu sistem perikanan bekerja.

Diagnosa perikanan diperlukan untuk membangun pemahaman tersebut sebelum menentukan pilihan pengelolaan. Proses pengelolaan tidak seharusnya dimulai dengan menetapkan terlebih dahulu bentuk intervensi, aturan, atau tindakan yang akan diterapkan, tetapi dengan memahami kondisi sumber daya dan masyarakat, siapa yang memanfaatkan sumber daya, bagaimana pola pemanfaatannya, bagaimana hasil perikanan diperdagangkan, persoalan apa yang dihadapi, serta kapasitas dan peluang yang tersedia untuk memperbaiki pengelolaan.

Atas dasar tersebut, YKL Indonesia melakukan Diagnosa Perikanan (Fisheries Diagnostic) melalui pendekatan riset aksi partisipatif di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang. Proses pengumpulan informasi dilakukan melalui diskusi kelompok terarah, wawancara, observasi, pemetaan partisipatif wilayah penangkapan, penyusunan kalender musim, penelusuran sejarah perkembangan perikanan, identifikasi kelembagaan dan para pihak, serta survei rantai pasok perikanan (YKL Indonesia, 2026a; YKL Indonesia, 2026b).

Pendekatan partisipatif digunakan agar masyarakat tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi terlibat dalam mengidentifikasi, menggambarkan, dan membaca kondisi perikanan yang mereka hadapi. Pengetahuan dan pengalaman masyarakat kemudian dipadukan dengan data lapangan dan informasi sekunder untuk menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai sistem perikanan.

Diagnosa mencakup perikanan skala kecil secara lebih luas dengan perhatian khusus pada perikanan gurita. Cakupan ini penting karena nelayan dan rumah tangga perikanan berada dalam sistem penghidupan yang dinamis dan tidak selalu bergantung pada satu komoditas. Perubahan musim, kondisi sumber daya, cuaca, pasar, dan kebutuhan ekonomi dapat memengaruhi pilihan komoditas dan aktivitas yang dilakukan masyarakat.

Hasil diagnosa menjadi data dasar (baseline) untuk menggambarkan kondisi awal sosial-ekonomi dan perikanan pada periode awal program. Baseline tersebut diperlukan agar perubahan yang terjadi selama implementasi dapat diamati dan dibandingkan, termasuk perkembangan kapasitas masyarakat, sistem monitoring perikanan, praktik pengelolaan, kelembagaan, tata kelola, serta kondisi sosial-ekonomi yang relevan.

Dengan demikian, diagnosa perikanan tidak berhenti pada penyusunan profil atau dokumentasi kondisi awal. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar pembelajaran, perencanaan tindakan, monitoring, evaluasi, dan adaptasi pengelolaan berdasarkan perkembangan kondisi sosial-ekologi dan hasil yang diperoleh selama proses implementasi.

1.4. Tujuan Penyusunan Profil dan Diagnosa Perikanan

Penyusunan Profil dan Diagnosa Perikanan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang bertujuan untuk membangun basis data dan pengetahuan mengenai kondisi awal serta dinamika sistem perikanan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan pengembangan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat dan data.

Secara khusus, dokumen ini bertujuan untuk:

1. Menggambarkan kondisi awal sosial-ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan penghidupan dan pemanfaatan sumber daya perikanan di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang.
2. Mengidentifikasi karakteristik sistem perikanan skala kecil, meliputi nelayan, armada, alat tangkap, komoditas, wilayah penangkapan, musim, pola pemanfaatan, dan dinamika perikanan.
3. Mendokumentasikan secara lebih mendalam karakteristik dan dinamika perikanan gurita sebagai salah satu perikanan penting bagi masyarakat dan fokus pengembangan pengelolaan dalam program.
4. Menggambarkan rantai pasok dan pemasaran hasil perikanan, termasuk aktor, aliran produk, pembentukan harga, hubungan perdagangan, dan posisi nelayan dalam rantai pasok.
5. Mengidentifikasi kelembagaan, para pihak, aturan, praktik lokal, serta kondisi tata kelola yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan.
6. Mengidentifikasi persoalan, tekanan, potensi, dan kondisi pendukung yang memengaruhi keberlanjutan sumber daya perikanan, ekosistem, dan penghidupan masyarakat.
7. Menyediakan baseline sosial-ekonomi dan perikanan sebagai dasar untuk memantau perubahan, mendukung pembelajaran, dan menentukan arah pengembangan pengelolaan perikanan selama implementasi program.

1.5. Pendekatan Implementasi Program

Strategi implementasi program dibangun dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya, sementara YKL Indonesia berperan sebagai fasilitator yang mendukung proses pembelajaran, penyediaan dan pemanfaatan pengetahuan, penguatan kapasitas dan kelembagaan, serta membangun jembatan antara masyarakat dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.

Implementasi program menggunakan pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat (community-based management), pengelolaan berbasis bukti (evidence-based management), pengelolaan adaptif (adaptive management), dan pengelolaan bersama (co-management), dengan penerapan prinsip safeguard, FPIC, inklusivitas, dan pembelajaran partisipatif sebagai prinsip yang melandasi seluruh proses.

Pengelolaan berbasis masyarakat menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai sumber informasi atau penerima manfaat, tetapi sebagai pihak yang terlibat dalam memahami masalah, menghasilkan data dan pengetahuan, menentukan pilihan pengelolaan, menyusun kesepakatan, menjalankan sistem pengelolaan, melakukan monitoring, serta mengevaluasi hasilnya. Pendekatan ini memastikan bahwa tata kelola yang dibangun memiliki kepemilikan dan legitimasi sosial serta sesuai dengan konteks masyarakat Pulau Sembilan.

Pengelolaan berbasis bukti memastikan bahwa keputusan program dan pengelolaan sumber daya didasarkan pada kombinasi data ilmiah, monitoring, hasil riset aksi partisipatif, dan pengetahuan lokal masyarakat. Data tidak diposisikan hanya sebagai keluaran berupa dokumen atau database, tetapi digunakan sebagai bahan pembelajaran, perencanaan, penentuan tindakan pengelolaan, evaluasi, dan penyempurnaan keputusan.

Pengelolaan adaptif diterapkan melalui proses yang terus berulang antara pengumpulan data, pembelajaran, pengambilan keputusan, penerapan tindakan pengelolaan, monitoring, refleksi, dan penyesuaian strategi. Dengan pendekatan ini, desain kegiatan tidak diterapkan secara kaku, tetapi dapat disesuaikan berdasarkan perubahan kondisi sosial-ekologi, hasil monitoring, pembelajaran implementasi, dan dinamika masyarakat tanpa mengubah tujuan serta komitmen utama program.

Pengelolaan bersama dikembangkan untuk menghubungkan tata kelola berbasis masyarakat dengan dukungan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran masyarakat dalam pengelolaan, tetapi memperkuatnya melalui dukungan kewenangan,

pengetahuan, kebijakan, jejaring, sumber daya, dan mekanisme koordinasi yang dibutuhkan agar praktik pengelolaan dapat berjalan dan berkelanjutan.

Seluruh pendekatan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan safeguard, FPIC, mekanisme pengaduan, dan prinsip inklusivitas sepanjang siklus program. FPIC tidak diposisikan sebagai satu kali persetujuan pada awal kegiatan, melainkan sebagai proses berkelanjutan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang memadai, memiliki ruang untuk mempertimbangkan dan menyampaikan pandangan, serta terlibat secara bebas dalam keputusan yang memengaruhi akses, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya mereka.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan program juga menekankan pembelajaran melalui praktik (*learning by doing*). Proses belajar masyarakat tidak hanya berlangsung melalui SETARA, tetapi juga melalui keterlibatan dalam riset, monitoring, pemetaan, analisis masalah, penyusunan kesepakatan, uji coba sistem buka–tutup, penguatan kelembagaan, serta dialog dengan pemerintah dan para pihak. Dengan demikian, setiap proses implementasi sekaligus menjadi ruang untuk membangun kapasitas, kepemimpinan, rasa memiliki, dan kemandirian masyarakat.

Kelima pendekatan tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam empat pilar implementasi program yang saling terhubung, yang dijelaskan secara lebih mendalam dalam BAB 2 Kerangka Perubahan Program. Hubungan antara pendekatan dan pilar tersebut memastikan bahwa program tidak dijalankan sebagai kumpulan kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai satu sistem intervensi yang menghubungkan data dan pengetahuan → pembelajaran dan kapasitas → keputusan dan tata kelola → tindakan pengelolaan → monitoring dan refleksi → adaptasi, dengan dukungan pengelolaan bersama sepanjang proses implementasi.

Gambar 2. Perahu nelayan parkir usai melakukan penangkapan gurita



BAB 2. PROFIL PENANGKAPAN GURITA

2.1. Sejarah, Wilayah Tangkap, dan Musim

Sejarah dan Tren Perikanan Gurita

Perikanan di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring perkembangan teknologi penangkapan, perubahan komoditas bernilai ekonomi, akses terhadap pasar, serta dukungan program pemerintah. Perubahan tersebut memengaruhi jangkauan penangkapan, pilihan komoditas, strategi penghidupan, dan organisasi nelayan.

Sebelum tahun 1980, nelayan masih mengandalkan perahu layar untuk melakukan aktivitas penangkapan. Penggunaan armada tanpa mesin membuat kegiatan melaut sangat bergantung pada angin dan kondisi cuaca, tetapi membutuhkan biaya operasional yang relatif rendah. Memasuki tahun 1980-an, penggunaan mesin katinting mulai berkembang dan membawa perubahan terhadap mobilitas nelayan. Waktu tempuh menjadi lebih singkat dan wilayah penangkapan dapat dijangkau lebih cepat dan lebih luas.

Pada dekade 1990-an, aktivitas penangkapan berkembang hingga ke wilayah yang jauh. Sejumlah nelayan melakukan pencarian teripang hingga perairan Australia. Aktivitas tersebut memberikan peluang peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga menghadirkan risiko karena terdapat kapal nelayan yang disita akibat aktivitas penangkapan di wilayah tersebut. Pada periode yang sama, penangkapan ikan hidup juga berkembang sebagai salah satu aktivitas perikanan yang memberikan tambahan hasil bagi nelayan.

Perkembangan perikanan gurita berlangsung lebih kemudian. Berdasarkan penelusuran sejarah bersama masyarakat, nelayan mulai menangkap gurita sekitar tahun 2015. Masuknya gurita sebagai komoditas tangkapan memperluas pilihan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan tambahan peluang ekonomi bagi rumah tangga nelayan.

Pengetahuan dan teknik penangkapan gurita kemudian berkembang melalui interaksi antarnelayan. Sekitar tahun 2020, nelayan setempat mempelajari teknik penangkapan gurita dari nelayan Pulau Langkai, termasuk penggunaan dan model alat tangkap. Pertukaran pengetahuan tersebut memperkaya keterampilan nelayan dalam memanfaatkan gurita sebagai salah satu komoditas perikanan (YKL Indonesia, 2026a).

Perubahan juga terjadi pada aspek kelembagaan. Pada periode 2019–2020, masyarakat mulai membentuk kelompok-kelompok nelayan dan pembudidaya. Sejumlah kelompok kemudian memperoleh dukungan berupa tali untuk kegiatan budidaya rumput laut dan mesin untuk mendukung aktivitas kelompok penangkapan. Perkembangan kelompok menjadi bagian dari meningkatnya akses masyarakat terhadap program dan dukungan sarana usaha.

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 turut memengaruhi aktivitas ekonomi perikanan, terutama melalui penurunan harga hasil perikanan. Kondisi tersebut menunjukkan keterkaitan antara penghidupan nelayan di tingkat pulau dengan perubahan pasar yang terjadi di luar wilayah produksi.

Pada tahun 2021, dilakukan pengukuran kapal untuk penerbitan Pas Kecil, yang mendukung pemenuhan administrasi dan legalitas kapal nelayan. Perkembangan ini menjadi bagian dari perubahan aspek administrasi perikanan yang sebelumnya belum banyak dijangkau oleh nelayan.

Secara keseluruhan, sejarah tersebut menunjukkan perubahan sistem perikanan dari penggunaan teknologi sederhana menuju penggunaan armada bermesin, perluasan wilayah penangkapan, diversifikasi komoditas, berkembangnya perikanan gurita, pembentukan kelompok, hingga meningkatnya kebutuhan administrasi usaha perikanan. Perikanan gurita sendiri merupakan perkembangan yang relatif baru dibandingkan aktivitas perikanan lainnya dan menjadi bagian dari sistem perikanan multi-komoditas yang dijalankan masyarakat Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang.



Gambar 3. Hasil tangkapan gurita dari perairan Pulau Kambuno menjadi bagian penting penghidupan masyarakat pesisir.

Tabel 1. Sejarah dan Tren Perikanan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang

Tahun	Kejadian/Perubahan	Dampak terhadap Perikanan/Masyarakat
<1980	Nelayan masih menggunakan perahu layar sebagai sarana utama untuk melakukan aktivitas penangkapan.	Biaya operasional relatif rendah, tetapi jangkauan penangkapan dan aktivitas melaut sangat bergantung pada angin dan kondisi cuaca.
1980-an	Nelayan mulai menggunakan mesin katinting untuk mendukung aktivitas penangkapan.	Mobilitas nelayan meningkat, waktu tempuh menjadi lebih cepat, dan wilayah penangkapan dapat dijangkau lebih luas.
1990-an	Nelayan melakukan penangkapan teripang hingga perairan Australia.	Peluang dan hasil tangkapan meningkat, tetapi aktivitas penangkapan hingga perairan Australia juga menimbulkan risiko, termasuk adanya kapal nelayan yang disita.
1990-an	Berkembangnya aktivitas penangkapan ikan hidup sebagai salah satu komoditas perikanan.	Menambah jenis komoditas tangkapan dan memberikan peluang peningkatan hasil serta pendapatan nelayan.
2015	Nelayan mulai melakukan penangkapan gurita sebagai salah satu komoditas target.	Menambah keragaman komoditas tangkapan dan membuka peluang tambahan pendapatan bagi nelayan.
2019–2020	Masyarakat mulai membentuk kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya rumput laut.	Sejumlah kelompok memperoleh akses terhadap dukungan sarana, antara lain tali untuk budidaya rumput laut dan mesin untuk mendukung aktivitas penangkapan.
2020	Pandemi COVID-19 memengaruhi aktivitas ekonomi dan pemasaran hasil perikanan.	Terjadi penurunan harga hasil perikanan yang berdampak terhadap nilai penjualan dan pendapatan nelayan.
2020	Nelayan mulai mempelajari teknik penangkapan gurita dari nelayan Pulau Langkai, termasuk alat dan model penangkapannya.	Menambah pengetahuan dan keterampilan nelayan mengenai alat, teknik, dan cara penangkapan gurita.
2021	Dilakukan pengukuran kapal untuk penerbitan Pas Kecil.	Mendukung pemenuhan dokumen administrasi dan legalitas kapal nelayan.

Sumber: Hasil Riset Aksi Partisipatif Masyarakat untuk Diagnosa Perikanan, YKL Indonesia, 2026.

Wilayah Penangkapan

Wilayah penangkapan merupakan bagian penting dalam memahami karakter perikanan masyarakat Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang. Hasil pemetaan partisipatif menunjukkan bahwa nelayan memanfaatkan perairan di sekitar Pulau Sembilan, terutama pada kawasan taka' atau hamparan terumbu karang yang menjadi habitat berbagai sumber daya perikanan. Pemilihan wilayah penangkapan dipengaruhi oleh keberadaan komoditas target, kondisi habitat, musim, jarak dan kemampuan armada, biaya operasional, serta pengetahuan nelayan yang terbentuk dari pengalaman melaut (YKL Indonesia, 2026a).

Wilayah penangkapan tidak hanya berada di sekitar pulau tempat tinggal. Nelayan mengenali dan memanfaatkan sejumlah taka' yang tersebar ke berbagai arah dari Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang, antara lain Taka' Pasi' Loangnge/Pasiloang, Bungentellue, Pasimaborong, Toia, Marempu, Talinting, Bunginperre, Labuleng, Latembang, Limpoge, Labrange, Lakajao, dan Larombe. Masing-masing lokasi memiliki karakteristik, jarak, dan pola pemanfaatan yang berbeda (YKL Indonesia, 2026a).

Taka' Pasi' Loangnge sebagai Wilayah Penangkapan Utama

Di antara wilayah tersebut, Taka' Pasi' Loangnge merupakan salah satu wilayah penangkapan yang paling diprioritaskan oleh masyarakat. Lokasinya berjarak sekitar 5 mil dari pulau dan memiliki hamparan terumbu karang yang relatif luas dibandingkan sejumlah *taka'* lainnya. Menurut masyarakat, kondisi tersebut mendukung keberadaan sumber daya perikanan yang beragam sehingga memberikan peluang hasil tangkapan yang lebih baik (YKL Indonesia, 2026a).

Taka' Pasi' Loangnge merupakan wilayah penangkapan gurita, ikan dasar, tenggiri, dan komoditas perikanan bernilai ekonomi lainnya. Wilayah ini juga dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut, sehingga memiliki fungsi ekonomi yang beragam bagi masyarakat. Pemanfaatan yang tumpang tindih antara perikanan tangkap dan budidaya menunjukkan bahwa Taka' Pasi' Loangnge bukan hanya penting dari sisi sumber daya, tetapi merupakan salah satu ruang penghidupan utama masyarakat.

Tingginya potensi sumber daya juga membuat Taka' Pasi' Loangnge tidak hanya dimanfaatkan oleh nelayan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang. Nelayan dari pulau lain di Kepulauan Sembilan serta nelayan dari luar wilayah, termasuk Pangkep, Makassar, Takalar, Selayar, dan Bone, diketahui turut memanfaatkan wilayah perairan tersebut dan *taka'* lainnya sebagai daerah penangkapan. Kehadiran nelayan luar terutama terjadi pada waktu tertentu, termasuk ketika

kondisi musim di daerah asal mereka kurang mendukung aktivitas penangkapan (YKL Indonesia, 2026a).

Sebaran dan Karakteristik Wilayah Penangkapan

Selain Taka' Pasi' Loangnge, nelayan memanfaatkan sejumlah taka' di bagian utara, antara lain Marempu, Talinting, Bunginperre, Labuleng, Latembang, dan Labrange. Wilayah-wilayah tersebut digunakan untuk menangkap gurita, ikan dasar, serta berbagai komoditas bernilai ekonomi lainnya. Di bagian selatan terdapat beberapa wilayah penangkapan, salah satunya Bungentellue yang berjarak sekitar 8 mil dari pulau (YKL Indonesia, 2026a).

Jangkauan penangkapan masyarakat dapat mencapai wilayah yang relatif jauh. Taka' Limpoge, sekitar 20 mil ke arah timur, merupakan wilayah penangkapan terjauh yang teridentifikasi dalam proses pemetaan partisipatif. Nelayan dapat membutuhkan waktu sekitar tiga hari ketika melakukan perjalanan penangkapan ke wilayah ini. Komoditas yang ditangkap meliputi gurita, kakap, kerapu, udang, dan tenggiri. Jarak yang lebih jauh menunjukkan bahwa strategi penangkapan tidak hanya mempertimbangkan kedekatan lokasi, tetapi juga potensi komoditas dan hasil yang dapat diperoleh dibandingkan dengan waktu dan biaya operasional yang dikeluarkan (YKL Indonesia, 2026a).

Sebaliknya, Taka' Lakajao dan Larombe merupakan beberapa wilayah yang relatif dekat, sekitar 2 mil ke arah tenggara pulau. Lokasi tersebut antara lain dimanfaatkan nelayan setelah melakukan aktivitas pemasangan atau pemeliharaan rumput laut di sekitar pulau. Pola ini memperlihatkan keterkaitan antara aktivitas budidaya rumput laut dan perikanan tangkap dalam strategi penghidupan masyarakat. Nelayan dapat mengombinasikan aktivitas dalam satu perjalanan atau menyesuaikan kegiatan berdasarkan waktu dan lokasi yang dapat dijangkau (YKL Indonesia, 2026a).

Tidak seluruh taka' memiliki intensitas pemanfaatan yang sama. Taka' Pasimaborong, yang berada di sebelah barat pulau, termasuk wilayah yang relatif jarang menjadi prioritas penangkapan. Menurut masyarakat, lokasi tersebut berada lebih dekat dengan pengaruh muara sungai sehingga kondisi perairannya cenderung lebih keruh. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan nelayan dalam memilih wilayah penangkapan dibandingkan taka' lainnya yang dianggap memiliki kondisi perairan dan potensi sumber daya lebih baik (YKL Indonesia, 2026a).

Wilayah Pemanfaatan Bersama dan Dinamika Konflik

Wilayah penangkapan masyarakat pada dasarnya merupakan ruang pemanfaatan bersama. Tidak terdapat pemisahan yang tegas bahwa suatu taka' hanya dapat dimanfaatkan oleh nelayan dari satu pulau. Pola akses terbuka tersebut memungkinkan nelayan dari berbagai wilayah menggunakan ruang dan sumber daya yang sama, terutama pada taka' yang memiliki potensi perikanan tinggi.

Kondisi tersebut pada beberapa kesempatan menimbulkan ketegangan. Berdasarkan informasi masyarakat, nelayan Pulau Kambuno pernah melakukan upaya pengusiran terhadap nelayan dari luar wilayah karena aktivitas penangkapan mereka dinilai terlalu intensif. Keresahan terutama berkaitan dengan nelayan yang melakukan penangkapan dengan cara menyelam menggunakan kompresor, termasuk aktivitas penyelaman pada waktu malam. Nelayan setempat menilai intensitas dan cara penangkapan tersebut dapat memberikan tekanan yang lebih besar terhadap sumber daya yang juga menjadi wilayah penghidupan masyarakat lokal (YKL Indonesia, 2026a).

Dinamika tersebut menunjukkan bahwa persoalan wilayah penangkapan bukan semata-mata persoalan batas ruang, tetapi berkaitan dengan siapa yang memanfaatkan sumber daya, cara penangkapan yang digunakan, intensitas pemanfaatan, serta persepsi mengenai keadilan akses terhadap sumber daya. Konflik dapat muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan dan praktik pemanfaatan pada ruang yang sama, sementara belum terdapat kesepakatan pengelolaan yang cukup kuat untuk mengatur hubungan antar pengguna.

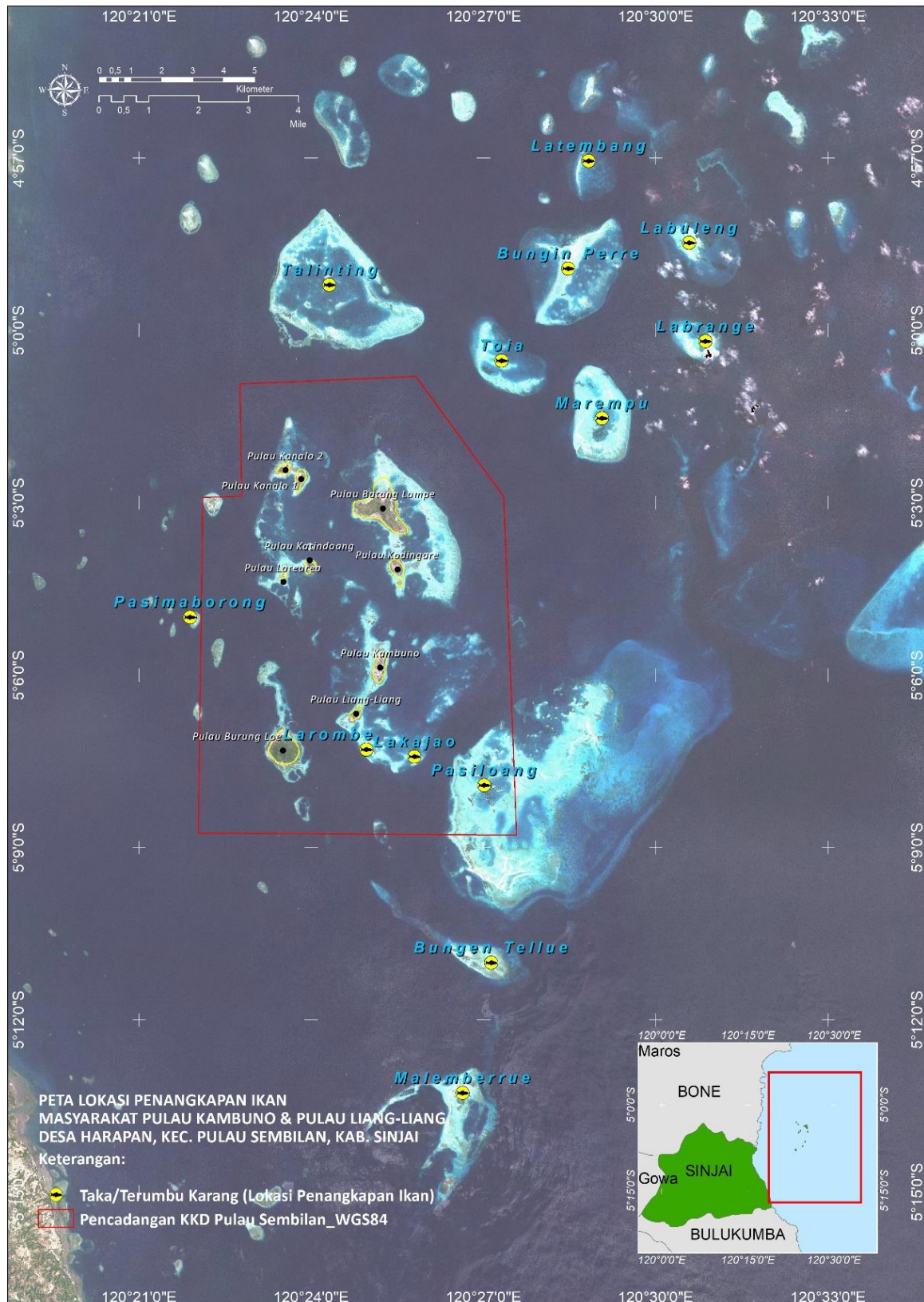
Kondisi wilayah tangkap bersama menjadi pertimbangan fundamental dalam pengembangan tata kelola perikanan di Pulau Sembilan. Setiap rencana pengelolaan berbasis wilayah tidak dapat hanya mempertimbangkan batas administratif desa atau tempat tinggal nelayan. Identifikasi pengguna aktual, pola akses, jenis aktivitas, komoditas yang dimanfaatkan, serta hubungan dengan nelayan dari luar wilayah perlu menjadi bagian dari proses penyusunan kesepakatan.

Pemetaan partisipatif dalam diagnosa ini karena itu merupakan gambaran awal ruang pemanfaatan berdasarkan pengetahuan masyarakat, bukan penetapan batas wilayah kelola. Data tersebut menjadi baseline untuk memperdalam pemetaan pengguna dan intensitas pemanfaatan serta menjadi dasar dialog dalam menentukan pilihan pengelolaan secara partisipatif. Pada wilayah yang digunakan bersama, pengelolaan akan membutuhkan komunikasi dan kolaborasi yang melampaui satu kelompok atau satu pulau agar tindakan pengelolaan dapat berjalan efektif dan tidak memindahkan atau memperbesar potensi konflik.

Tabel 2. Wilayah Penangkapan Utama Nelayan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang

No.	Lokasi	Jarak/Posisi	Pemanfaatan dan Karakteristik Utama
1	Taka' Pasi' Loangnge	±5 mil	Wilayah penangkapan prioritas; dimanfaatkan untuk gurita, ikan dasar, tenggiri, dan komoditas lainnya serta budidaya rumput laut. Memiliki hamparan terumbu karang yang relatif luas dan menurut masyarakat memiliki sumber daya perikanan yang melimpah.
2	Bungentellue	±8 mil; bagian selatan	Salah satu wilayah penangkapan masyarakat di bagian selatan pulau.
3	Pasimaborong	Bagian barat	Relatif jarang menjadi prioritas penangkapan karena berada dekat pengaruh muara sungai dan kondisi perairannya cenderung lebih keruh.
4	Toia	—	Teridentifikasi sebagai salah satu wilayah penangkapan dalam pemetaan partisipatif masyarakat.
5	Marempu	Bagian utara	Wilayah penangkapan gurita, ikan dasar, dan komoditas perikanan bernilai ekonomi lainnya.
6	Talinting	Bagian utara	Wilayah penangkapan gurita, ikan dasar, dan komoditas perikanan bernilai ekonomi lainnya.
7	Bunginperre	Bagian utara	Wilayah penangkapan gurita, ikan dasar, dan komoditas perikanan bernilai ekonomi lainnya.
8	Labuleng	Bagian utara	Wilayah penangkapan gurita, ikan dasar, dan komoditas perikanan bernilai ekonomi lainnya.
9	Latembang	Bagian utara	Wilayah penangkapan gurita, ikan dasar, dan komoditas perikanan bernilai ekonomi lainnya.
10	Limpoge	±20 mil ke arah timur	Wilayah penangkapan terjauh yang teridentifikasi; komoditas meliputi gurita, kakap, kerapu, udang, dan tenggiri. Perjalanan penangkapan dapat berlangsung sekitar tiga hari.
11	Labrange	Bagian utara	Wilayah penangkapan gurita, ikan dasar, dan komoditas perikanan bernilai ekonomi lainnya.
12	Lakajao	±2 mil ke arah tenggara	Salah satu wilayah terdekat; antara lain dimanfaatkan nelayan untuk menangkap ikan setelah melakukan aktivitas budidaya rumput laut di sekitar pulau.
13	Larombe	±2 mil ke arah tenggara	Salah satu wilayah terdekat; pola pemanfaatannya berkaitan dengan aktivitas perikanan tangkap dan budidaya rumput laut di sekitar pulau.

Sumber: Hasil pemetaan partisipatif dan Riset Aksi Partisipatif Masyarakat untuk Diagnosa Perikanan, YKL Indonesia, 2026.



Gambar 4. Peta Partisipatif Wilayah Penangkapan Masyarakat Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang

Kalender Musim Penangkapan

Aktivitas perikanan masyarakat Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang berlangsung secara dinamis mengikuti perubahan musim, kondisi cuaca dan perairan, serta ketersediaan sumber daya. Nelayan menyesuaikan waktu melaut, wilayah penangkapan, alat tangkap, dan komoditas target berdasarkan pengalaman serta pengetahuan terhadap pola musim yang berlangsung sepanjang tahun.

Berdasarkan kalender musim yang disusun secara partisipatif bersama masyarakat, terdapat tiga kondisi musim utama yang memengaruhi aktivitas perikanan, yaitu musim barat, musim timur, dan musim pancaroba. Musim barat berlangsung terutama pada Januari–April dan November–Desember, musim timur pada Juni–September, sedangkan kondisi pancaroba teridentifikasi pada April–Mei dan September–November. Peralihan musim tersebut memengaruhi kondisi angin, gelombang, dan kemampuan nelayan melakukan aktivitas di wilayah penangkapan (YKL Indonesia, 2026a).

Musim Gurita

Gurita merupakan komoditas yang dapat ditangkap sepanjang tahun, tetapi tingkat kelimpahannya berbeda antarmusim. Berdasarkan pengetahuan masyarakat, kelimpahan gurita berada pada kondisi tertinggi pada Januari–Maret dan Desember, kemudian berada pada tingkat sedang pada April dan November. Pada Mei–Oktober, gurita masih dapat ditangkap tetapi kelimpahannya relatif lebih rendah dibandingkan periode lainnya (YKL Indonesia, 2026a).

Pola tersebut menunjukkan bahwa perikanan gurita memiliki periode produktivitas yang berbeda sepanjang tahun. Bagi nelayan yang menjalankan perikanan multi-komoditas, perubahan kelimpahan gurita dapat memengaruhi pilihan komoditas yang ditangkap. Ketika gurita relatif sedikit, nelayan dapat menyesuaikan aktivitas dengan menangkap sumber daya lain yang sedang tersedia atau melakukan aktivitas penghidupan lainnya.

Musim Komoditas Perikanan dan Rumput Laut

Selain gurita, kalender musim menunjukkan adanya perbedaan waktu ketersediaan dan pemanfaatan komoditas lainnya. Tenggiri teridentifikasi terutama pada Juni–Oktober, dengan peningkatan kelimpahan pada Juli, mencapai kondisi tertinggi sekitar Agustus, kemudian menurun pada September–Oktober.

Ikan dasar memiliki periode penangkapan yang teridentifikasi terutama pada Juni–September. Sementara itu, ikan mairo/teri teridentifikasi pada Januari–April dan

Oktober–Desember. Perbedaan waktu ketersediaan antarkomoditas tersebut memungkinkan nelayan menyesuaikan aktivitas penangkapan sepanjang tahun (YKL Indonesia, 2026a).

Budidaya rumput laut berlangsung terutama pada Juni–Desember. Aktivitas ini menjadi bagian penting dari pola penghidupan masyarakat dan dapat dilakukan bersamaan atau bergantian dengan kegiatan perikanan tangkap. Sebagian nelayan mengombinasikan kedua aktivitas tersebut sebagai strategi dalam memanfaatkan perubahan kondisi musim dan peluang ekonomi.

Musim Paceklik dan Strategi Penghidupan

Masyarakat mengidentifikasi Juni–Agustus sebagai periode musim paceklik. Periode ini bertepatan dengan musim timur dan tidak selalu berarti seluruh aktivitas perikanan berhenti, tetapi menggambarkan kondisi ketika peluang memperoleh hasil atau pendapatan dari aktivitas tertentu menjadi lebih terbatas.

Menariknya, musim paceklik berlangsung ketika beberapa aktivitas lain tetap tersedia, termasuk penangkapan tenggiri dan ikan dasar serta budidaya rumput laut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa musim paceklik tidak dapat dimaknai hanya berdasarkan ada atau tidaknya sumber daya di laut, tetapi berkaitan dengan keseluruhan kondisi penghidupan, produktivitas, akses terhadap komoditas, serta hasil ekonomi yang diperoleh masyarakat.

Karakter perikanan yang multi-komoditas memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan penyesuaian. Pergantian komoditas target dan kombinasi antara perikanan tangkap dengan budidaya rumput laut menjadi bagian dari strategi penghidupan dalam menghadapi perubahan musim.

Tabel 3. Kalender Musim Perikanan di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang

No	Keterangan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Musim timur						x	x	x	x			
2	Musim barat	x	x	x	x							x	x
3	Musim pancaroba				x	x				x	x	x	
4	Gurita	xx x	xx x	xx x	xx	x	x	x	x	x	x	xx	xx x
5	Rumput laut						x	x	x	x	x	x	x
6	Tenggiri						x	xx	xx x	xx	x		
7	Ikan dasar						x	x	x	x			
8	Ikan mairo/teri	x	x	x	x						x	x	x
9	Musim paceklik						x	x	x				

Keterangan: x = ada/rendah/periode berlangsung/tersedia; xx = sedang/kelimpahan relatif sedang; xxx = tinggi/puncak/kelimpahan tertinggi berdasarkan pengetahuan masyarakat.

Sumber: Hasil penyusunan kalender musim secara partisipatif dalam Riset Aksi Partisipatif Masyarakat untuk Diagnosa Perikanan, YKL Indonesia, 2026.

Kalender musim memperlihatkan bahwa gurita memiliki pola yang relatif berlawanan dengan beberapa aktivitas penghidupan lainnya. Kelimpahan gurita relatif tinggi pada awal dan akhir tahun, sedangkan budidaya rumput laut serta beberapa perikanan lain lebih aktif pada pertengahan tahun. Pola ini menunjukkan adanya pembagian waktu pemanfaatan sumber daya yang memungkinkan rumah tangga menyesuaikan strategi penghidupannya sepanjang tahun.

Sebagai baseline, kalender musim ini merekam pengetahuan masyarakat mengenai pola musim pada saat diagnosa dilakukan, sehingga tidak dimaksudkan sebagai kalender biologis yang bersifat tetap. Perubahan cuaca, kondisi oseanografi, produktivitas sumber daya, dan dinamika iklim dapat menggeser pola tersebut. Data monitoring perikanan selama implementasi program selanjutnya dapat digunakan untuk menguji dan memperbarui kalender musim, termasuk melihat perubahan waktu kelimpahan gurita dan komoditas lainnya dari tahun ke tahun.

2.2. Karakteristik Perikanan Gurita

Nelayan Tangkap Gurita

Perikanan merupakan sumber penghidupan utama dan mendominasi mata pencaharian masyarakat Desa Pulau Harapan. Sebagian besar nelayan menjalankan pola penangkapan multi-komoditas (multiple target), yaitu memanfaatkan berbagai jenis sumber daya perikanan sesuai musim, ketersediaan sumber daya, alat tangkap, dan peluang ekonomi. Sebagian lainnya lebih memfokuskan aktivitas penangkapan pada komoditas tertentu, termasuk gurita dan sotong (YKL Indonesia, 2026a).

Angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan informasi masyarakat dalam proses diagnosa partisipatif, sehingga digunakan untuk menggambarkan kecenderungan struktur mata pencaharian dan belum dimaknai sebagai statistik kependudukan resmi. Karakter multi-komoditas menjadi ciri penting perikanan setempat karena sebagian besar nelayan tidak bergantung pada satu jenis sumber daya sepanjang tahun.

Gurita menjadi salah satu komoditas yang diprioritaskan bersama ikan demersal karena memiliki nilai ekonomi yang relatif tinggi bagi nelayan. Selain gurita, masyarakat menangkap tenggiri, kakap, kerapu, udang, mairo/teri, dan berbagai komoditas lainnya. Ketika hasil tangkapan suatu komoditas menurun atau kondisi perairan kurang mendukung, nelayan dapat beralih pada komoditas lain. Sebagian rumah tangga juga mengombinasikan perikanan tangkap dengan budidaya rumput laut sebagai bagian dari strategi penghidupan (YKL Indonesia, 2026a).

Perikanan gurita sendiri mulai berkembang sebagai salah satu aktivitas penangkapan masyarakat sekitar tahun 2015. Pengetahuan dan teknik penangkapan kemudian berkembang melalui pertukaran pengalaman antarnelayan. Sekitar tahun 2020, nelayan setempat mempelajari alat dan teknik penangkapan gurita dari nelayan Pulau Langkai, yang menambah pengetahuan mengenai model alat dan praktik penangkapan gurita (YKL Indonesia, 2026a).

Peran Perempuan dalam Sistem Perikanan

Aktivitas perikanan tangkap didominasi oleh laki-laki, tetapi keterlibatan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan tidak sepenuhnya terbatas pada nelayan laki-laki. Perempuan di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang memiliki peran dalam berbagai bagian sistem penghidupan perikanan, baik melalui keterlibatan langsung dalam pemanfaatan sumber daya maupun melalui aktivitas yang mendukung produksi, pemasaran hasil tangkapan, dan ekonomi rumah tangga nelayan. Meskipun aktivitas penangkapan didominasi oleh laki-laki, ditemukan pula perempuan yang melakukan penangkapan menggunakan sampan dengan target berupa ikan, gurita, teripang, dan biota laut lainnya.

Dalam rumah tangga nelayan, perempuan berperan mendukung kegiatan penangkapan, antara lain dengan menyiapkan bekal dan kebutuhan anggota keluarga sebelum melaut. Setelah hasil tangkapan dibawa pulang, perempuan juga dapat berperan dalam proses pemasaran. Pada sejumlah rumah tangga, istri nelayan membawa atau menjual hasil tangkapan kepada pengepul di pulau. Dengan demikian, keterlibatan perempuan tidak hanya berada pada ranah domestik, tetapi juga menjadi bagian dari alur ekonomi yang menghubungkan kegiatan penangkapan dengan transaksi hasil perikanan.

Peran ekonomi perempuan juga berubah mengikuti musim dan sumber penghidupan yang tersedia. Pada musim budidaya rumput laut, perempuan terlibat dalam berbagai aktivitas seperti mengikat dan menjemur rumput laut, baik secara individual maupun bersama anggota rumah tangga lainnya. Aktivitas tersebut dapat berlangsung dari pagi hingga sore dan menjadi salah satu sumber kontribusi ekonomi perempuan terhadap rumah tangga.

Di Pulau Kambuno juga pernah berkembang inisiatif kelompok perempuan dalam pengolahan hasil perikanan menjadi produk olahan, seperti keripik dan produk lainnya. Namun, kegiatan tersebut tidak berlanjut, antara lain karena keterbatasan akses pasar dan pendampingan. Pengalaman ini menunjukkan adanya pengalaman dan potensi perempuan dalam kegiatan pengolahan hasil perikanan, meskipun keberlanjutan usaha masih menghadapi kendala.



Gambar 5. Istri nelayan membawa gurita hasil tangkapan suaminya ke pengepul tingkat pulau

Secara umum, peran perempuan dalam sistem perikanan di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang bersifat beragam dan mengikuti dinamika musim serta aktivitas ekonomi rumah tangga. Perempuan dapat terlibat mulai dari mendukung persiapan penangkapan, melakukan penangkapan secara langsung, aktivitas pascapanen dan budidaya rumput laut, hingga pemasaran hasil perikanan. Kondisi ini penting diperhatikan dalam pengembangan pengelolaan perikanan agar keterlibatan masyarakat tidak hanya dipahami melalui nelayan yang melakukan penangkapan, tetapi juga mencakup anggota rumah tangga dan pelaku lain yang memiliki fungsi dalam sistem perikanan.

Pola Operasi Penangkapan

Berdasarkan pola operasinya, nelayan melakukan kegiatan penangkapan secara individual maupun berkelompok. Nelayan yang beroperasi secara individual

umumnya menggunakan perahu berukuran relatif kecil dan melakukan aktivitas penangkapan secara mandiri, termasuk untuk gurita dan ikan demersal. Sementara itu, operasi secara berkelompok dilakukan terutama ketika penggunaan armada, alat tangkap, jarak wilayah penangkapan, atau karakter operasi membutuhkan lebih dari satu orang.

Sebagian besar aktivitas penangkapan dilakukan dengan pola satu hari satu perjalanan (*one day one trip*), yaitu nelayan berangkat dan kembali pada hari yang sama. Pola ini terutama dilakukan pada wilayah penangkapan yang masih dapat dijangkau dalam perjalanan harian.

Pada wilayah yang lebih jauh, sebagian nelayan melakukan operasi dengan sistem bermalam yang secara lokal dikenal sebagai sawakung. Pola ini memungkinkan nelayan berada di wilayah penangkapan selama beberapa hari sehingga mengurangi perjalanan pulang-pergi dan memperpanjang waktu efektif untuk melakukan penangkapan.

Perbedaan pola tersebut terlihat dari luasnya jangkauan wilayah penangkapan. Nelayan dapat memanfaatkan *taka'* yang hanya berjarak sekitar 2–5 mil dari pulau hingga wilayah yang lebih jauh seperti Taka' Limpoge, sekitar 20 mil ke arah timur. Pada wilayah yang jauh, perjalanan penangkapan dapat berlangsung sekitar tiga hari dengan target yang tidak hanya gurita, tetapi juga kakap, kerapu, udang, tenggiri, dan komoditas lainnya (YKL Indonesia, 2026a).

Pola Usaha dan Hubungan dengan Pengepul

Berdasarkan pola usahanya, terdapat nelayan yang menjalankan usaha secara mandiri dan nelayan yang memiliki hubungan permodalan atau kerja sama dengan pengepul. Nelayan mandiri pada umumnya menyediakan sendiri armada, alat tangkap, bahan bakar, dan kebutuhan operasional penangkapan.

Pada pola lainnya, pengepul dapat memberikan dukungan berupa modal operasional, alat tangkap, sarana, atau kebutuhan melaut, yang kemudian membentuk hubungan penjualan antara nelayan dan pengepul. Hasil tangkapan nelayan yang menerima dukungan tersebut umumnya dijual kepada pengepul yang memberikan modal atau fasilitas.

Pola hubungan serupa ditemukan pada budidaya rumput laut. Pengepul dapat menyediakan kebutuhan produksi seperti bibit dan tali sebagai modal awal yang mendukung aktivitas budidaya. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa fungsi pengepul tidak terbatas sebagai pembeli hasil produksi, tetapi pada kondisi tertentu juga menjadi sumber akses terhadap modal dan sarana produksi (YKL Indonesia, 2026a; YKL Indonesia, 2026b).

Hubungan permodalan tersebut membantu nelayan dan pembudidaya menjalankan aktivitas ketika kemampuan menyediakan modal sendiri terbatas. Namun, hubungan tersebut sekaligus dapat membentuk ketergantungan ekonomi dan keterikatan dalam pemasaran hasil, terutama ketika akses terhadap sumber pembiayaan dan pembeli alternatif terbatas. Struktur hubungan ini menjadi bagian penting dalam memahami posisi nelayan dalam rantai pasok dan akan dibahas lebih lanjut pada bagian rantai perdagangan hasil perikanan.

Administrasi dan Kelembagaan Nelayan

Sebagian besar nelayan telah memiliki identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Masyarakat juga pernah memiliki Kartu Nelayan, tetapi berdasarkan hasil diagnosa, kartu yang dimiliki sebagian masyarakat sudah tidak berlaku sehingga tidak lagi dapat digunakan sebagaimana fungsi sebelumnya untuk mendukung akses terhadap program atau layanan tertentu (YKL Indonesia, 2026a).

Pada aspek administrasi kapal, proses pengukuran kapal untuk penerbitan Pas Kecil telah dilakukan sejak tahun 2021. Sebagian armada telah memiliki Pas Kecil sebagai dokumen legalitas kapal, meskipun tingkat kepemilikan dan kelengkapan administrasi masih berbeda antarnelayan.

Perkembangan kelembagaan masyarakat juga terlihat melalui pembentukan kelompok nelayan dan pembudidaya sekitar 2019–2020. Keberadaan kelompok membuka akses sebagian masyarakat terhadap berbagai bentuk dukungan, termasuk mesin untuk kelompok penangkapan dan sarana budidaya rumput laut (YKL Indonesia, 2026a).

Di Desa Pulau Harapan juga terdapat POKMASWAS Karang Merah yang tercatat memiliki 10 anggota pada tahun 2025. Keberadaan POKMASWAS menjadi salah satu modal kelembagaan yang relevan bagi pengawasan sumber daya, meskipun fungsi, kapasitas, dan tingkat keaktifannya perlu dilihat dalam konteks tata kelola perikanan secara lebih luas (Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, 2025).

Tabel 4. Karakteristik Nelayan dan Pola Operasi Perikanan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang

Aspek/Karakteristik	Keterangan	Deskripsi Kondisi
Mata pencaharian	Didominasi sektor perikanan	Perikanan merupakan mata pencaharian utama masyarakat. Selain perikanan tangkap, sebagian masyarakat juga melakukan budidaya rumput laut dan aktivitas ekonomi lainnya sebagai bagian dari strategi penghidupan rumah tangga.
Pola pemanfaatan sumber daya	Didominasi <i>multiple target</i> atau multi-komoditas	Sebagian besar nelayan tidak bergantung pada satu komoditas. Nelayan menyesuaikan target tangkapan berdasarkan musim, ketersediaan sumber daya, alat tangkap, kondisi perairan, dan peluang ekonomi.
Nelayan gurita dan sotong	Nelayan target khusus dan bagian dari perikanan multi-komoditas	Gurita dan sotong menjadi komoditas target bagi sebagian nelayan. Nelayan lainnya menangkap gurita sebagai bagian dari pola multi-komoditas dan dapat beralih ke komoditas lain sesuai musim dan kondisi perikanan.
Komoditas tangkapan	Gurita, sotong, ikan demersal, tenggiri, kakap, kerapu, udang, mairo/teri, dan komoditas lainnya	Jenis komoditas yang ditangkap bervariasi menurut musim, wilayah penangkapan, alat tangkap, dan ketersediaan sumber daya. Gurita dan ikan demersal menjadi beberapa komoditas yang diprioritaskan karena memiliki nilai ekonomi bagi nelayan.
Kategori/pola operasi nelayan	Individual dan kelompok	Penangkapan dilakukan secara individual maupun berkelompok. Pola operasi disesuaikan dengan jenis armada, alat tangkap, komoditas target, jarak wilayah penangkapan, dan kebutuhan tenaga kerja.
Durasi operasi penangkapan	<i>One day one trip</i> dan <i>sawakung</i>	Sebagian besar aktivitas dilakukan dengan pola berangkat dan kembali pada hari yang sama. Untuk wilayah penangkapan yang lebih jauh,

		sebagian nelayan melakukan sistem bermalam atau <i>sawakung</i> agar waktu penangkapan lebih efektif dan mengurangi perjalanan pulang-pergi.
Keterlibatan perempuan	Perempuan nelayan/pencari biota pesisir	Terdapat perempuan yang terlibat langsung dalam pemanfaatan sumber daya, terutama penangkapan gurita dan biota pesisir lainnya pada perairan relatif dangkal.
Aktivitas penghidupan lainnya	Budidaya rumput laut dan aktivitas ekonomi lainnya	Sebagian nelayan dan rumah tangga mengombinasikan perikanan tangkap dengan budidaya rumput laut. Pergantian atau kombinasi aktivitas menjadi bagian dari strategi menghadapi perubahan musim, hasil tangkapan, dan peluang ekonomi.
Pola usaha nelayan	Mandiri dan bermitra dengan pengepul	Nelayan mandiri menyediakan sendiri armada, alat tangkap, dan biaya operasional. Sebagian nelayan memperoleh dukungan modal, sarana, atau kebutuhan operasional dari pengepul yang kemudian berkaitan dengan pola penjualan hasil tangkapan.
Hubungan dengan pengepul	Pembeli, penyedia modal dan/atau sarana produksi	Pengepul tidak hanya berperan sebagai pembeli hasil, tetapi pada kondisi tertentu juga menyediakan modal, sarana penangkapan, atau kebutuhan operasional. Pola serupa ditemukan pada budidaya rumput laut melalui dukungan seperti bibit dan tali.
Identitas nelayan	KTP dan Kartu Nelayan	Nelayan umumnya memiliki KTP dan sebagian pernah memiliki Kartu Nelayan. Kartu Nelayan yang dimiliki masyarakat umumnya sudah tidak berlaku sehingga tidak lagi dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebelumnya.

Administrasi kapal	Pas Kecil	Sebagian armada telah memiliki Pas Kecil sebagai dokumen legalitas kapal. Pengukuran kapal untuk mendukung penerbitan Pas Kecil telah dilakukan sejak tahun 2021.
Kelembagaan masyarakat	Kelompok nelayan, kelompok pembudidaya, dan POKMASWAS Karang Merah	Kelompok nelayan dan pembudidaya telah berkembang di masyarakat dan menjadi salah satu akses terhadap dukungan program. POKMASWAS Karang Merah tercatat sebagai kelembagaan pengawasan masyarakat di Desa Pulau Harapan.

Sumber: Hasil Riset Aksi Partisipatif Masyarakat untuk Diagnosa Perikanan, YKL Indonesia, 2026; Survei Rantai Pasok Perikanan, YKL Indonesia, 2026; Data POKMASWAS Kabupaten Sinjai, Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, 2025.

Armada dan Operasional Penangkapan

Armada merupakan salah satu faktor yang menentukan pola operasi, jangkauan wilayah penangkapan, waktu tempuh, biaya operasional, dan komoditas yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang. Armada yang digunakan umumnya merupakan perahu skala kecil yang dioperasikan secara individual maupun bersama beberapa orang sesuai jenis penangkapan dan wilayah yang dituju.

Perkembangan armada telah berlangsung cukup lama. Sebelum tahun 1980, nelayan masih menggunakan perahu layar, kemudian penggunaan mesin katinting mulai berkembang pada dekade 1980-an. Perubahan tersebut meningkatkan mobilitas nelayan karena perjalanan menjadi lebih cepat dan wilayah penangkapan yang lebih jauh dapat dijangkau. Perkembangan mesin penggerak selanjutnya menjadi bagian penting dari perubahan pola operasi perikanan masyarakat (YKL Indonesia, 2026a).

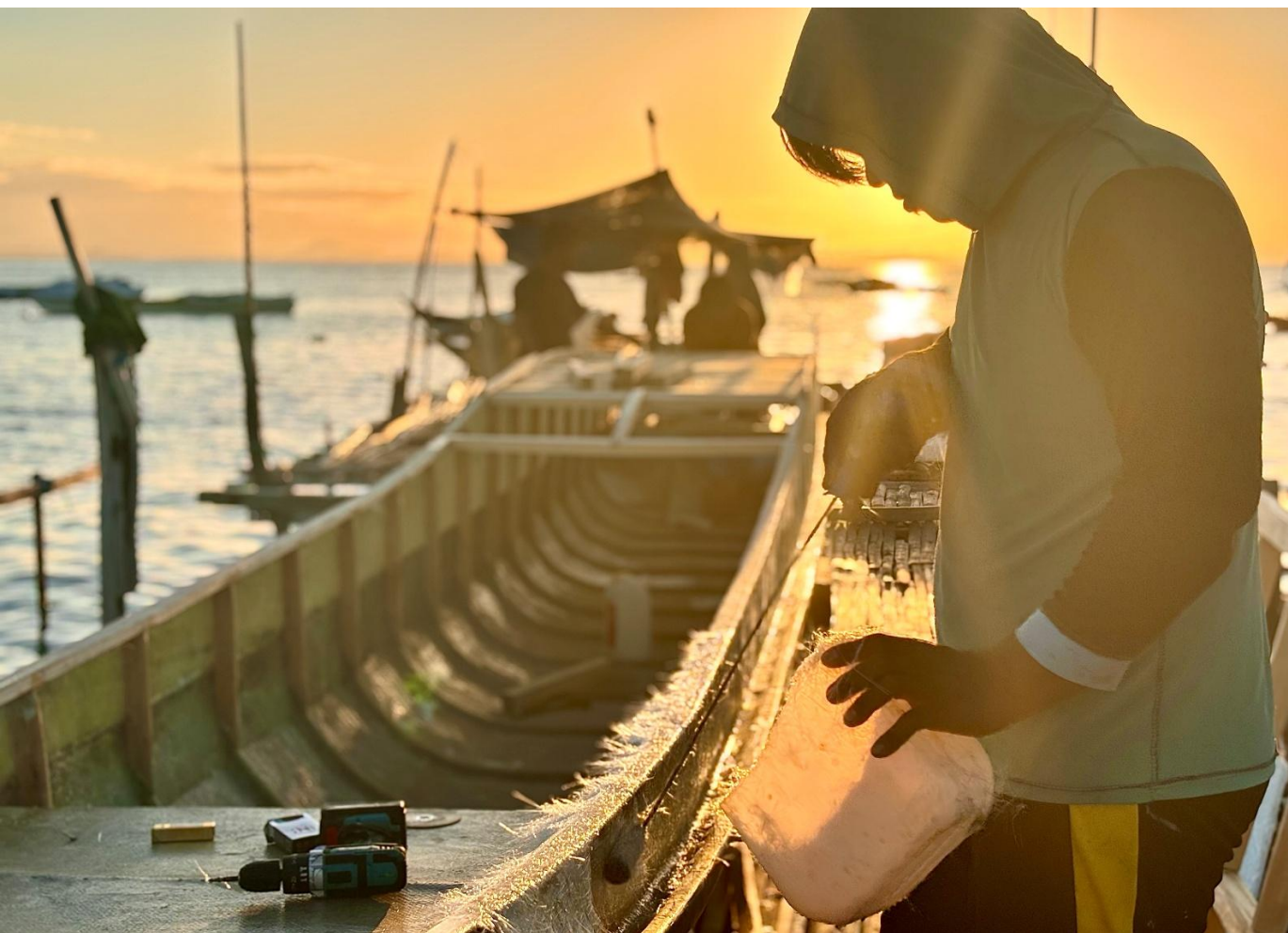
Jenis Armada dan Mesin Penggerak

Berdasarkan hasil diagnosa, nelayan menggunakan beberapa jenis armada yang secara lokal dikenal antara lain sebagai lepa-lepa, joloro, dan kapal/perahu berukuran lebih besar. Perbedaan ukuran dan karakter armada berkaitan dengan jenis mesin, jumlah awak, alat tangkap, durasi operasi, serta jarak wilayah penangkapan.

Lepa-lepa merupakan perahu berukuran relatif kecil yang umumnya digunakan untuk aktivitas penangkapan dengan jangkauan yang lebih dekat dan dapat dioperasikan oleh satu orang. Armada ini sesuai untuk aktivitas perikanan skala kecil yang membutuhkan mobilitas di sekitar pulau dan *taka'*, termasuk penangkapan gurita dan komoditas lainnya.

Joloro memiliki kapasitas yang lebih besar dan dapat digunakan untuk menjangkau wilayah penangkapan yang lebih luas. Penggunaan armada disesuaikan dengan jenis operasi dan komoditas yang menjadi target. Sementara itu, armada yang lebih besar digunakan terutama ketika nelayan melakukan perjalanan ke wilayah yang lebih jauh atau membutuhkan waktu operasi yang lebih lama.

Mesin penggerak yang digunakan bervariasi sesuai ukuran dan kebutuhan armada. Mesin katinting menjadi salah satu mesin yang umum digunakan pada perahu skala kecil, sementara armada tertentu menggunakan mesin dengan kapasitas lebih besar untuk mendukung perjalanan yang lebih jauh.



Gambar 6. Perawatan perahu nelayan sebelum kegiatan penangkapan

Tabel 5. Jenis-Jenis Armada Penangkapan

Nama Armada (bahasa lokal/ indonesia)	Gambar/ Photo/ilustrasi armada tangkap	Ukuran (GT) dan dimensi kapal	Estimasi Harga	Jumlah kru
Sampan		300 x 50 cm	2,5 Juta	1 orang
Pete-pete		600 x 100 cm	15 Juta	1 orang
Jolloro		10-15m x 1,5-2m	50-100 Juta	2-3 orang 13-14 orang (pakai sampan)

Sumber: Hasil Riset Aksi Partisipatif Masyarakat untuk Diagnosa Perikanan, YKL Indonesia, 2026.

Pola Operasional Penangkapan

Sebagian besar aktivitas penangkapan dilakukan dengan pola satu hari satu perjalanan (*one day one trip*). Nelayan berangkat pada pagi atau dini hari, melakukan aktivitas penangkapan di wilayah yang dapat dijangkau, kemudian kembali ke pulau pada hari yang sama. Pola ini terutama digunakan pada *taka'* yang relatif dekat dan memungkinkan perjalanan pulang-pergi tanpa bermalam.

Operasi harian memberikan keuntungan berupa kebutuhan logistik yang lebih sederhana dan biaya perjalanan yang relatif lebih terkendali. Namun, pilihan wilayah tetap dipengaruhi oleh perkiraan hasil tangkapan, kondisi cuaca dan perairan, harga bahan bakar, serta waktu yang diperlukan untuk mencapai lokasi.

Untuk wilayah yang lebih jauh, nelayan dapat melakukan operasi dengan sistem sawakung, yaitu perjalanan penangkapan dengan bermalam selama beberapa hari. Pola tersebut memungkinkan nelayan memanfaatkan waktu lebih lama di wilayah penangkapan dan mengurangi frekuensi perjalanan pulang-pergi.

Taka' Limpoge, yang berjarak sekitar 20 mil ke arah timur, merupakan salah satu contoh wilayah yang membutuhkan perjalanan lebih panjang. Nelayan dapat melakukan operasi sekitar tiga hari ketika menangkap di wilayah tersebut. Dalam perjalanan seperti ini, penangkapan umumnya bersifat multi-komoditas dengan target antara lain gurita, kakap, kerapu, udang, dan tenggiri (YKL Indonesia, 2026a).

Perbedaan pola operasi tersebut menunjukkan bahwa jarak wilayah penangkapan berkaitan langsung dengan kebutuhan operasional. Semakin jauh wilayah yang dituju, semakin besar kebutuhan bahan bakar, perbekalan, waktu, dan kesiapan armada. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan perjalanan jauh juga mempertimbangkan peluang memperoleh hasil tangkapan yang dianggap sebanding dengan biaya dan waktu yang dikeluarkan.

Administrasi dan Legalitas Armada

Administrasi kapal menjadi bagian dari perkembangan perikanan masyarakat. Pada tahun 2021, dilakukan pengukuran kapal untuk mendukung penerbitan Pas Kecil. Sebagian armada telah memiliki dokumen tersebut sebagai bagian dari administrasi dan legalitas kapal.

Kelengkapan administrasi penting tidak hanya dalam konteks legalitas, tetapi juga berkaitan dengan akses nelayan terhadap pelayanan, program pemerintah, keselamatan pelayaran, dan pendataan armada perikanan. Kondisi kepemilikan dokumen yang belum seragam menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penguatan administrasi nelayan dan armada.

Alat dan Teknik Penangkapan Gurita

Penangkapan gurita di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang dilakukan menggunakan alat tangkap sederhana yang dioperasikan oleh nelayan skala kecil. Pemilihan alat dan lokasi penangkapan berkaitan dengan kondisi wilayah, karakter habitat, musim, kondisi perairan, serta pengetahuan dan pengalaman nelayan dalam mengenali keberadaan gurita.

Perikanan gurita merupakan aktivitas yang relatif lebih baru dibandingkan beberapa jenis perikanan lainnya di kedua pulau. Berdasarkan penelusuran sejarah perikanan secara partisipatif, nelayan mulai menangkap gurita sekitar tahun 2015. Perkembangan pengetahuan penangkapan kemudian diperkuat sekitar tahun 2020, ketika nelayan setempat mempelajari alat dan model penangkapan gurita dari nelayan Pulau Langkai. Proses tersebut menunjukkan adanya pertukaran pengetahuan antarnelayan yang turut memengaruhi perkembangan perikanan gurita di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang (YKL Indonesia, 2026a).

Alat Tangkap Gurita

Berdasarkan hasil diagnosa perikanan, alat tangkap gurita yang digunakan masyarakat dikenal antara lain sebagai pocong-pocong/care-care dan bole-bole/pancing gurita. Alat-alat tersebut relatif sederhana dan umumnya dibuat sendiri oleh nelayan menggunakan bahan yang tersedia atau mudah diperoleh.

Pocong-pocong/care-care terbuat dari kayu berbentuk bulat yang diberi timah sebagai pemberat dan dipasangkan potongan kain pada bagian bawah yang menyerupai tentakel gurita. Alat ini digunakan untuk menarik perhatian gurita agar merespons alat yang dioperasikan nelayan. Pocong-pocong/care-care dibuat sendiri oleh nelayan dengan estimasi biaya pembuatan sekitar Rp150.000–Rp200.000.



Gambar 7. Pocong-Pocong alat tangkap gurita berbahan utama kain

Bole-bole merupakan bentuk pancing gurita yang menggunakan bahan berbentuk menyerupai biota yang menjadi mangsa gurita, seperti kerang, kepiting, atau

lobster. Berdasarkan pencatatan lapangan, alat ini dapat dibuat menggunakan plastik bekas yang dibentuk menyerupai biota tersebut, diberi timah sebagai pemberat, serta dilengkapi besi dan mata kail. Bole-bole juga dibuat sendiri oleh nelayan dengan estimasi biaya sekitar Rp150.000–Rp200.000.



Gambar 8. Bole-bole alat tangkap gurita

Kesederhanaan alat tangkap memungkinkan penangkapan gurita dilakukan menggunakan armada skala kecil. Namun, keberhasilan penangkapan tidak hanya bergantung pada alat yang digunakan, tetapi juga pada keterampilan dan pengalaman nelayan dalam mengenali habitat, menentukan lokasi penangkapan, membaca kondisi perairan, dan mengoperasikan alat.

Teknik dan Pengetahuan Penangkapan

Penangkapan gurita dilakukan terutama pada taka' atau hamparan terumbu karang yang dikenali nelayan sebagai habitat dan wilayah keberadaan gurita. Pengetahuan mengenai lokasi potensial diperoleh dari pengalaman melaut dan berkembang melalui pertukaran informasi antarnelayan.

Sejumlah *taka'* yang telah diidentifikasi dalam pemetaan partisipatif menjadi wilayah penangkapan gurita bersama komoditas lainnya. Taka' Pasi' Loangnge merupakan salah satu wilayah tangkap utama karena memiliki hamparan terumbu karang yang luas dan dianggap memiliki sumber daya perikanan yang relatif

melimpah. Selain itu, penangkapan gurita juga dilakukan pada sejumlah *taka'* lainnya, seperti Taka' Marempu, Talinting, Bunginperre, Labuleng, Latembang, Labrange, Bungentellue, hingga Taka' Limpoge yang berada lebih jauh dari pulau.

Pemilihan wilayah penangkapan dipengaruhi oleh pengalaman hasil tangkapan sebelumnya, kondisi habitat dan perairan, jarak tempuh, musim, serta kondisi cuaca. Pengetahuan mengenai karakter masing-masing *taka'* menjadi bagian penting dalam menentukan lokasi yang akan dituju oleh nelayan.

Dalam praktiknya, penangkapan gurita juga tidak selalu berdiri sebagai aktivitas yang sepenuhnya terpisah dari perikanan lainnya. Sebagian besar nelayan menjalankan pola multi-komoditas (*multiple target*), sehingga pilihan komoditas yang ditangkap dapat berubah mengikuti musim, ketersediaan sumber daya, kondisi perairan, harga, dan peluang hasil tangkapan.

Ketika gurita relatif tersedia dan memberikan peluang ekonomi yang baik, nelayan dapat lebih memprioritaskan komoditas tersebut. Sebaliknya, nelayan dapat beralih atau mengombinasikan aktivitas penangkapan dengan komoditas lain seperti ikan dasar dan tenggiri maupun melakukan budidaya rumput laut sesuai kondisi musim dan peluang penghidupan.

Selektivitas dan Praktik Penangkapan

Pocong-pocong/care-care dan bole-bole merupakan alat yang digunakan secara khusus untuk menargetkan gurita. Karakter alat tersebut memungkinkan nelayan mengarahkan aktivitas penangkapan pada komoditas target dibandingkan penggunaan alat tangkap yang menangkap berbagai jenis organisme secara bersamaan.

Meskipun alat tangkap yang digunakan relatif sederhana dan bersifat spesifik terhadap target, keberlanjutan perikanan gurita tidak hanya ditentukan oleh jenis alat tangkap. Intensitas dan upaya penangkapan, ukuran gurita yang tertangkap, musim penangkapan, kondisi habitat, serta tingkat pemanfaatan wilayah penangkapan merupakan faktor yang juga perlu diperhatikan dalam memahami perkembangan sumber daya gurita.

Pada saat diagnosa dilakukan, data kuantitatif yang tercatat secara konsisten mengenai hasil tangkapan per unit upaya, ukuran dan berat individu gurita, frekuensi penangkapan, serta perubahan hasil tangkapan menurut lokasi dan waktu masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem monitoring perikanan sebagai bagian dari implementasi program.

Monitoring perikanan selanjutnya perlu menghasilkan data yang dapat dibandingkan secara berkala, terutama mengenai jumlah dan berat hasil

tangkapan, ukuran individu, lokasi penangkapan, waktu penangkapan, upaya penangkapan, dan nilai hasil tangkapan. Data tersebut dapat digunakan untuk membaca perubahan kondisi perikanan dari waktu ke waktu sekaligus menjadi dasar bagi masyarakat dan para pihak dalam mendiskusikan pilihan pengelolaan perikanan gurita berbasis data.

Tabel 6. Jenis dan Karakteristik Alat Tangkap Nelayan

Alat Tangkap	Komoditas Utama	Deskripsi
Pocong-pocong/Care-care	Gurita	Terbuat dari kayu berbentuk bulat yang diberi timah sebagai pemberat dan potongan kain menyerupai tentakel gurita pada bagian bawah. Dibuat sendiri oleh nelayan dengan estimasi biaya sekitar Rp150.000–Rp200.000.
Bole-bole/Pancing gurita	Gurita	Dibuat dari plastik bekas yang dibentuk menyerupai kerang, kepiting, atau lobster, dilengkapi timah sebagai pemberat serta besi dan mata kail. Dibuat sendiri oleh nelayan dengan estimasi biaya sekitar Rp150.000–Rp200.000.
Pancing (handline)	Ikan demersal	Terdiri atas tali utama, satu atau beberapa mata pancing, pemberat, dan umpan alami. Digunakan untuk menjangkau ikan pada lapisan perairan atau habitat dasar.
Batu lepas (sinta')	Ikan demersal	Alat bantu berupa batu sebagai pemberat sementara untuk membawa rangkaian pancing menuju dasar perairan sebelum batu dilepaskan.
Bulu-bulu	Tenggiri dan ikan lainnya	Menggunakan tali/benang dan umpan tiruan menyerupai mangsa untuk menarik perhatian ikan. Umumnya dioperasikan dengan cara ditarik mengikuti pergerakan perahu.
Panambe	Mairo/teri	Jaring bermata relatif kecil yang digunakan untuk menangkap gerombolan ikan mairo/teri dan dioperasikan menyesuaikan keberadaan gerombolan ikan.

Sumber: Hasil Riset Aksi Partisipatif Masyarakat untuk Diagnosa Perikanan, YKL Indonesia, 2026.

Biaya Operasional dan Pembagian Hasil Tangkapan

Biaya operasional penangkapan nelayan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang bervariasi berdasarkan jenis armada, jarak dan pola operasi penangkapan. Secara umum, nelayan menggunakan tiga jenis armada, yaitu sampan, pete-pete, dan jolloro, yang memiliki kebutuhan operasional berbeda (YKL Indonesia, 2026a).

Nelayan yang menggunakan sampan umumnya tidak mengeluarkan biaya bahan bakar karena armada tidak menggunakan mesin. Biaya operasional terutama digunakan untuk kebutuhan ransum dan rokok, dengan pengeluaran sekitar Rp50.000 untuk satu kali operasi penangkapan.

Pada armada pete-pete, kebutuhan bahan bakar berkisar 2–5 liter bensin untuk satu kali operasi. Dengan harga bensin di tingkat lokal sekitar Rp15.000 per liter, biaya bahan bakar berkisar Rp30.000–Rp75.000. Selain bahan bakar, nelayan mengeluarkan sekitar Rp50.000 untuk kebutuhan ransum dan rokok. Dengan demikian, total kebutuhan operasional pete-pete berkisar sekitar Rp80.000–Rp125.000 per operasi, bergantung pada penggunaan bahan bakar dan kebutuhan nelayan.



Gambar 9. Pengepul membayar hasil penjualan gurita nelayan

Armada jolloro digunakan untuk operasi dengan kapasitas dan pola penangkapan yang berbeda. Satu jolloro umumnya membawa 2–3 orang, tetapi pada operasi

tertentu dapat membawa hingga sekitar 13 orang nelayan beserta sampan masing-masing. Jolloro dalam pola ini berfungsi sebagai armada pengangkut nelayan dan sampan menuju wilayah penangkapan yang lebih jauh, kemudian masing-masing nelayan melakukan aktivitas penangkapan menggunakan sampan yang dibawa.

Kebutuhan bahan bakar jolloro menggunakan solar dengan biaya sekitar Rp100.000–Rp200.000 per operasi, dengan harga solar di tingkat lokal sekitar Rp10.000 per liter. Selain itu, setiap nelayan yang mengikuti operasi membawa kebutuhan ransum dan rokok masing-masing dengan nilai sekitar Rp50.000 (YKL Indonesia, 2026a).

Sumber Modal Operasional dan Sistem Pembagian

Modal operasional nelayan berasal dari dua pola utama, yaitu modal pribadi dan dukungan dari punggawa atau pengepul pulau. Nelayan yang tidak memiliki keterikatan dengan punggawa atau pengepul umumnya menggunakan modal sendiri untuk memenuhi kebutuhan melaut.

Sebaliknya, nelayan yang memiliki hubungan dengan punggawa atau pengepul dapat memperoleh biaya operasional sebelum melakukan penangkapan. Biaya tersebut kemudian diperhitungkan atau dipotong dari nilai penjualan ketika nelayan membawa hasil tangkapannya kepada pengepul. Pola ini menunjukkan bahwa hubungan nelayan dengan pengepul tidak hanya berupa hubungan jual-beli, tetapi juga mencakup fungsi pembiayaan aktivitas penangkapan (YKL Indonesia, 2026a).

Pada penggunaan jolloro, terdapat mekanisme pembagian yang berbeda. Berdasarkan kesepakatan yang berlaku secara umum di tingkat masyarakat, setiap nelayan yang mengikuti operasi menggunakan jolloro memberikan 20% dari pendapatan hasil tangkapannya kepada pemilik jolloro. Mekanisme tersebut merupakan kompensasi atas penggunaan armada dalam mendukung perjalanan menuju dan dari wilayah penangkapan.

Sistem pembiayaan dan pembagian tersebut menjadi bagian penting dari struktur ekonomi perikanan di tingkat lokal. Akses terhadap modal dari punggawa atau pengepul memungkinkan nelayan tetap melakukan operasi ketika tidak memiliki modal tunai yang cukup, sementara penggunaan jolloro memungkinkan nelayan menjangkau wilayah yang lebih jauh. Pada saat yang sama, kedua mekanisme tersebut memengaruhi bagian pendapatan bersih yang diterima nelayan setelah biaya operasional, pengembalian modal, atau pembagian hasil diperhitungkan.

Tabel 7. Biaya Operasional Penangkapan Berdasarkan Jenis Armada

Aspek/ Karakteristik	Sampan	Pete-pete	Jolloro
Karakter penggunaan	Penangkapan skala kecil, terutama menggunakan tenaga manual	Armada bermesin untuk operasi penangkapan	Armada yang dapat mengangkut nelayan dan sampan menuju wilayah penangkapan
Jumlah nelayan	Umumnya individual	Disesuaikan dengan operasi penangkapan	Umumnya 2–3 orang dan pada operasi tertentu dapat mencapai ± 13 nelayan dengan membawa sampan masing-masing
Bahan bakar	Tidak menggunakan BBM	Bensin	Solar
Kebutuhan BBM	—	$\pm 2\text{--}5$ liter/operasi	Menyesuaikan jarak dan operasi
Harga BBM lokal	—	$\pm \text{Rp}15.000/\text{liter}$	$\pm \text{Rp}10.000/\text{liter}$
Biaya BBM	—	$\pm \text{Rp}30.000\text{--}\text{Rp}75.000/\text{operasi}$	$\pm \text{Rp}100.000\text{--}\text{Rp}200.000/\text{operasi}$
Ransum dan rokok	$\pm \text{Rp}50.000/\text{nelayan}$	$\pm \text{Rp}50.000/\text{nelayan}$	$\pm \text{Rp}50.000/\text{nelayan}$, dibawa masing-masing
Perkiraan kebutuhan operasional	$\pm \text{Rp}50.000/\text{operasi}$	$\pm \text{Rp}80.000\text{--}\text{Rp}125.000/\text{operasi}$	Biaya BBM $\pm \text{Rp}100.000\text{--}\text{Rp}200.000$ ditambah kebutuhan ransum dan rokok masing-masing nelayan
Sumber modal	Modal pribadi dan/atau punggawa/ pengepul	Modal pribadi dan/atau punggawa/ pengepul	Sesuai pola pembiayaan operasi
Mekanisme pengembalian/ pembagian	Modal dari punggawa/ pengepul diperhitungkan dari hasil penjualan	Modal dari punggawa/ pengepul diperhitungkan dari hasil penjualan	Setiap nelayan memberikan 20% dari pendapatan hasil tangkapannya kepada pemilik jolloro berdasarkan kesepakatan yang berlaku

Sumber: Hasil Riset Aksi Partisipatif Masyarakat untuk Diagnosa Perikanan, YKL Indonesia, 2026.

Penanganan Hasil Tangkapan dan Penjualan Gurita

Penanganan hasil tangkapan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas dan nilai ekonomi gurita sebelum dipasarkan. Setelah ditangkap, gurita dibawa oleh nelayan dari wilayah penangkapan menuju pulau dan selanjutnya dijual kepada pengepul lokal. Pola penanganan dan penjualan dipengaruhi oleh durasi operasi penangkapan, jarak wilayah tangkap, ketersediaan sarana penyimpanan, serta hubungan perdagangan antara nelayan dan pengepul.

Penanganan Hasil Tangkapan

Penanganan gurita setelah ditangkap masih dilakukan secara sederhana. Selama kegiatan penangkapan, nelayan umumnya menempatkan gurita yang tertangkap ke dalam wadah atau boks dalam kondisi kering tanpa penambahan es. Gurita disimpan dalam kondisi tersebut selama proses penangkapan berlangsung hingga nelayan selesai melakukan aktivitas penangkapan dan kembali ke darat.

Setelah tiba di darat, terdapat perbedaan dalam penanganan hasil tangkapan. Sebagian nelayan menambahkan air laut ke dalam wadah yang berisi gurita, sementara sebagian lainnya langsung menyerahkan atau membawa hasil tangkapan untuk dijual kepada pengepul. Belum terdapat praktik penanganan pascatangkap yang seragam di tingkat nelayan, termasuk dalam penggunaan es atau penerapan rantai dingin sejak gurita ditangkap hingga tiba di tingkat pengepul.



Gambar 10. Penanganan gurita di Tingkat pengepul menggunakan es

Dalam proses penjualan, istri atau perempuan dalam rumah tangga nelayan memiliki peran penting dalam membawa dan menjual hasil tangkapan gurita kepada pengepul di tingkat pulau. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam perikanan gurita tidak hanya ditemukan pada aktivitas penangkapan di beberapa kasus, tetapi juga pada tahapan pascatangkap dan pemasaran hasil di tingkat lokal.



Gambar 11. Perempuan membawa gurita dalam wadah untuk dijual ke pengepul

Praktik penanganan tersebut menjadi bagian penting dari kondisi awal perikanan gurita. Penanganan tanpa rantai dingin selama proses penangkapan berpotensi memengaruhi mutu hasil, terutama apabila waktu operasi dan perjalanan berlangsung lebih lama. Karena itu, aspek penanganan pascatangkap, waktu dari penangkapan hingga penjualan, serta akses terhadap sarana penyimpanan menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan nilai hasil perikanan.

Penjualan Gurita di Tingkat Pulau

Hasil tangkapan gurita umumnya dijual kepada pengepul di tingkat pulau. Pengepul menjadi penghubung utama antara nelayan dengan rantai perdagangan berikutnya, sekaligus menjadi tempat pengumpulan hasil tangkapan sebelum dipasarkan keluar pulau.

Penjualan dilakukan berdasarkan berat hasil tangkapan. Nilai yang diterima nelayan dipengaruhi oleh berat atau kategori ukuran gurita dan harga yang berlaku pada saat transaksi. Hubungan penjualan juga berkaitan dengan pola permodalan yang telah berkembang di tingkat lokal. Sebagian nelayan menggunakan modal sendiri, sementara sebagian lainnya memperoleh biaya operasional dari punggawa atau pengepul yang kemudian diperhitungkan ketika hasil tangkapan dijual.

Pengepul memiliki fungsi yang cukup penting dalam sistem perikanan lokal, tidak hanya sebagai pembeli dan pengumpul hasil tangkapan, tetapi pada kondisi tertentu juga sebagai penyedia akses modal operasional bagi nelayan.

Ukuran, Kategori, dan Harga Gurita

Ukuran gurita merupakan salah satu faktor utama yang menentukan nilai jual hasil tangkapan. Dalam perdagangan, gurita dikelompokkan berdasarkan grade yang mengacu terutama pada berat individu, sehingga gurita berukuran lebih besar umumnya memiliki harga jual yang lebih tinggi.

Sistem grading yang dikenal dalam perdagangan gurita membagi hasil tangkapan ke dalam beberapa kategori, yaitu Grade A, B, C, D, dan Lokal. Mengacu pada klasifikasi yang digunakan dalam profil perikanan gurita YKL Indonesia sebelumnya, Grade A merupakan gurita berukuran 2 kg ke atas, Grade B 1–<2 kg, Grade C 0,5–<1 kg, Grade D 0,3–<0,5 kg, sedangkan kategori Lokal merupakan gurita berukuran <0,3 kg dan/atau memiliki kondisi fisik tertentu, seperti kehilangan beberapa tentakel. Klasifikasi tersebut dapat berbeda atau mengalami penyesuaian mengikuti standar dan spesifikasi perusahaan atau pembeli yang menjadi tujuan pemasaran.

Dalam konteks Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang, hasil pengumpulan data lapangan mencatat harga gurita di tingkat nelayan untuk tiga kategori utama, yaitu Grade A sekitar Rp105.000–Rp130.000/kg, Grade B sekitar Rp90.000–Rp95.000/kg, dan Grade C sekitar Rp70.000–Rp75.000/kg. Data harga spesifik untuk Grade D dan kategori Lokal belum tercatat dalam hasil pengumpulan data sehingga tidak dicantumkan sebagai harga baseline. Informasi dari sosialisasi multipihak di Kabupaten Sinjai juga mengonfirmasi penggunaan kategori Grade A untuk gurita berukuran 2 kg ke atas, dengan harga yang disebut pada saat kegiatan sekitar Rp105.000/kg.

Tabel 8. Klasifikasi Ukuran dan Harga Gurita

Kategori	Ukuran/Berat	Kisaran Harga di Tingkat Nelayan
Grade A	≥ 2 kg	Rp105.000–Rp130.000/kg
Grade B	1–<2 kg	Rp90.000–Rp95.000/kg
Grade C	0,5–<1 kg	Rp70.000–Rp75.000/kg
Grade D	0,3–<0,5 kg	Rp60.000–Rp65.000/kg
Lokal	<0,3 kg dan/atau kondisi fisik tertentu, seperti beberapa tentakel hilang	Di bawah Rp50.000/kg tergantung kondisi

Catatan: Klasifikasi ukuran mengacu pada informasi pengepul di Tingkat kabupaten dan dapat berbeda atau disesuaikan menurut standar perusahaan atau pembeli. Kisaran harga merupakan hasil pengumpulan data lapangan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang pada periode 2025–2026 dan bersifat dinamis mengikuti kondisi pasar.

Sumber: Hasil Riset Aksi Partisipatif Masyarakat dan Survei Rantai Pasok Perikanan, YKL Indonesia, 2026; Sosialisasi Multipihak Tingkat Kabupaten Sinjai, YKL Indonesia, 2026.

Harga gurita dapat mengalami perubahan mengikuti musim, ketersediaan pasokan, ukuran dan kualitas hasil tangkapan, permintaan pasar, serta perusahaan atau pembeli yang menjadi tujuan perdagangan. Ketika pasokan meningkat pada musim gurita, peningkatan jumlah produk yang tersedia dapat memengaruhi harga, sedangkan ketika pasokan berkurang harga dapat bergerak lebih tinggi sesuai kondisi permintaan.



Gambar 12. Penimbangan gurita dan komoditas perikanan lainnya di Tingkat pengepul pulau

Selain fluktuasi pasar, akses terhadap informasi harga juga menjadi bagian penting dalam pembentukan harga di tingkat lokal. Informasi yang diperoleh dalam kegiatan sosialisasi di Kabupaten Sinjai menunjukkan adanya kondisi ketika perubahan harga pada pasar yang lebih tinggi tidak selalu diterima secara bersamaan di tingkat lokal. Kenaikan harga di Makassar disebut dapat terlambat diteruskan ke Sinjai, sedangkan informasi penurunan harga dapat diterima lebih cepat. Temuan ini menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi harga bagi nelayan dan pelaku usaha di tingkat pulau, meskipun pola pembentukan dan transmisi harga tersebut masih perlu dianalisis lebih lanjut dalam pembahasan rantai pasok.

Sistem pembayaran kepada nelayan umumnya dilakukan secara tunai pada saat hasil tangkapan dijual. Bagi nelayan yang sebelumnya memperoleh biaya operasional dari punggawa atau pengepul, biaya tersebut dapat diperhitungkan atau dipotong dari nilai hasil penjualan sesuai hubungan dan kesepakatan yang berlaku. Data rantai pasok juga menunjukkan bahwa transaksi pada tingkat pengumpul umumnya dilakukan secara tunai, dengan margin perdagangan yang berbeda antaraktor dan tahapan rantai pemasaran.

2.3. Rantai Pasok Perikanan Gurita

Rantai pasok perikanan gurita dari Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang melibatkan sejumlah pelaku mulai dari nelayan, pengepul di tingkat pulau, pengepul di daratan Kabupaten Sinjai, hingga jaringan pedagang, supplier, atau perusahaan pada tingkat berikutnya. Posisi geografis kepulauan menyebabkan proses pengumpulan dan konsolidasi hasil tangkapan menjadi bagian penting sebelum komoditas dapat didistribusikan menuju pasar yang lebih luas.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa rantai pasok tidak selalu berlangsung secara linear. Hasil tangkapan dapat berpindah antarpelaku pada tingkat yang sama sebelum diteruskan ke tingkat berikutnya, terutama untuk mencapai volume pengiriman yang secara ekonomi dinilai cukup untuk menutupi biaya distribusi.

Alur Rantai Pasok

Pada tingkat pertama, nelayan menangkap gurita dan membawa hasil tangkapan kembali ke pulau. Hasil tangkapan umumnya dijual kepada pengepul di Pulau Kambuno atau Pulau Liang-Liang. Pilihan menjual di tingkat pulau dipengaruhi oleh kemudahan akses, kedekatan lokasi, hubungan usaha yang telah terbentuk, serta efisiensi biaya karena nelayan tidak perlu membawa sendiri hasil tangkapannya ke daratan Kabupaten Sinjai.

Namun, hasil yang diterima oleh pengepul pulau tidak selalu langsung dikirim ke pengepul di Kabupaten Sinjai. Sebelum melakukan pengiriman, pengepul memperhitungkan jumlah komoditas yang telah terkumpul terhadap biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk membawa dan menjual produk ke daratan. Pengiriman dilakukan apabila volume dan nilai komoditas dinilai cukup untuk menutupi biaya operasional dan masih memberikan keuntungan yang layak.

Apabila jumlah komoditas yang terkumpul belum ekonomis untuk dikirim sendiri, terdapat dua pola yang dilakukan. Pertama, pengepul dapat menjual komoditas kepada sesama pengepul di tingkat pulau yang memiliki kapasitas atau volume pengumpulan lebih besar. Kedua, pengepul dapat menggunakan mekanisme yang dikenal sebagai "titip jual", yaitu menitipkan komoditas kepada pengepul lain yang memiliki jumlah barang lebih banyak untuk dikirim bersama ke Kabupaten Sinjai.

Mekanisme tersebut menyebabkan terjadinya konsolidasi hasil tangkapan antarsesama pengepul di tingkat pulau. Dengan demikian, pengepul pulau tidak seluruhnya memiliki posisi dan fungsi yang sama. Sebagian mengumpulkan hasil dalam volume relatif kecil, sedangkan pengepul yang memiliki volume lebih besar dapat berfungsi sebagai titik konsolidasi sebelum produk dikirim ke daratan.

Pada kondisi tertentu, terutama ketika hasil tangkapan cukup banyak dan secara ekonomi memungkinkan, sebagian nelayan juga dapat memilih menjual langsung kepada pengepul di Kabupaten Sinjai karena terdapat peluang memperoleh harga yang lebih tinggi. Pola ini menunjukkan bahwa keputusan pemasaran tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga oleh volume hasil, biaya transportasi, hubungan dengan pengepul, dan keuntungan bersih yang diperkirakan akan diperoleh.

Dari Kabupaten Sinjai, produk selanjutnya didistribusikan melalui jaringan perdagangan yang berbeda sesuai komoditas dan pembeli tujuan. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian pengepul Sinjai memiliki hubungan perdagangan dengan pelaku di Makassar dan beberapa calon perusahaan atau supplier yang menjadi bagian dari penelusuran pasar. Instrumen survei memang dirancang untuk menelusuri rantai hingga UPI, eksportir, trader, supplier, serta pasar akhir.

Secara umum, alur rantai pasok dapat digambarkan sebagai berikut:

Aktor dan Fungsi dalam Rantai Pasok

Setiap aktor menjalankan fungsi yang berbeda dalam mengalirkan komoditas dari wilayah penangkapan menuju pasar.

Tabel 9. Daftar Aktor dan Fungsi dalam Rantai Pasok Gurita

Aktor	Fungsi Utama	Karakteristik/Peran
Nelayan	Penangkapan/produksi	Menangkap gurita dan komoditas lainnya serta menjadi sumber awal produk dalam rantai pasok.
Pengepul pulau	Pembelian dan pengumpulan	Membeli hasil nelayan, mengumpulkan komoditas, dan menyediakan akses pemasaran di tingkat pulau. Pada beberapa kasus juga memberikan modal operasional kepada nelayan.
Pengepul pulau/konsolidator	Konsolidasi dan pengiriman	Menggabungkan hasil sendiri dengan komoditas yang dibeli atau dititipkan pengepul lain hingga mencapai volume yang dinilai ekonomis untuk dikirim ke daratan.
Pengepul Kabupaten Sinjai	Pengumpulan skala lebih besar dan distribusi	Menerima produk dari pulau atau langsung dari nelayan dan mendistribusikannya kepada jaringan perdagangan pada tingkat berikutnya.

Pedagang/supplier/pembeli berikutnya	Distribusi dan pemasaran lanjutan	Menyalurkan produk sesuai komoditas, volume, mutu, dan jaringan pasar menuju perusahaan pengolahan atau pasar lainnya.
UPI/perusahaan/eksportir	Pengolahan dan pemasaran	Menetapkan kebutuhan pasokan dan persyaratan produk sesuai spesifikasi pasar serta mengolah atau mendistribusikan produk menuju pasar berikutnya.

Sumber: Hasil Riset Aksi Partisipatif Masyarakat dan Survei Rantai Pasok Perikanan, YKL Indonesia, 2026.

Kerangka survei rantai pasok juga menempatkan analisis gurita berdasarkan fungsi aktor mulai dari nelayan sebagai penangkap, pengepul sebagai pengumpul, supplier sebagai pelaku sortasi/distribusi, hingga UPI/eksportir sebagai pengolah dan pemasar.

Pengepul di Tingkat Pulau

Pengepul pulau memiliki posisi penting karena menjadi titik temu antara produksi perikanan skala kecil yang tersebar dengan kebutuhan distribusi dalam volume yang lebih besar. Terdapat sejumlah pengepul di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang dengan skala usaha dan kapasitas pengumpulan yang berbeda.

Data survei pada beberapa pengepul yang memiliki informasi kapasitas menunjukkan bahwa kapasitas pengumpulan atau pengiriman di tingkat pulau umumnya kurang dari 1 ton, sedangkan beberapa pengepul di tingkat Kabupaten Sinjai memiliki kapasitas sekitar 1–2 ton. Data tersebut tidak menggambarkan seluruh pengepul, tetapi menunjukkan adanya perbedaan skala usaha antara tingkat pulau dan daratan.

Perbedaan kapasitas tersebut menjadi salah satu faktor yang membentuk mekanisme konsolidasi. Pengepul dengan volume kecil tidak selalu mengirim sendiri hasil yang dikumpulkan karena biaya transportasi dapat menjadi terlalu besar dibandingkan nilai komoditas yang akan dijual.

Dalam kondisi tersebut, komoditas dapat dijual atau dititipkan kepada pengepul lain di pulau yang memiliki volume lebih besar. Melalui mekanisme *titip jual*, beberapa hasil pengumpulan dapat digabungkan dalam satu pengiriman sehingga biaya distribusi menjadi lebih efisien.

Pola ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan horizontal antarsesama pengepul, selain hubungan vertikal antara nelayan, pengepul pulau, pengepul Sinjai, dan pasar berikutnya.

Hubungan Nelayan dan Pengepul

Sebagian besar nelayan cenderung menjual hasil tangkapannya kepada pengepul yang sama secara berulang. Pola tersebut dipengaruhi oleh kedekatan lokasi, hubungan kerja yang telah terbentuk, hubungan kekerabatan, harga yang ditawarkan, serta akses terhadap modal operasional.

Sebagian nelayan menjalankan usaha menggunakan modal sendiri, sedangkan sebagian lainnya memperoleh dukungan biaya operasional atau sarana dari punggawa/pengepul. Biaya yang diberikan kemudian dapat diperhitungkan atau dipotong ketika hasil tangkapan dijual.

Hubungan tersebut membuat fungsi pengepul tidak terbatas sebagai pembeli. Pada beberapa kasus, pengepul sekaligus menjadi penyedia modal, pengumpul hasil, penghubung distribusi, dan sumber informasi pasar.

Meskipun demikian, keterikatan modal dapat memengaruhi pilihan nelayan dalam menentukan pembeli. Nelayan yang memperoleh modal dari pengepul cenderung memiliki hubungan penjualan yang lebih tetap dengan pemberi modal tersebut.

Bagi nelayan yang menggunakan modal sendiri, pilihan pemasaran relatif lebih terbuka. Namun, keputusan menjual langsung ke daratan tetap mempertimbangkan apakah tambahan harga yang diperoleh dapat menutupi biaya transportasi dan waktu yang dibutuhkan.

Distribusi dari Kabupaten Sinjai dan Tujuan Pemasaran

Pengepul di Kabupaten Sinjai menerima pasokan dari jaringan pengepul pulau maupun, pada kondisi tertentu, langsung dari nelayan. Berdasarkan data responden yang tercatat, beberapa pengepul Sinjai memiliki kapasitas pengiriman sekitar 1–2 ton, meskipun volume aktual dapat berubah mengikuti musim dan ketersediaan produk.

Dari Sinjai, distribusi hasil perikanan tidak selalu mengikuti jalur yang sama untuk setiap komoditas. Catatan lapangan menunjukkan bahwa pengepul mendistribusikan produk kepada jaringan pembeli yang berbeda sesuai jenis komoditas. Untuk beberapa produk, jaringan perdagangan di Makassar, termasuk kawasan Paotere, menjadi salah satu jalur pemasaran.

Pilihan menjual melalui jaringan pengepul atau pedagang dibandingkan langsung kepada perusahaan dapat dipengaruhi oleh hubungan perdagangan yang telah terbentuk, fleksibilitas transaksi, volume pasokan, kontinuitas produk, persyaratan mutu, dan kemudahan pembayaran.

Penelusuran lebih lanjut terhadap perusahaan, UPI, supplier, dan eksportir diperlukan untuk mengetahui secara pasti tujuan akhir gurita dari Sinjai, termasuk bentuk produk, standar mutu, volume, dan pasar akhirnya. File survei memang menempatkan tujuan pemasaran, bentuk produk, negara tujuan ekspor, volume, serta sumber pasokan sebagai informasi utama yang perlu ditelusuri.

Karena itu, dokumen baseline ini sebaiknya tidak menyatakan seluruh gurita Sinjai langsung menuju ekspor apabila jalur tersebut belum terverifikasi sampai pembeli akhir.

Sistem Transaksi, Harga, dan Margin

Transaksi hasil perikanan pada tingkat pengepul umumnya dilakukan secara tunai. Harga pembelian dan penjualan berbeda menurut komoditas, ukuran atau grade, kualitas, musim, ketersediaan pasokan, dan kondisi pasar.

Data survei menunjukkan kisaran selisih harga jual-beli pada beberapa pengepul pulau sekitar Rp2.000–Rp7.000/kg, sedangkan pada beberapa pengepul Kabupaten Sinjai sekitar Rp2.000–Rp5.000/kg.

Namun, selisih harga tersebut tidak dapat langsung dipahami sebagai keuntungan bersih. Pengepul menanggung berbagai komponen biaya, terutama transportasi, penanganan produk, pengemasan, es atau penyimpanan apabila digunakan, tenaga kerja, serta risiko perubahan harga dan penurunan mutu produk.

Pertimbangan biaya tersebut juga menentukan keputusan pengepul pulau untuk mengirim sendiri, menjual kepada pengepul lain, atau menggunakan mekanisme *titip jual*. Dengan demikian, volume komoditas dan efisiensi biaya distribusi menjadi faktor penting dalam pembentukan rantai pasok.

Tabel 10. Karakteristik Rantai Pasok Menurut Tingkat Pelaku

Tingkat Pelaku	Kapasitas/ Skala	Sistem Pembayaran	Margin/ Selisih Harga	Karakteristik Distribusi
Nelayan	Skala kecil; volume hasil bervariasi menurut musim, upaya, dan hasil tangkapan	Umumnya menerima pembayaran tunai dari pengepul	–	Umumnya menjual kepada pengepul pulau. Pada kondisi tertentu, terutama ketika volume hasil cukup banyak dan dinilai ekonomis, dapat menjual langsung ke pengepul di Kabupaten Sinjai.
Pengepul Pulau Kambuno dan Liang-Liang	Data pada pengepul yang teridentifikasi menunjukkan kapasitas umumnya <1 ton	Umumnya tunai	Sekitar Rp2.000–Rp7.000/kg*	Mengumpulkan hasil dari nelayan. Memperhitungkan volume komoditas dan biaya operasional sebelum melakukan pengiriman ke Sinjai. Jika volume belum ekonomis, komoditas dapat dijual atau dititipjalkan kepada sesama pengepul pulau untuk dikonsolidasikan.
Pengepul Pulau/ Konsolidator	Menggabungkan hasil dari beberapa sumber untuk mencapai volume pengiriman yang lebih ekonomis	Umumnya tunai atau melalui mekanisme <i>titip jual</i> sesuai hubungan antarpelaku	Bervariasi menurut komoditas dan transaksi	Menjadi titik konsolidasi hasil milik sendiri, hasil yang dibeli dari pengepul lain, dan/atau komoditas yang dititipjalkan sebelum dikirim ke daratan.
Pengepul Kabupaten Sinjai	Data pada pengepul yang teridentifikasi menunjukkan kapasitas	Umumnya tunai	Sekitar Rp2.000–Rp5.000/kg*	Menerima produk dari pengepul pulau dan pada kondisi tertentu langsung dari nelayan. Produk kemudian didistribusikan sesuai jenis komoditas dan jaringan pembeli, termasuk ke jaringan perdagangan di Makassar.

	pengiriman sekitar 1–2 ton			
Pedagang/ Supplier/ Pengepul Makassar	Data kuantitatif belum tersedia secara konsisten	Bervariasi	Belum tersedia data yang memadai	Menjadi bagian dari jaringan distribusi lanjutan. Jalur dan pembeli tujuan berbeda menurut komoditas; kawasan Paotere teridentifikasi sebagai salah satu simpul perdagangan yang digunakan oleh sebagian jaringan pengepul Sinjai.
UPI/ Perusahaan / Eksportir	Belum tersedia data yang memadai	Mengikuti mekanisme transaksi perusahaan	Belum tersedia data yang memadai	Berperan dalam pembelian, pengolahan, penyimpanan, dan/atau pemasaran lanjutan berdasarkan volume, mutu, ukuran, kontinuitas pasokan, dan spesifikasi pasar.

Catatan: Kisaran margin merupakan selisih harga jual-beli yang tercatat pada responden yang memiliki data dan tidak dapat langsung diartikan sebagai keuntungan bersih. Pengepul masih menanggung biaya transportasi, penanganan, penyimpanan/es, tenaga kerja, serta risiko perubahan harga dan penurunan mutu. Data kapasitas dan margin tidak mewakili seluruh pengepul karena informasi kuantitatif tidak tersedia secara lengkap untuk setiap responden.

Sumber: Hasil Riset Aksi Partisipatif Masyarakat dan Survei Rantai Pasok Perikanan, YKL Indonesia, 2026

Mutu, Penanganan, dan Persyaratan Pasar

Kualitas produk menjadi faktor penting ketika komoditas bergerak menuju pembeli pada tingkat yang lebih tinggi. Sistem perdagangan dapat menerapkan persyaratan terkait ukuran, grade, kondisi fisik, kesegaran, penanganan pascatangkap, dan bentuk produk.

Pada tingkat nelayan, hasil diagnosa menunjukkan bahwa gurita umumnya ditempatkan dalam wadah atau boks kering tanpa es selama aktivitas penangkapan. Setelah tiba di darat, sebagian menambahkan air laut ke dalam wadah, sedangkan sebagian lainnya langsung membawa hasil untuk dijual.

Pada tingkat perdagangan berikutnya, kebutuhan penanganan dapat berubah sesuai lama penyimpanan, jarak distribusi, dan persyaratan pembeli. Karena itu, kesinambungan rantai dingin dan standar penanganan menjadi salah satu aspek yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Instrumen survei rantai pasok secara khusus menempatkan ukuran minimum, standar mutu, persyaratan pascapanen, dan alasan penolakan produk sebagai variabel penting untuk memahami akses produk Sinjai terhadap perusahaan atau pasar yang lebih tinggi.

Karakteristik dan Isu Utama Rantai Pasok

Hasil diagnosa menunjukkan bahwa rantai pasok perikanan gurita memiliki beberapa karakter utama:

- Produksi berasal dari perikanan skala kecil dengan hasil tangkapan yang tersebar pada banyak nelayan sehingga membutuhkan proses pengumpulan dan konsolidasi.
- Pengepul pulau memiliki fungsi penting dalam menyediakan akses pasar, mengumpulkan produk, dan pada sebagian kasus menyediakan modal operasional.
- Terdapat hubungan horizontal antarsesama pengepul pulau melalui jual-beli komoditas dan mekanisme *titip jual* untuk mencapai volume pengiriman yang lebih ekonomis.
- Keputusan pengiriman dipengaruhi oleh keseimbangan antara volume komoditas, nilai penjualan, biaya operasional, dan potensi keuntungan.
- Jalur pemasaran tidak selalu linear dan dapat berbeda menurut komoditas, volume, hubungan perdagangan, dan pembeli tujuan.

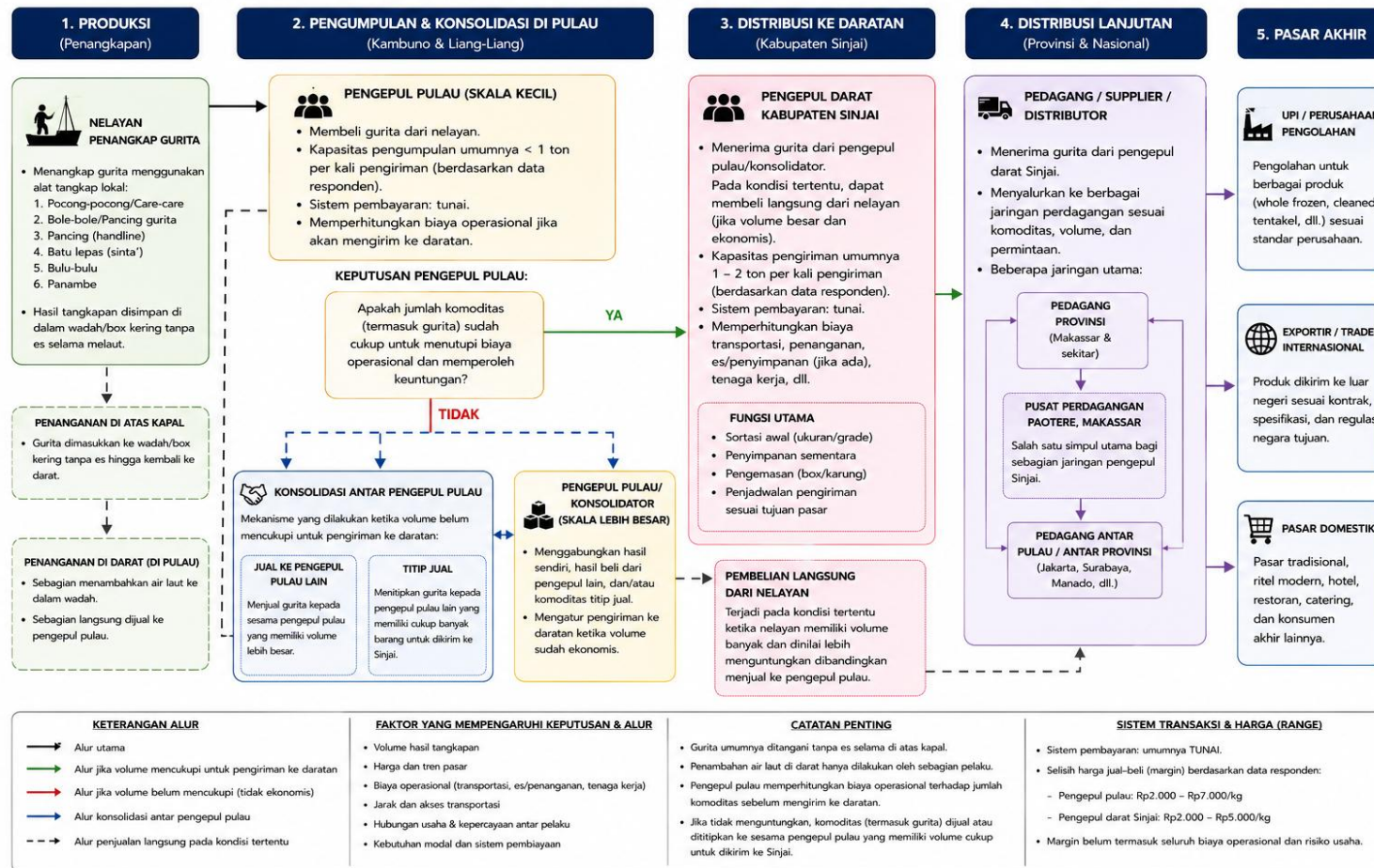
- Informasi harga, standar mutu, dan akses terhadap pembeli pada tingkat lebih tinggi belum sepenuhnya berada dalam kendali nelayan.
- Penanganan hasil dan rantai dingin menjadi aspek penting karena dapat memengaruhi mutu dan nilai produk pada tahapan perdagangan berikutnya.

Rantai pasok yang telah berkembang memiliki fungsi penting dalam menghubungkan masyarakat kepulauan dengan pasar. Oleh karena itu, penguatan rantai pasok tidak semata-mata diarahkan untuk memperpendek rantai perdagangan atau menghilangkan peran pengepul, tetapi untuk meningkatkan efisiensi distribusi, transparansi informasi harga, kualitas penanganan hasil, akses pasar, serta posisi tawar para pelaku di tingkat lokal.



Gambar 13. Gurita hasil tangkapan nelayan di tingkat pengepul.

ALUR RANTAI PASOK PERIKANAN GURITA PULAU KAMBUNO DAN PULAU LIANG-LIANG



Sumber: Hasil Riset Aksi Partisipatif Masyarakat dan Survei Rantai Pasok Perikanan, YKL Indonesia, 2026.

Gambar 14. Bagan Alur Rantai Pasok Perikanan Gurita Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang

2.4. Struktur dan Tata Kelola Perikanan

Struktur Pengelolaan Perikanan Gurita

Struktur pengelolaan perikanan di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang secara umum masih dipengaruhi oleh sistem tradisional punggawa–sawi yang telah berkembang secara turun-temurun. Sistem ini bukan hanya membentuk hubungan kerja dalam kegiatan penangkapan, tetapi juga menjadi bagian dari hubungan sosial-ekonomi masyarakat nelayan. Dalam struktur tersebut, punggawa berperan sebagai penyedia modal dan pembeli hasil tangkapan, sedangkan sawi merupakan nelayan yang menjalankan kegiatan penangkapan.

Dalam praktiknya, tidak seluruh nelayan memiliki bentuk hubungan yang sama dengan punggawa. Sebagian nelayan menjalankan usaha menggunakan modal sendiri, sedangkan sebagian lainnya memperoleh dukungan berupa biaya operasional, armada, alat tangkap, atau kebutuhan melaut dari punggawa atau pengepul. Nelayan yang memperoleh dukungan modal umumnya memiliki hubungan penjualan dengan pihak yang memberikan modal tersebut.

Selain sistem punggawa–sawi, terdapat pola operasi penangkapan secara berkelompok menggunakan armada yang lebih besar, terutama jolloro. Dalam pola ini terdapat pemilik kapal dan nelayan yang ikut dalam satu armada, tetapi masing-masing tetap melakukan aktivitas penangkapan. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan yang berlaku, termasuk pemberian bagian sekitar 20% kepada pemilik jolloro ketika hasil tangkapan dinilai cukup banyak. Apabila hasil tangkapan sedikit, bagian tersebut dapat tidak diberlakukan. Fleksibilitas ini merupakan bagian dari praktik lokal dalam menyesuaikan pembagian hasil dengan kondisi tangkapan.

Punggawa dan Sawi: Relasi Sosial-Ekonomi dalam Perikanan

Punggawa: Penyedia Modal dan Penghubung Pasar

Punggawa memiliki posisi penting dalam mendukung keberlangsungan aktivitas penangkapan nelayan. Dukungan yang diberikan dapat berbeda menurut kemampuan punggawa dan kebutuhan nelayan, mulai dari biaya operasional untuk bahan bakar dan kebutuhan melaut, alat tangkap, hingga penyediaan armada penangkapan.

Selain menyediakan modal, punggawa atau pengepul juga menjadi saluran pemasaran bagi hasil tangkapan nelayan. Nelayan yang memperoleh dukungan modal umumnya menjual hasil tangkapannya kepada punggawa atau pengepul yang memberikan modal tersebut. Hubungan ini memberikan kemudahan bagi

nelayan karena modal dapat diperoleh dengan proses yang relatif cepat dan tanpa persyaratan administratif seperti pada lembaga pembiayaan formal.

Pola pengembalian modal dapat mengikuti hubungan dan kesepakatan yang dibangun antara nelayan dan punggawa. Berdasarkan hasil diagnosa, biaya operasional yang diberikan dapat diperhitungkan ketika hasil tangkapan dijual. Dalam beberapa hubungan usaha, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi harga yang diterima nelayan dibandingkan harga pasar yang berlaku.

Dengan demikian, hubungan punggawa–sawi tidak hanya merupakan hubungan antara pemberi dan penerima modal. Punggawa dapat menjalankan beberapa fungsi sekaligus sebagai penyedia modal, pembeli hasil tangkapan, penghubung pasar, dan bagian dari jaringan sosial-ekonomi nelayan.

Sawi: Nelayan Penangkap dan Penerima Modal

Sawi merupakan nelayan yang menerima dukungan modal atau sarana dari punggawa dan menjalankan kegiatan penangkapan. Mereka terlibat langsung mulai dari persiapan melaut, pengoperasian alat tangkap, hingga membawa hasil tangkapan kembali ke pulau.

Pengetahuan dan keterampilan penangkapan umumnya berkembang melalui pengalaman melaut, keluarga, dan pertukaran pengetahuan antarnelayan. Dalam konteks perikanan gurita, pertukaran pengetahuan tersebut juga terlihat dari sejarah masyarakat yang mulai mengembangkan penangkapan gurita sekitar tahun 2015 dan kemudian mempelajari alat serta teknik penangkapan dari nelayan Pulau Langkai sekitar tahun 2020.

Sebagai bagian dari hubungan permodalan, sawi umumnya menjual hasil tangkapannya kepada punggawa atau pengepul yang memberikan dukungan modal. Hubungan tersebut menciptakan kepastian akses terhadap modal dan pembeli, tetapi pada saat yang sama dapat memengaruhi keleluasaan nelayan dalam menentukan saluran pemasaran hasil tangkapannya.

Pola Pemilik Kapal dan Nelayan dalam Operasi Berkelompok

Selain pola penangkapan individual, terdapat kegiatan penangkapan secara berkelompok menggunakan armada seperti jolloro. Dalam satu jolloro dapat terdapat pemilik kapal dan sejumlah nelayan yang melakukan perjalanan bersama, termasuk pola operasi yang membawa sampan masing-masing untuk digunakan setelah mencapai wilayah penangkapan.

Selama kegiatan penangkapan, masing-masing nelayan pada dasarnya melakukan aktivitas penangkapan dan memperoleh hasil tangkapannya sendiri. Namun, penggunaan armada bersama membentuk sistem pembagian yang memberikan

bagian kepada pemilik jolloro sebagai kompensasi atas penyediaan kapal dan sarana transportasi.

Berdasarkan praktik yang dicatat dalam hasil diagnosa, sekitar 20% dari pendapatan atau hasil diperhitungkan untuk pemilik jolloro ketika hasil tangkapan yang diperoleh relatif banyak. Ketentuan tersebut bersifat fleksibel. Ketika hasil tangkapan sedikit, bagian tersebut dapat tidak diambil sehingga beban nelayan tidak semakin besar pada saat hasil penangkapan rendah.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa struktur hubungan kerja dalam perikanan tidak hanya berbentuk punggawa–sawi, tetapi juga dapat terbentuk berdasarkan kepemilikan dan penggunaan bersama sarana produksi, dengan kesepakatan pembagian hasil yang berkembang secara lokal.

Akses Permodalan Nelayan

Akses permodalan nelayan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang masih banyak bergantung pada punggawa atau pengepul. Bentuk dukungan modal bervariasi menurut kebutuhan nelayan dan kemampuan pemberi modal, mulai dari biaya operasional, bahan bakar, sarana penangkapan, alat tangkap, hingga armada.

Kemudahan akses menjadi salah satu alasan sistem tersebut tetap bertahan. Nelayan dapat memperoleh modal melalui hubungan sosial dan kepercayaan tanpa melalui persyaratan administratif yang relatif kompleks sebagaimana pembiayaan formal.

Upaya memperluas akses terhadap pembiayaan formal sebenarnya pernah dilakukan. Masyarakat menyampaikan bahwa pernah terdapat sosialisasi layanan pembiayaan dari pihak perbankan dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada nelayan. Namun, pemanfaatannya tidak berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu kendala yang muncul adalah pemahaman sebagian penerima terhadap mekanisme pembiayaan. Terdapat penerima yang memahami dana yang diperoleh sebagai bentuk bantuan pemerintah, bukan pinjaman yang memiliki kewajiban pengembalian. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap tunggakan dan rendahnya keberlanjutan skema pembiayaan. Keterbatasan literasi keuangan dan pendampingan setelah penyaluran juga menjadi tantangan dalam pemanfaatan pembiayaan formal.

Pada kondisi baseline, belum teridentifikasi lembaga pembiayaan formal yang dimanfaatkan secara luas dan berkelanjutan oleh nelayan. Karena itu, punggawa dan pengepul masih menjadi salah satu sumber modal yang paling mudah diakses.

Sistem ini memberikan manfaat berupa kemudahan dan kecepatan memperoleh modal, tetapi sekaligus menghubungkan akses pembiayaan dengan akses

pemasaran, karena nelayan penerima modal umumnya memiliki hubungan penjualan dengan pemberi modal.

Kondisi Pengelolaan Perikanan Gurita Saat Ini

Meskipun terdapat struktur sosial-ekonomi punggawa–sawi, struktur tersebut perlu dibedakan dari pengelolaan sumber daya perikanan dalam arti pengaturan pemanfaatan sumber daya secara kolektif.

Pada saat diagnosa dilakukan, belum terdapat mekanisme yang secara khusus dan terdokumentasi mengatur pemanfaatan perikanan gurita di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang. Pemanfaatan gurita masih berlangsung sebagai bagian dari perikanan multi-komoditas dan keputusan penangkapan terutama dipengaruhi oleh musim, kondisi perairan, ketersediaan sumber daya, harga, wilayah penangkapan, dan peluang ekonomi.

Belum terdapat pengaturan kolektif yang secara khusus menentukan waktu penangkapan, ukuran minimum tangkapan, pembatasan upaya, atau periode penutupan sementara wilayah penangkapan gurita. Demikian pula, belum terdapat sistem pencatatan hasil dan upaya penangkapan yang secara konsisten digunakan bersama sebagai dasar pengambilan keputusan pengelolaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur yang saat ini paling nyata dalam perikanan gurita adalah struktur sosial-ekonomi yang mengatur hubungan produksi, permodalan, dan pemasaran, sementara struktur pengelolaan sumber daya secara kolektif masih belum berkembang secara khusus.

Aturan Lokal dan Praktik Pengelolaan

Masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang kuat mengenai wilayah penangkapan, kondisi taka', musim, cuaca, arus, pasang surut, habitat, dan keberadaan sumber daya. Pengetahuan tersebut digunakan dalam menentukan waktu, lokasi, alat, dan komoditas yang menjadi target penangkapan.

Namun, pengetahuan dan praktik tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi aturan pengelolaan perikanan gurita yang disepakati secara kolektif dan terdokumentasi.

Belum terdapat sistem buka-tutup perikanan gurita yang secara khusus diterapkan di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang. Belum pula terdapat kesepakatan khusus mengenai ukuran minimum gurita, pembatasan jumlah alat tangkap, atau mekanisme penggunaan data hasil tangkapan sebagai dasar menentukan pengaturan pemanfaatan.

Di sisi lain, keberadaan praktik lokal, pengetahuan masyarakat, hubungan sosial antarnelayan, serta pengalaman dalam menyelesaikan persoalan pemanfaatan sumber daya merupakan modal sosial yang dapat mendukung pengembangan pengelolaan berbasis masyarakat di masa mendatang.

Pengawasan dan Konflik Pemanfaatan Sumber Daya

Wilayah penangkapan nelayan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang tidak seluruhnya bersifat eksklusif. Berbagai taka' dimanfaatkan bersama oleh nelayan Desa Pulau Harapan, nelayan dari pulau lain di Kepulauan Sembilan, maupun nelayan dari luar Kabupaten Sinjai.

Taka' Pasi' Loangnge merupakan salah satu contoh wilayah yang memiliki intensitas pemanfaatan tinggi. Selain menjadi wilayah penangkapan gurita, ikan dasar, dan komoditas lainnya, kawasan tersebut juga dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut. Nelayan dari Pangkep, Makassar, Takalar, Selayar, dan wilayah lainnya juga diketahui memanfaatkan sejumlah wilayah penangkapan di sekitar Kepulauan Sembilan.

Masyarakat pernah melakukan upaya pengusiran terhadap nelayan dari luar wilayah yang dinilai melakukan penangkapan secara intensif menggunakan metode penyelaman dengan kompresor. Persoalan terkait aktivitas penyelaman, termasuk penangkapan pada malam hari, juga menjadi perhatian masyarakat dalam pemanfaatan wilayah tangkap bersama.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu pengelolaan tidak hanya berkaitan dengan kondisi sumber daya, tetapi juga dengan akses terhadap ruang, intensitas pemanfaatan, praktik penangkapan, dan hubungan antar kelompok pengguna.

Pada kondisi baseline, mekanisme penyelesaian konflik dan pengaturan akses terhadap wilayah penangkapan belum sepenuhnya terlembagakan dalam suatu sistem pengelolaan bersama. Penanganan persoalan masih banyak mengandalkan komunikasi langsung, kesepakatan informal, dan respons masyarakat ketika muncul permasalahan.

Struktur Pengelolaan pada Kondisi Baseline

Tabel 11. Struktur Pengelolaan

Aspek		Kondisi Baseline
Struktur sosial-ekonomi utama		Sistem punggawa-sawi masih menjadi salah satu struktur penting dalam hubungan permodalan, produksi, dan pemasaran perikanan.

Punggawa/pengepul	Berperan sebagai penyedia modal atau sarana bagi sebagian nelayan serta pembeli dan penghubung pemasaran hasil tangkapan.
Sawi/nelayan	Menjalankan kegiatan penangkapan dan, apabila menerima modal dari punggawa, umumnya memiliki hubungan penjualan dengan pemberi modal.
Operasi berkelompok	Terdapat pola pemilik jolloro dan nelayan yang melakukan perjalanan penangkapan bersama. Bagian sekitar 20% dapat diberikan kepada pemilik jolloro ketika hasil tangkapan relatif banyak dan dapat tidak diberlakukan ketika hasil sedikit.
Akses permodalan	Masih banyak mengandalkan modal sendiri serta punggawa/pengepul. Pembiayaan formal belum dimanfaatkan secara luas dan berkelanjutan.
Pengaturan khusus perikanan gurita	Belum terdapat mekanisme khusus dan terdokumentasi yang mengatur pemanfaatan perikanan gurita secara kolektif.
Pengaturan waktu dan ukuran tangkapan	Belum terdapat kesepakatan khusus mengenai periode buka-tutup maupun ukuran minimum gurita yang boleh ditangkap.
Wilayah penangkapan	Berbagai taka' merupakan ruang pemanfaatan bersama dan juga dapat diakses oleh nelayan dari luar wilayah.
Monitoring perikanan	Belum terdapat sistem pencatatan hasil dan upaya penangkapan yang dilakukan secara konsisten sebagai dasar pengambilan keputusan bersama.
Pengawasan dan konflik	Terdapat perhatian dan respons masyarakat terhadap praktik penangkapan tertentu dan nelayan luar, tetapi mekanisme pengawasan dan penyelesaian konflik belum terlembagakan secara khusus.
Pengambilan keputusan pengelolaan	Belum terdapat mekanisme khusus yang secara rutin menggunakan data, monitoring, dan kesepakatan masyarakat untuk menentukan keputusan pengelolaan perikanan gurita.

Sumber: Hasil Riset Aksi Partisipatif Masyarakat untuk Diagnosa Perikanan, YKL Indonesia, 2026.

Perspektif Masyarakat terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut

Perspektif masyarakat Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang terhadap pengelolaan sumber daya laut terbentuk dari perpaduan antara pengetahuan yang diwariskan antargenerasi, pengalaman langsung sebagai masyarakat pesisir,

perubahan sosial, serta perkembangan informasi dan teknologi. Cara masyarakat memahami laut tidak bersifat tetap, tetapi terus berubah mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat dan aktivitas perikanan.

Pada masa lalu, hubungan masyarakat dengan laut banyak dipengaruhi oleh pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Pengetahuan tersebut tidak selalu berbentuk aturan tertulis, tetapi hadir melalui kepercayaan, pantangan, cerita, nasihat orang tua, serta kemampuan membaca tanda-tanda alam. Nelayan menggunakan pengetahuan mengenai arah angin, posisi matahari, rasi bintang, arus, cuaca, dan berbagai kondisi alam sebagai bagian dari pertimbangan ketika melakukan aktivitas di laut. Terdapat pula berbagai kepercayaan dan pantangan yang berkaitan dengan keselamatan maupun perilaku ketika melaut.

Seiring perubahan sosial, sebagian pengetahuan dan praktik tersebut mulai berkurang. Generasi yang lebih muda tidak seluruhnya memahami atau menerapkan kembali kepercayaan dan kebiasaan yang dikenal oleh generasi sebelumnya. Perubahan ini dipengaruhi oleh semakin terbukanya akses terhadap pendidikan dan informasi, perubahan pemahaman masyarakat, mobilitas yang semakin tinggi, serta berkembangnya teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun aktivitas perikanan.

Meskipun demikian, pengetahuan lokal mengenai kondisi laut tetap menjadi bagian penting dalam aktivitas nelayan. Pengalaman melaut digunakan untuk mengenali musim, kondisi cuaca dan perairan, karakter wilayah penangkapan, keberadaan taka', serta lokasi dan waktu keberadaan komoditas tertentu. Pengetahuan tersebut terbentuk dari pengalaman yang panjang dan pertukaran informasi antarnelayan.

Perspektif terhadap Konservasi dan Pengelolaan

Masyarakat secara umum telah mengenal konsep kawasan konservasi atau kawasan perlindungan laut. Informasi tersebut diperoleh melalui berbagai sumber, seperti penyuluhan, interaksi dengan pihak luar, media, serta pengalaman melihat atau mendengar praktik pengelolaan di wilayah lain. Masyarakat juga memahami secara umum bahwa perlindungan ekosistem laut berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya perikanan yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Pemahaman tersebut terlihat dari pandangan masyarakat mengenai hubungan antara kondisi habitat dan keberadaan sumber daya ikan. Terumbu karang yang terjaga dipahami memiliki arti penting bagi keberadaan ikan dan biota laut lainnya. Sebaliknya, kerusakan habitat dan praktik penangkapan yang merusak dipandang dapat memengaruhi ketersediaan sumber daya perikanan dalam jangka panjang.

Namun, pengetahuan mengenai pentingnya konservasi tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi tindakan kolektif berupa aturan atau mekanisme pengelolaan sumber daya yang dijalankan secara sistematis oleh masyarakat. Belum terdapat pengaturan yang secara khusus dan konsisten menghubungkan pemanfaatan wilayah, monitoring sumber daya, kesepakatan pemanfaatan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan.

Dalam diskusi mengenai pengelolaan, masyarakat juga melihat perlunya pengaturan yang lebih jelas terhadap pemanfaatan sumber daya dan ruang laut. Pandangan tersebut terutama berkaitan dengan keberadaan berbagai pengguna yang memanfaatkan wilayah penangkapan yang sama, termasuk nelayan yang berasal dari luar Pulau Sembilan.

Perspektif ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat persoalan perikanan dari aspek hasil tangkapan, tetapi juga mulai melihat pentingnya pengaturan pemanfaatan sumber daya dan wilayah. Namun, bentuk pengaturan yang sesuai masih memerlukan proses pembelajaran, pembahasan, dan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta kewenangan para pihak terkait.

Dengan demikian, pengetahuan awal mengenai konservasi dan adanya pandangan mengenai kebutuhan pengaturan sumber daya merupakan modal awal bagi pengembangan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat. Modal tersebut belum dapat diartikan sebagai persetujuan terhadap suatu bentuk atau model pengelolaan tertentu, tetapi menunjukkan adanya ruang untuk membangun pembelajaran dan dialog mengenai pilihan pengelolaan berdasarkan kondisi sumber daya dan kebutuhan masyarakat.

Pengetahuan Lokal dan Penggunaan Teknologi

Perubahan cara masyarakat memahami laut juga terlihat dari semakin berkembangnya penggunaan teknologi dalam aktivitas perikanan. Jika sebelumnya nelayan lebih banyak mengandalkan pengalaman dan tanda-tanda alam, sebagian nelayan saat ini mulai menggunakan telepon pintar (*smartphone*) dan berbagai sumber informasi digital untuk mendukung keputusan sebelum maupun selama melakukan aktivitas melaut.

Teknologi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai prakiraan cuaca, arah dan kecepatan angin, kondisi gelombang, pasang surut, serta informasi lain yang berkaitan dengan kondisi perairan dan aktivitas penangkapan. Perkembangan akses komunikasi juga memungkinkan nelayan memperoleh dan bertukar informasi dengan lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

Penggunaan teknologi tersebut tidak sepenuhnya menggantikan pengetahuan lokal. Dalam praktiknya, nelayan mengombinasikan informasi yang diperoleh melalui teknologi dengan pengalaman mereka dalam membaca kondisi laut. Informasi cuaca atau kondisi perairan dapat menjadi salah satu pertimbangan, tetapi keputusan untuk melaut tetap dipengaruhi oleh pengalaman, pengamatan langsung, karakter armada, lokasi penangkapan, dan kondisi aktual di lapangan.

Perpaduan antara pengetahuan berbasis pengalaman dan penggunaan teknologi menunjukkan adanya proses adaptasi dalam masyarakat nelayan. Pengetahuan masyarakat tidak semata-mata mengalami kehilangan akibat perubahan zaman, tetapi juga mengalami transformasi, dengan masuknya sumber pengetahuan dan alat bantu baru ke dalam praktik perikanan.

Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi pengembangan pengelolaan perikanan ke depan. Pengalaman dan pengetahuan lokal masyarakat mengenai wilayah tangkap, musim, sumber daya, dan perubahan kondisi perairan dapat dipadukan dengan data hasil monitoring serta informasi ilmiah untuk memperkuat proses pembelajaran dan pengambilan keputusan.

Pada kondisi baseline, perpaduan tersebut belum berkembang menjadi sistem pengelolaan data dan monitoring yang terstruktur. Namun, kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap teknologi memberikan peluang bagi pengembangan sistem monitoring perikanan yang sederhana, partisipatif, dan sesuai dengan kapasitas masyarakat.

Secara keseluruhan, perspektif masyarakat menunjukkan adanya tiga modal penting bagi pengembangan pengelolaan sumber daya laut, yaitu pengetahuan dan pengalaman lokal yang masih digunakan dalam aktivitas perikanan, pemahaman awal mengenai pentingnya perlindungan sumber daya dan kebutuhan pengaturan pemanfaatan, serta kemampuan masyarakat beradaptasi dengan perkembangan informasi dan teknologi. Ketiga modal tersebut dapat menjadi dasar bagi proses pembelajaran bersama dan pengembangan pengelolaan yang lebih berbasis data, partisipatif, dan sesuai dengan konteks masyarakat Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang.

BAB 3. PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN

Pengelolaan perikanan di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang melibatkan berbagai pihak yang memiliki hubungan berbeda terhadap pemanfaatan sumber daya, pengelolaan wilayah, pengawasan, pendampingan, pengembangan usaha, serta pemasaran hasil perikanan. Para pihak tersebut mencakup masyarakat sebagai pengguna langsung sumber daya, kelembagaan lokal, pemerintah pada berbagai tingkatan, aparat pengawasan dan keamanan, pelaku rantai pasok, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, serta media.

Hasil diagnosa menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan tidak dapat hanya bertumpu pada nelayan sebagai pengguna utama sumber daya. Wilayah penangkapan dimanfaatkan oleh berbagai kelompok nelayan, termasuk nelayan dari luar Pulau Sembilan, sementara hasil perikanan terhubung dengan rantai perdagangan hingga Kabupaten Sinjai, Makassar, dan jaringan pasar berikutnya. Pada saat yang sama, kewenangan terhadap pembangunan perikanan, pengelolaan ruang laut, pengawasan sumber daya, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa berada pada institusi yang berbeda.

Identifikasi dan analisis para pihak diperlukan untuk memahami posisi, peran, kepentingan, dan pengaruh masing-masing pihak serta peluang kolaborasi dalam pengembangan pengelolaan perikanan ke depan. Analisis ini menjadi dasar untuk menentukan pihak-pihak yang perlu dilibatkan secara langsung, dikonsultasikan, dikoordinasikan, maupun diperkuat perannya dalam proses pengelolaan.

3.1. Identifikasi Para Pihak dalam Pengelolaan Perikanan

Para pihak dalam pengelolaan perikanan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang dapat dikelompokkan berdasarkan hubungan dan fungsinya dalam sistem perikanan. Identifikasi tidak hanya mencakup pihak yang telah terlibat dalam proses diagnosa dan kegiatan program, tetapi juga pihak yang memiliki mandat, kewenangan, pengaruh, atau potensi kontribusi terhadap pengelolaan perikanan ke depan.

Pada tingkat lokal, nelayan merupakan pengguna langsung sumber daya sekaligus pemilik pengetahuan mengenai wilayah tangkap, musim, kondisi sumber daya, dan praktik penangkapan. Di sekitar nelayan terdapat perempuan dalam rumah tangga perikanan, tokoh masyarakat, kelompok nelayan/KUB, Pokmaswas, punggawa,

pengepul, serta Pemerintah Desa yang memiliki fungsi berbeda dalam sistem sosial, ekonomi, dan kelembagaan perikanan.

Hasil riset aksi partisipatif secara langsung melibatkan nelayan, kelompok nelayan, kelompok perempuan, pengepul, tokoh masyarakat, dan Pemerintah Desa Pulau Harapan. Penelusuran rantai pasok juga diperluas kepada pengepul di Kabupaten Sinjai sebagai bagian dari upaya memahami hubungan produksi dan pemasaran hasil perikanan.

Pada tingkat pemerintahan dan kelembagaan yang lebih luas, pengelolaan perikanan berhubungan dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, aparat pengawasan dan keamanan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, serta pelaku pasar. Pemetaan awal program juga mengidentifikasi DKP Provinsi, KKP, PSDKP, Polairud, perguruan tinggi, media, UPI, pengumpul kabupaten, punggawa, DKP Kabupaten, Babinsa, Bhabinkamtibmas, CDK, Pemerintah Desa, Pokmaswas, dan KUB sebagai bagian dari lingkungan para pihak yang berhubungan dengan pengelolaan.



Gambar 15. Diskusi kelompok terarah (FGD) bersama masyarakat dalam proses diagnosa perikanan.

Tabel 12. Identifikasi Para Pihak dalam Pengelolaan Perikanan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang

Tingkat/ Kelompok	Para Pihak	Keterkaitan dengan Pengelolaan Perikanan
Masyarakat – pengguna sumber daya	Nelayan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang	Pengguna langsung sumber daya dan pemilik pengetahuan lokal mengenai taka', wilayah tangkap, musim, kondisi sumber daya, teknik penangkapan, dan perubahan hasil tangkapan. Menjadi aktor utama dalam penerapan praktik dan kesepakatan pengelolaan.
Masyarakat – perempuan	Perempuan nelayan dan perempuan rumah tangga perikanan	Terlibat dalam persiapan melaut, penjualan hasil tangkapan, budidaya dan penanganan rumput laut, serta ekonomi rumah tangga. Sebagian perempuan juga melakukan penangkapan langsung terhadap gurita dan biota lainnya.
Masyarakat – tokoh kunci	Tokoh masyarakat/tokoh kunci Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang	Memiliki pengaruh sosial, pengetahuan lokal, dan legitimasi di masyarakat. Berpotensi menjadi penghubung, mediator, penggerak musyawarah, dan <i>champion</i> dalam pengembangan tata kelola.
Kelembagaan nelayan	Kelompok Usaha Bersama (KUB)/kelompok nelayan	Wadah pengorganisasian nelayan, akses program dan peningkatan kapasitas, serta berpotensi menjadi unsur kelembagaan dalam pengelolaan perikanan berbasis masyarakat.
Pengawasan masyarakat	Pokmaswas	Memiliki fungsi strategis dalam pemantauan dan pengawasan berbasis masyarakat serta menjadi penghubung dengan lembaga pengawasan formal.
Pelaku ekonomi lokal	Punggawa dan pengepul Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang	Membeli dan mengumpulkan hasil tangkapan serta pada sebagian hubungan menyediakan modal operasional, sarana, atau armada. Memiliki pengaruh terhadap akses pasar dan hubungan ekonomi nelayan.

Pelaku operasi penangkapan	Pemilik jolloro dan nelayan/ABK	Mendukung operasi menuju wilayah tangkap yang lebih jauh dan menjadi bagian dari sistem pembagian hasil serta struktur operasi perikanan.
Pemerintahan desa	Pemerintah Desa Pulau Harapan	Memiliki peran dalam pemerintahan desa, fasilitasi musyawarah, penguatan kelembagaan, pembangunan desa, dan dukungan terhadap kesepakatan atau pengaturan lokal sesuai kewenangannya.
Aparat kewilayahan desa	Babinsa dan Bhabinkamtibmas	Memiliki kedekatan dengan masyarakat dan relevan dalam keamanan, pencegahan konflik, mediasi, komunikasi, dan koordinasi terhadap persoalan sosial maupun pemanfaatan sumber daya.
Pemerintahan kecamatan	Pemerintah Kecamatan Pulau Sembilan	Mengkoordinasikan pemerintahan wilayah kepulauan dan menjadi penghubung antara desa dengan Pemerintah Kabupaten Sinjai.
Pemerintah kabupaten	Sekretaris Daerah/Pemerintah Kabupaten Sinjai	Memiliki posisi strategis dalam koordinasi lintas perangkat daerah dan penyelarasan kebijakan pembangunan. Keterlibatan Sekda penting karena pengelolaan perikanan dan pesisir bersifat lintas sektor.
Sektor perikanan kabupaten	Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai	Pembinaan pelaku perikanan, pengembangan usaha, data perikanan, sarana-prasarana dan program sektor perikanan sesuai kewenangan kabupaten.
Pendamping teknis	Penyuluh Perikanan Kecamatan Pulau Sembilan	Berhubungan langsung dengan nelayan dan kelompok serta berperan dalam pendampingan, peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, dan penghubung dengan layanan pemerintah.
Perencanaan pembangunan	Bappeda Kabupaten Sinjai	Strategis untuk mengintegrasikan kebutuhan pengelolaan perikanan, konservasi, ekonomi masyarakat pesisir, dan pengembangan Pulau Sembilan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Riset dan kebijakan daerah	Balitbangda Kabupaten Sinjai	Berpotensi mendukung penelitian, pengembangan data, inovasi, dan rekomendasi berbasis bukti untuk kebijakan daerah.
Pemberdayaan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Relevan terhadap penguatan kelembagaan desa dan masyarakat serta pelembagaan inisiatif pengelolaan pada tingkat desa.
Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai	Berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan integrasi aspek keberlanjutan ekosistem dalam pembangunan daerah sesuai kewenangannya.
Informasi dan komunikasi publik	Diskominfo Kabupaten Sinjai	Mendukung komunikasi dan diseminasi informasi publik. Telah terlibat dalam sosialisasi dan melakukan publikasi terkait kegiatan sehingga potensial mendukung komunikasi publik dan penyebarluasan pembelajaran.
Pelabuhan/pemasaran perikanan	UPT TPI Lappa	Potensial sebagai simpul informasi pendaratan, perdagangan, produksi, harga, dan dinamika pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Sinjai.
Kelautan tingkat provinsi	DKP Provinsi Sulawesi Selatan/CDK Bosowasi	Memiliki posisi penting karena pengelolaan ruang laut dan urusan kelautan berada pada kewenangan provinsi. Relevan terhadap pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil, ruang laut, konservasi, dan kelembagaan pengelolaan. CDK Bosowasi memang merupakan unit DKP Sulsel yang bekerja pada wilayah Bone, Soppeng, Wajo, dan Sinjai. (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan)
Pemerintah pusat – kelautan dan konservasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan/unit teknis terkait pengelolaan	Potensial dan strategis terutama dalam konteks kebijakan nasional, konservasi, pengelolaan ruang laut, perlindungan

	kelautan dan konservasi	ekosistem/spesies, data, dan dukungan teknis sesuai mandat masing-masing unit.
Pengawasan sumber daya	PSDKP/unsur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Potensial dalam pengawasan kepatuhan pemanfaatan sumber daya dan penanganan praktik perikanan yang melanggar ketentuan sesuai kewenangan. Keberadaannya juga telah muncul dalam pemetaan stakeholder awal program.
Keamanan laut	Pos TNI Angkatan Laut (Posal) Sinjai	Berkaitan dengan keamanan wilayah perairan dan koordinasi persoalan di laut sesuai mandat. Telah terlibat dalam proses multipihak tingkat kabupaten.
Kepolisian perairan	Satpolairud Polres Sinjai	Berkaitan dengan keamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan serta potensial dalam penanganan praktik pemanfaatan sumber daya yang melanggar ketentuan.
Rantai pasok pulau	Pengepul pulau/konsolidator	Selain membeli hasil nelayan, sebagian berfungsi sebagai titik konsolidasi hasil dari pengepul lain melalui pembelian maupun mekanisme <i>titip jual</i> sebelum pengiriman ke daratan.
Rantai pasok kabupaten	Pengepul Kabupaten Sinjai	Mengonsolidasikan komoditas dalam volume lebih besar dan menghubungkan produksi pulau dengan jaringan perdagangan di Makassar dan wilayah lainnya.
Rantai pasok lanjutan	Pedagang, supplier dan trader	Menghubungkan pengepul dengan UPI, perusahaan pengolahan, pasar domestik, atau jaringan pasar lainnya serta memengaruhi harga, spesifikasi produk, dan pola distribusi.
Industri/pasar	UPI, perusahaan pengolahan dan eksportir	Potensial memengaruhi standar ukuran, mutu, penanganan pascapanen, permintaan, dan harga. Dapat menjadi mitra strategis untuk membangun insentif pasar bagi praktik perikanan berkelanjutan.

Pembeli akhir/pasar	Pasar domestik dan jaringan pembeli/importir	Menjadi sumber permintaan akhir yang secara tidak langsung memengaruhi harga, standar produk, dan dinamika pemanfaatan sumber daya. Jalur akhir gurita Sinjai belum seluruhnya terverifikasi sehingga aktor ini diposisikan sebagai bagian dari rantai pasar yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Perguruan tinggi/akademisi	UIAD Sinjai, UMSi, serta perguruan tinggi/peneliti yang relevan	Potensial mendukung riset, monitoring, data ilmiah, pengembangan metodologi, peningkatan kapasitas, dan evaluasi pengelolaan. UIAD dan UMSi telah teridentifikasi dalam proses pelibatan para pihak.
Organisasi masyarakat sipil	YKL Indonesia dan organisasi masyarakat sipil/mitra konservasi dan perikanan lainnya	Berperan atau potensial dalam fasilitasi masyarakat, riset dan monitoring, penguatan kapasitas, kelembagaan, pengembangan model pengelolaan, serta menjembatani kolaborasi masyarakat–pemerintah–pasar–akademisi.
Media	Media lokal/daerah dan jejaring media lainnya	Mendukung komunikasi publik, penyebaran informasi, peningkatan kesadaran, dokumentasi, dan diseminasi praktik baik pengelolaan perikanan.

Sumber: Hasil Riset Aksi Partisipatif Masyarakat, Survei Rantai Pasok Perikanan, pemetaan para pihak dan dokumentasi proses pelibatan multipihak, YKL Indonesia, 2026.

Selain para pihak yang tercantum dalam tabel tersebut, keberadaan nelayan dari luar Pulau Sembilan perlu diperhitungkan sebagai kelompok pengguna sumber daya lintas wilayah. Nelayan dari beberapa wilayah lain diketahui memanfaatkan sebagian taka' dan wilayah penangkapan yang sama dengan nelayan setempat. Keberadaan pengguna lintas wilayah menjadi penting terutama karena pengelolaan wilayah tangkap bersama tidak hanya berkaitan dengan masyarakat Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang, tetapi juga dengan pola pemanfaatan sumber daya pada skala yang lebih luas.

Dengan demikian, identifikasi para pihak menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan merupakan sistem yang melibatkan hubungan horizontal antaraktor pada tingkat masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus hubungan vertikal antara

masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan jaringan pasar.

3.2. Peran dan Kepentingan Para Pihak

Para pihak yang teridentifikasi memiliki tingkat keterkaitan yang berbeda terhadap pengelolaan perikanan. Sebagian merupakan pengguna langsung sumber daya, sebagian memiliki kewenangan formal, sementara pihak lainnya memiliki fungsi pendukung melalui pengawasan, pendampingan, penelitian, komunikasi, pembiayaan, maupun akses pasar.

Masyarakat dan Kelembagaan Lokal

Nelayan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang merupakan pihak yang memiliki kepentingan paling langsung terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan. Kondisi sumber daya, akses terhadap wilayah tangkap, perubahan musim, harga hasil tangkapan, dan aturan pengelolaan secara langsung memengaruhi kehidupan mereka. Pada saat yang sama, nelayan memiliki pengetahuan lokal mengenai taka', musim, habitat, lokasi penangkapan, serta perubahan kondisi sumber daya yang menjadi modal penting bagi pengelolaan berbasis masyarakat.

Perempuan juga memiliki posisi penting dalam sistem perikanan. Perannya tidak terbatas pada rumah tangga, tetapi mencakup persiapan kebutuhan melaut, penjualan hasil tangkapan, budidaya dan penanganan rumput laut, serta pada sebagian kasus melakukan penangkapan langsung terhadap gurita dan biota lainnya. Keterlibatan perempuan dalam diagnosa juga menunjukkan pentingnya perspektif perempuan dalam memahami rantai nilai dan ekonomi rumah tangga perikanan.

Kelompok nelayan/KUB berpotensi menjadi basis pengorganisasian masyarakat dalam pengelolaan. Sementara itu, Pokmaswas memiliki posisi yang relevan dalam pemantauan dan pengawasan berbasis masyarakat. Keberadaan kelompok-kelompok tersebut memberikan modal kelembagaan yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui koordinasi dan penguatan fungsi sesuai kebutuhan pengelolaan.

Tokoh masyarakat atau tokoh kunci memiliki pengaruh sosial yang penting dalam membangun komunikasi, kepercayaan, musyawarah, dan kesepakatan masyarakat. Dalam konteks pengembangan tata kelola, tokoh kunci berpotensi berperan sebagai penghubung antara proses formal kelembagaan dengan dinamika sosial masyarakat.

Pemerintah Desa dan Kecamatan

Pemerintah Desa Pulau Harapan memiliki posisi penting karena berada paling dekat dengan masyarakat dan memiliki fungsi dalam pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta fasilitasi kelembagaan lokal. Pemerintah Desa berpotensi mendukung proses musyawarah, pengorganisasian masyarakat, dan pelebagaan kesepakatan pengelolaan sesuai kewenangannya.

Pemerintah Kecamatan Pulau Sembilan memiliki fungsi koordinasi pada tingkat wilayah dan dapat menjadi penghubung antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Sinjai. Posisi tersebut penting terutama ketika persoalan pengelolaan melibatkan lebih dari satu desa atau pulau.

Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga memiliki kedekatan dengan masyarakat dan berpotensi mendukung komunikasi, pencegahan konflik, keamanan, serta koordinasi apabila terdapat persoalan pemanfaatan sumber daya yang berkembang pada tingkat lokal.

Pemerintah Kabupaten Sinjai

Pemerintah Kabupaten Sinjai memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan sektor perikanan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, fungsi terkait perikanan, pemberdayaan masyarakat, lingkungan, perencanaan, dan komunikasi publik tersebar pada beberapa perangkat daerah.

Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai memiliki keterkaitan langsung dengan pembinaan pelaku perikanan, pengembangan usaha, data dan program sektor perikanan sesuai kewenangan kabupaten. Penyuluh perikanan memiliki posisi penting karena berinteraksi lebih dekat dengan nelayan dan kelompok serta dapat mendukung pendampingan dan penguatan kelembagaan.

Bappeda memiliki posisi strategis dalam menghubungkan kebutuhan pengelolaan perikanan dengan perencanaan pembangunan daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkaitan dengan penguatan pemerintahan dan kelembagaan desa, sedangkan perangkat daerah yang menangani lingkungan hidup memiliki keterkaitan dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya.

Diskominfo dapat mendukung komunikasi dan diseminasi informasi publik. Keterlibatan berbagai perangkat daerah menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan memerlukan koordinasi lintas sektor dan tidak dapat ditempatkan sebagai tanggung jawab satu institusi saja.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

DKP Provinsi Sulawesi Selatan melalui struktur/unit yang memiliki wilayah kerja terkait Sinjai memiliki posisi strategis karena sebagian kewenangan pengelolaan kelautan berada pada pemerintah provinsi. Keterkaitannya mencakup pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi, serta kebijakan kelautan sesuai kewenangannya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta unit teknis terkait berpotensi memiliki peran dalam aspek kebijakan nasional, konservasi, pengawasan sumber daya, pengelolaan ruang laut, perlindungan ekosistem dan spesies, serta dukungan teknis sesuai mandat masing-masing unit.

Keterlibatan pemerintah provinsi dan pusat menjadi semakin relevan apabila pengembangan pengelolaan ke depan berkaitan dengan kewenangan yang berada di luar pemerintah desa dan kabupaten, termasuk pengelolaan kawasan konservasi dan pengawasan pemanfaatan sumber daya pada wilayah laut.

Pengawasan dan Keamanan Perairan

Pengawasan sumber daya memerlukan keterhubungan antara mekanisme berbasis masyarakat dengan lembaga formal yang memiliki kewenangan pengawasan dan penegakan hukum.

Pokmaswas dapat menjalankan fungsi pemantauan pada tingkat masyarakat, sedangkan PSDKP, Satpolairud, Posal, serta unsur terkait lainnya memiliki fungsi sesuai kewenangan masing-masing. Koordinasi tersebut penting karena wilayah penangkapan tidak hanya dimanfaatkan oleh nelayan setempat, tetapi juga oleh nelayan dari wilayah lain.

Isu penggunaan wilayah tangkap bersama, aktivitas nelayan luar, serta praktik penangkapan tertentu menunjukkan bahwa pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan kapasitas masyarakat. Dibutuhkan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang memungkinkan informasi dari masyarakat diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan apabila ditemukan pelanggaran atau konflik pemanfaatan sumber daya.

Pelaku Rantai Pasok dan Pasar

Punggawa dan pengepul memiliki posisi penting karena menghubungkan produksi nelayan dengan pasar sekaligus, pada sebagian hubungan, menyediakan akses modal operasional. Hubungan tersebut membuat punggawa dan pengepul tidak

hanya berperan sebagai pembeli, tetapi juga menjadi bagian dari struktur ekonomi perikanan lokal.

Rantai pasok hasil perikanan tidak berhenti pada pengepul pulau. Produk dapat melalui pengepul/konsolidator di tingkat pulau, pengepul Kabupaten Sinjai, pedagang atau supplier, UPI/perusahaan pengolahan, hingga jaringan pasar berikutnya. Survei rantai pasok menunjukkan bahwa struktur tersebut dapat berbeda menurut komoditas, volume, mutu, dan jaringan pembeli.

Pelaku pasar memiliki kepentingan terhadap kontinuitas pasokan, mutu, ukuran, harga, dan efisiensi distribusi. Karena itu, mereka berpotensi memiliki pengaruh terhadap praktik perikanan melalui standar pembelian dan insentif pasar. Namun, keterhubungan seluruh produk gurita dari Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang hingga pembeli akhir belum seluruhnya terverifikasi sehingga keterlibatan aktor pasar lanjutan perlu dikembangkan berdasarkan penelusuran rantai pasok yang lebih mendalam. Instrumen survei sendiri dirancang untuk menelusuri rantai hingga UPI, eksportir, trader, supplier, dan pasar akhir.

Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Media

Perguruan tinggi dan akademisi dapat berkontribusi melalui penelitian, penyediaan data ilmiah, monitoring, pengembangan metodologi, dan peningkatan kapasitas. Keberadaan perguruan tinggi di Kabupaten Sinjai juga membuka peluang pengembangan dukungan pengetahuan yang lebih dekat dengan wilayah pengelolaan.

Organisasi masyarakat sipil dapat berperan sebagai fasilitator yang menjembatani masyarakat dengan pemerintah, akademisi, dan pelaku pasar. Peran tersebut terutama relevan dalam penguatan kapasitas, pengorganisasian masyarakat, riset dan monitoring partisipatif, pengembangan kelembagaan, serta fasilitasi proses pembelajaran pengelolaan.

Media memiliki fungsi dalam komunikasi publik dan penyebaran informasi. Dalam jangka panjang, media dapat mendukung peningkatan perhatian publik terhadap pengelolaan perikanan, menyebarkan pembelajaran, dan memperkuat transparansi informasi.

3.3. Analisis Pengaruh dan Kepentingan Para Pihak

Para pihak memiliki tingkat pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang berbeda terhadap pengelolaan perikanan. Tingkat pengaruh berkaitan dengan kemampuan suatu pihak untuk memengaruhi kebijakan, keputusan, akses terhadap sumber daya, pengawasan, kelembagaan, atau pasar. Sementara itu,

tingkat kepentingan menunjukkan seberapa besar suatu pihak berkepentingan atau terdampak oleh kondisi dan perubahan pengelolaan perikanan.

Analisis pengaruh dan kepentingan digunakan untuk menentukan pendekatan pelibatan yang sesuai. Pihak dengan pengaruh dan kepentingan tinggi perlu dilibatkan secara intensif dalam proses pengelolaan. Pihak dengan kepentingan tinggi tetapi pengaruh relatif terbatas perlu diperkuat kapasitas dan ruang partisipasinya. Sebaliknya, pihak dengan pengaruh tinggi tetapi keterlibatan langsung lebih terbatas perlu dijaga koordinasi dan dukungannya.

Matriks Pengaruh–Kepentingan Para Pihak

1. Pengaruh Tinggi – Kepentingan Tinggi (Manage Closely)

Kelompok ini merupakan pihak yang perlu dilibatkan secara dekat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan.

Pihak yang dapat ditempatkan dalam kelompok ini terutama:

- Nelayan dan perwakilan kelembagaan nelayan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang;
- Pemerintah Desa Pulau Harapan;
- Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai;
- DKP Provinsi Sulawesi Selatan/CDK Bosowasi;
- Tokoh masyarakat/tokoh kunci;
- Pokmaswas dan kelembagaan pengelolaan masyarakat yang nantinya diperkuat atau dikembangkan.

Nelayan memiliki kepentingan sangat tinggi karena keberlanjutan sumber daya secara langsung berkaitan dengan penghidupan mereka. Sementara itu, pemerintah dan kelembagaan terkait memiliki pengaruh melalui kewenangan, program, fasilitasi, atau legitimasi terhadap proses pengelolaan.

2. Pengaruh Tinggi – Kepentingan Sedang atau Kontekstual (Keep Satisfied)

Kelompok ini memiliki kewenangan atau kemampuan memengaruhi keberhasilan pengelolaan, tetapi keterlibatannya dapat bergantung pada isu, kewenangan, atau tahapan pengelolaan.

Kelompok ini dapat mencakup:

- Pemerintah Kabupaten Sinjai/Sekretariat Daerah;

- Bappeda Kabupaten Sinjai;
- Pemerintah Kecamatan Pulau Sembilan;
- Kementerian Kelautan dan Perikanan/unit teknis terkait;
- PSDKP;
- Satpolairud;
- Posal;
- Babinsa dan Bhabinkamtibmas;
- perangkat daerah terkait lainnya.

Pelibatan kelompok ini terutama diperlukan pada isu yang membutuhkan kebijakan, koordinasi lintas sektor, pengawasan, penegakan aturan, penyelesaian konflik, atau dukungan kewenangan formal.

3. Pengaruh Relatif Terbatas – Kepentingan Tinggi (Keep Informed and Empower)

Kelompok ini memiliki kepentingan besar terhadap keberlanjutan perikanan tetapi tidak selalu memiliki kekuatan formal yang cukup dalam memengaruhi keputusan.

Kelompok ini dapat mencakup:

- Nelayan skala kecil yang belum terorganisasi;
- perempuan nelayan dan perempuan rumah tangga perikanan;
- anggota kelompok nelayan/KUB;
- nelayan/ABK dalam struktur operasi penangkapan;
- kelompok masyarakat lain yang bergantung pada sumber daya perikanan.

Kelompok ini perlu memperoleh akses informasi, ruang partisipasi, peningkatan kapasitas, dan representasi yang memadai agar kepentingannya dapat terakomodasi dalam pengambilan keputusan.

4. Pengaruh dan Kepentingan yang Bersifat Spesifik (Engage Strategically/Monitor)

Kelompok ini memiliki pengaruh atau kepentingan yang dapat meningkat pada isu tertentu sehingga keterlibatannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan.

Kelompok ini antara lain:

- punggawa dan pengepul;

- pengepul Kabupaten Sinjai;
- supplier, trader, UPI, perusahaan pengolahan, dan pelaku pasar;
- perguruan tinggi/akademisi;
- media;
- organisasi masyarakat sipil;
- UPT TPI Lappa;
- lembaga pembiayaan atau pihak pendukung ekonomi lainnya.

Punggawa, pengepul, dan pelaku pasar perlu mendapat perhatian khusus karena meskipun tidak memiliki kewenangan formal dalam pengelolaan sumber daya, mereka dapat memiliki pengaruh ekonomi melalui akses modal, pembelian hasil tangkapan, pembentukan harga, dan persyaratan pasar.

Sementara itu, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media dapat memberikan dukungan melalui pengetahuan, fasilitasi, monitoring, komunikasi, dan penguatan kapasitas.

Nelayan dari luar Pulau Sembilan memiliki posisi yang bersifat khusus. Mereka merupakan pengguna langsung sebagian wilayah penangkapan yang sama sehingga memiliki kepentingan terhadap akses sumber daya, tetapi tidak berada dalam struktur kelembagaan masyarakat Desa Pulau Harapan. Pelibatan mereka menjadi penting apabila keputusan pengelolaan menyangkut wilayah tangkap bersama atau berpotensi memengaruhi akses nelayan lintas wilayah.



Sumber: Hasil identifikasi dan analisis para pihak, YKL Indonesia, 2026.

Gambar 16. Matrix Pengaruh dan Kepentingan ParaPihak dalam Pengelolaan Perikanan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang Kecamatan Pulau Sinjai

Posisi setiap pihak dalam matriks tersebut tidak bersifat tetap. Pengaruh dan kepentingan dapat berubah seiring perkembangan kelembagaan, kebijakan, kondisi sumber daya, serta proses pengelolaan. Karena itu, pemetaan para pihak perlu diperbarui secara berkala selama proses pengembangan tata kelola.

Stakeholder Kunci untuk Pengembangan Pengelolaan Perikanan

Berdasarkan keterkaitan, kepentingan, dan pengaruh para pihak, pengembangan pengelolaan perikanan memerlukan struktur kolaborasi yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dengan dukungan pemerintah dan pihak lainnya.

Pada tingkat lokal, nelayan, perempuan, kelompok nelayan/KUB, Pokmaswas, tokoh masyarakat, punggawa/pengepul, dan Pemerintah Desa Pulau Harapan merupakan aktor yang perlu terhubung dalam proses pengelolaan. Masing-masing memiliki pengetahuan, kepentingan, pengaruh, dan fungsi yang berbeda sehingga tidak seluruhnya harus menjalankan peran yang sama.

Pemerintah Desa memiliki posisi strategis dalam mendukung legitimasi dan kelembagaan lokal, sedangkan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten dapat menjembatani kebutuhan koordinasi dan dukungan kebijakan pada tingkat yang lebih luas.

Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dan penyuluh perikanan memiliki posisi penting dalam pendampingan sektor perikanan. DKP Provinsi Sulawesi Selatan/CDK Bosowasi menjadi strategis terutama pada aspek yang berkaitan dengan kewenangan kelautan dan pengelolaan ruang laut. Sementara itu, lembaga pengawasan dan keamanan diperlukan untuk menghubungkan pemantauan berbasis masyarakat dengan mekanisme pengawasan formal.

Pelaku rantai pasok juga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pengelolaan. Pengepul dan pembeli dapat menjadi bagian dari upaya membangun insentif ekonomi melalui transparansi harga, peningkatan mutu, perbaikan penanganan hasil tangkapan, serta peluang akses pasar yang memberikan nilai tambah terhadap praktik perikanan yang lebih baik.

Perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil dapat berfungsi sebagai pihak pendukung melalui riset, monitoring, peningkatan kapasitas, fasilitasi, dan pembelajaran. Media dapat mendukung komunikasi publik dan penyebaran pembelajaran.

Dengan demikian, pengembangan pengelolaan perikanan memerlukan pendekatan multi-pihak dan multi-level, tetapi tetap menempatkan masyarakat sebagai pusat proses pengelolaan. Kolaborasi tidak berarti seluruh pihak harus

terlibat dalam setiap aktivitas. Pelibatan perlu disesuaikan dengan mandat, kepentingan, kapasitas, dan tahapan pengelolaan.

Arah Pelibatan Para Pihak

Secara umum, arah pelibatan para pihak dalam pengembangan pengelolaan perikanan meliputi:

1. Masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan, terutama nelayan dan kelompok pengguna sumber daya, dengan memastikan keterlibatan perempuan dan kelompok masyarakat lainnya dalam proses pengambilan keputusan;
2. Penguatan kelembagaan lokal, dengan menghubungkan kelompok nelayan/KUB, Pokmaswas, tokoh masyarakat, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat lainnya dalam mekanisme koordinasi pengelolaan;
3. Penguatan dukungan pemerintah lintas tingkat, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat sesuai kewenangan masing-masing;
4. Penguatan sistem pemantauan dan pengawasan, dengan menghubungkan monitoring berbasis masyarakat dengan lembaga pengawasan dan penegakan hukum yang memiliki kewenangan;
5. Pelibatan pelaku rantai pasok, terutama dalam pengembangan transparansi pasar, perbaikan penanganan hasil, peningkatan nilai produk, dan pengembangan insentif bagi praktik perikanan berkelanjutan;
6. Penguatan basis pengetahuan dan pembelajaran, melalui keterlibatan perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, penyuluh, dan pihak lain dalam riset, monitoring, peningkatan kapasitas, dan dokumentasi pembelajaran; dan
7. Pengembangan komunikasi dan koordinasi lintas wilayah, terutama karena sebagian wilayah penangkapan merupakan ruang pemanfaatan bersama oleh nelayan dari Pulau Sembilan maupun dari wilayah lain.

Kerangka pelibatan tersebut menjadi dasar untuk membangun pengelolaan yang tidak hanya berorientasi pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga mampu menghubungkan pengguna sumber daya, kewenangan pemerintah, sistem pengawasan, pengetahuan, dan insentif ekonomi dalam satu proses pengelolaan yang adaptif.

Kesimpulan Para Pihak

Hasil identifikasi dan analisis para pihak menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang berada dalam sistem yang kompleks dan saling terhubung. Masyarakat memiliki ketergantungan langsung terhadap sumber daya, tetapi kemampuan untuk menjaga keberlanjutannya dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar tingkat rumah tangga nelayan, termasuk kelembagaan lokal, kewenangan pemerintah, pemanfaatan wilayah oleh nelayan lintas daerah, pengawasan, akses modal, serta dinamika rantai pasar.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan pengelolaan tidak cukup dilakukan melalui satu jenis intervensi atau satu kelompok aktor. Diperlukan kombinasi antara penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan lokal, koordinasi lintas kewenangan, pengawasan, basis data dan monitoring, serta keterhubungan dengan rantai pasar.

Identifikasi para pihak dalam bab ini selanjutnya menjadi salah satu dasar untuk mendiagnosis faktor-faktor yang paling menentukan kondisi pengelolaan perikanan. Analisis tersebut dibahas lebih lanjut dalam Bab 4. Diagnosa Faktor-Faktor Kunci Pengelolaan Perikanan, untuk mengidentifikasi persoalan mendasar, hubungan sebab-akibat, modal yang tersedia, serta faktor strategis yang perlu menjadi fokus intervensi pengelolaan ke depan.



Gambar 17. Wawancara dengan masyarakat sebagai bagian dari proses pengumpulan data diagnosa perikanan

BAB 4. DIAGNOSA FAKTOR-FAKTOR KUNCI PENGELOLAAN PERIKANAN

Diagnosa faktor-faktor kunci dilakukan untuk memahami kondisi yang paling menentukan dalam pengembangan pengelolaan perikanan di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang, dengan perhatian khusus pada perikanan gurita sebagai salah satu komoditas penting dan potensial menjadi pintu masuk pengelolaan perikanan berbasis masyarakat.

Diagnosa disusun berdasarkan keseluruhan temuan profil perikanan, meliputi karakteristik nelayan dan pola penangkapan, wilayah tangkap, musim dan komoditas, perikanan gurita, biaya operasional dan hubungan permodalan, rantai pasok, struktur punggawa–sawi, peran perempuan, kondisi tata kelola, konflik pemanfaatan sumber daya, perspektif masyarakat, serta analisis para pihak. Dengan demikian, diagnosa tidak dimaksudkan untuk mengulang uraian kondisi pada bab sebelumnya, tetapi untuk mengidentifikasi modal yang telah tersedia, kesenjangan yang masih dihadapi, serta faktor-faktor yang perlu diperkuat agar pengelolaan dapat berkembang secara efektif dan berkelanjutan.

Pendekatan ini mengadaptasi kerangka diagnosa yang menilai tiga dimensi utama, yaitu motivasi (*motivation*), kondisi yang mendukung (*enabling conditions*), dan kesiapan pelaksanaan (*implementation*). Kerangka serupa digunakan dalam diagnosa pengembangan *co-management* perikanan skala kecil untuk menilai apakah terdapat motivasi para pihak, kondisi kelembagaan dan kebijakan yang memungkinkan, serta kapasitas untuk menerjemahkannya ke dalam tindakan pengelolaan.

Untuk menggambarkan kondisi baseline secara sederhana, setiap faktor dikelompokkan dalam tiga status:

Hijau = tersedia atau relatif kuat

Kuning = tersedia tetapi masih perlu diperkuat

Merah = belum tersedia atau merupakan kesenjangan utama

Status tersebut merupakan penilaian diagnostik kualitatif, bukan skor kuantitatif. Penetapannya didasarkan pada konsistensi temuan hasil riset aksi partisipatif, wawancara, observasi lapangan, analisis para pihak, dan data pendukung yang tersedia.

4.1. Aspek Motivasi (*Motivation*)

Motivasi merupakan fondasi awal bagi berkembangnya pengelolaan perikanan berbasis masyarakat. Pengelolaan akan sulit berjalan apabila masyarakat dan para pihak tidak melihat adanya alasan, kebutuhan, atau manfaat yang relevan bagi mereka untuk terlibat.

Hasil diagnosa menunjukkan bahwa terdapat modal motivasi yang cukup kuat, terutama karena masyarakat memiliki ketergantungan langsung terhadap sumber daya perikanan dan telah merasakan berbagai perubahan maupun tekanan dalam pemanfaatannya. Perikanan bukan hanya sumber pendapatan, tetapi menjadi bagian utama dari sistem penghidupan masyarakat Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang.

Tabel 13. Diagnosa Faktor Kunci Aspek Motivasi

Kriteria Pendukung	Kondisi/Faktor Kunci	Status
Ketergantungan terhadap sumber daya perikanan	Mata pencaharian masyarakat didominasi aktivitas perikanan dengan pola multi-komoditas. Keberlanjutan sumber daya laut berhubungan langsung dengan keberlanjutan penghidupan masyarakat.	Hijau
Kepentingan terhadap keberlanjutan sumber daya	Masyarakat memahami secara umum hubungan antara kondisi laut, terumbu karang, dan ketersediaan sumber daya perikanan.	Hijau
Kesadaran terhadap perubahan dan tekanan sumber daya	Masyarakat mengenali adanya tekanan seperti aktivitas penangkapan destruktif, pemanfaatan wilayah oleh nelayan dari luar, persaingan wilayah tangkap, serta perubahan kondisi hasil tangkapan dan lingkungan.	Hijau
Kepentingan terhadap pengaturan wilayah dan sumber daya	Terdapat pandangan masyarakat mengenai perlunya pengaturan pemanfaatan sumber daya dan wilayah tangkap, terutama pada wilayah yang dimanfaatkan bersama.	Hijau
Motivasi ekonomi	Masyarakat berkepentingan mempertahankan dan meningkatkan manfaat ekonomi perikanan, termasuk gurita dan komoditas lainnya.	Hijau

Pemahaman mengenai konservasi	Masyarakat telah mengenal konsep konservasi dan memahami secara umum manfaat perlindungan sumber daya, tetapi pemahaman tersebut belum seluruhnya diterjemahkan menjadi tindakan pengelolaan kolektif.	Kuning
Kesediaan menuju tindakan kolektif	Terdapat modal awal untuk membicarakan pengelolaan bersama, tetapi belum terdapat mekanisme kolektif yang berjalan secara konsisten untuk mengatur pemanfaatan sumber daya perikanan.	Kuning

Diagnosa menunjukkan bahwa persoalan utama pada aspek motivasi bukan ketiadaan kepentingan masyarakat terhadap pengelolaan. Sebaliknya, masyarakat memiliki alasan yang kuat untuk mempertahankan keberlanjutan sumber daya karena ketergantungan ekonomi mereka terhadap laut.

Masyarakat juga telah memiliki kesadaran awal mengenai hubungan antara kondisi ekosistem dan keberlanjutan hasil perikanan. Adanya kekhawatiran terhadap praktik penangkapan yang merusak, aktivitas nelayan luar, dan pemanfaatan wilayah tangkap bersama memperlihatkan adanya kebutuhan nyata terhadap pengelolaan.

Kesenjangan utama berada pada proses mengubah kepentingan individual menjadi tindakan kolektif. Kesadaran bahwa sumber daya perlu dijaga belum secara otomatis menghasilkan kesepakatan mengenai siapa yang mengelola, wilayah mana yang dikelola, aturan apa yang diterapkan, bagaimana pengawasan dilakukan, dan bagaimana manfaat serta tanggung jawab dibagi.

Dengan demikian, modal motivasi dapat dinilai relatif kuat, tetapi masih diperlukan proses fasilitasi agar berkembang dari:

kepentingan terhadap sumber daya → kesadaran bersama → kesepakatan → tindakan kolektif.

4.2. Aspek Kondisi yang Mendukung (Enabling Conditions)

Kondisi yang mendukung berkaitan dengan keberadaan faktor sosial, kelembagaan, pengetahuan, kebijakan, pasar, dan hubungan antaraktor yang memungkinkan pengelolaan perikanan berkembang.

Hasil diagnosa menunjukkan bahwa Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang memiliki sejumlah modal yang dapat mendukung pengelolaan, tetapi sebagian

besar masih berada dalam kondisi terfragmentasi. Pengetahuan masyarakat tersedia, aktor tersedia, kelembagaan tersedia, dan ruang kebijakan tersedia, tetapi unsur-unsur tersebut belum sepenuhnya terhubung dalam satu sistem pengelolaan.

Tabel 14. Diagnosa Faktor Kunci Kondisi yang Mendukung

Kriteria Pendukung	Kondisi/Faktor Kunci	Status
Pengetahuan lokal	Nelayan memiliki pengetahuan mengenai musim, taka', wilayah tangkap, kondisi perairan, komoditas, dan perubahan sumber daya berdasarkan pengalaman antargenerasi.	Hijau
Basis data perikanan	Informasi awal mengenai nelayan, wilayah tangkap, musim, alat tangkap, komoditas, rantai pasok, dan tata kelola mulai tersedia melalui proses diagnosa, tetapi data hasil tangkapan dan upaya penangkapan belum tersedia secara kontinu.	Kuning
Monitoring sumber daya	Belum terdapat sistem monitoring perikanan gurita yang berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan untuk mencatat hasil tangkapan, ukuran, upaya, lokasi, harga, dan perubahan sumber daya.	Merah
Kelembagaan masyarakat	Terdapat kelompok masyarakat, kelompok nelayan, Pokmaswas, tokoh masyarakat, serta struktur sosial yang dapat menjadi modal pengorganisasian, tetapi belum terdapat kelembagaan khusus yang menjalankan fungsi pengelolaan perikanan secara terpadu.	Kuning
Aturan pengelolaan lokal	Belum terdapat aturan lokal yang secara khusus mengatur pemanfaatan dan pengelolaan perikanan gurita atau mekanisme pengelolaan berbasis wilayah yang disepakati dan dijalankan bersama.	Merah
Pengawasan sumber daya	Terdapat aktor masyarakat dan pemerintah yang memiliki fungsi atau kepentingan terhadap pengawasan, tetapi efektivitas pengawasan wilayah perairan masih terbatas.	Kuning
Hubungan antaraktor	Terdapat pemerintah desa, pemerintah kabupaten/provinsi, aparat, akademisi, penyuluh,	Hijau

	pelaku usaha, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil yang berpotensi berkontribusi.	
Mekanisme kolaborasi	Belum terdapat forum pengelolaan bersama yang secara khusus mempertemukan masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, dan pihak lain dalam pengambilan keputusan pengelolaan perikanan.	Merah
Sistem pasar dan rantai pasok	Rantai pasok telah terbentuk dari nelayan–pengepul pulau–pengepul Kabupaten Sinjai–pasar lanjutan, sehingga produk memiliki saluran pemasaran yang relatif jelas.	Hijau
Posisi tawar nelayan	Hubungan modal dan pemasaran masih banyak dipengaruhi sistem punggawa/pengepul sehingga sebagian nelayan memiliki keterikatan dalam akses modal dan penjualan hasil tangkapan.	Kuning
Keterlibatan perempuan	Perempuan memiliki peran nyata dalam rumah tangga perikanan, penjualan hasil tangkapan, rumput laut, dan pada beberapa kasus penangkapan langsung, tetapi keterlibatannya dalam pengambilan keputusan pengelolaan belum terstruktur.	Kuning
Dukungan kebijakan dan kewenangan	Terdapat ruang kebijakan dan kewenangan pemerintah pada berbagai tingkatan yang relevan dengan pengelolaan perikanan, pengawasan, pemberdayaan nelayan, dan konservasi, tetapi membutuhkan sinkronisasi antarlevel.	Kuning

Salah satu kekuatan utama adalah tersedianya pengetahuan lokal dan struktur sosial yang telah lama menopang aktivitas perikanan. Nelayan mengetahui wilayah tangkap secara rinci, mengenali karakter taka', memahami perubahan musim, serta memiliki strategi adaptasi terhadap perubahan ketersediaan komoditas.

Namun, pengetahuan tersebut sebagian besar masih tersimpan sebagai pengetahuan individual dan kolektif informal. Belum seluruhnya diterjemahkan menjadi data, aturan, atau keputusan pengelolaan.

Kesenjangan penting lainnya adalah belum adanya sistem monitoring perikanan yang kontinu. Diagnosa ini telah menghasilkan gambaran baseline, tetapi pengelolaan adaptif membutuhkan data yang dikumpulkan secara berkala. Kebutuhan penguatan sistem data dan keterlibatan masyarakat dalam monitoring juga teridentifikasi dalam proses perencanaan implementasi program.

Dari sisi kelembagaan, tantangannya bukan semata-mata “tidak ada organisasi”, tetapi belum adanya keterhubungan antara kelembagaan yang tersedia dengan fungsi pengelolaan sumber daya. Kelompok nelayan, Pokmaswas, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan aktor lainnya memiliki fungsi masing-masing, tetapi belum berada dalam satu mekanisme yang secara rutin melakukan pembelajaran, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan.

Hal serupa terjadi pada para pihak. BAB 3 menunjukkan bahwa terdapat banyak aktor yang dapat berkontribusi. Dengan demikian, kebutuhan ke depan bukan sekadar menambah jumlah aktor, tetapi menghubungkan kewenangan, pengetahuan, sumber daya, dan kepentingan mereka dalam mekanisme kolaborasi yang jelas.

4.3. Aspek Kesiapan Pelaksanaan (*Implementation*)

Aspek kesiapan pelaksanaan menilai sejauh mana modal sosial, pengetahuan, kelembagaan, dan dukungan para pihak dapat diterjemahkan menjadi tindakan pengelolaan yang dapat dilaksanakan.

Diagnosa pada aspek ini penting karena adanya motivasi dan kondisi pendukung belum tentu menghasilkan pengelolaan yang efektif apabila masyarakat dan para pihak belum memiliki mekanisme, kapasitas, data, dan tahapan kerja yang jelas.

Tabel 15. Diagnosa Faktor Kunci Kesiapan Pelaksanaan

Kriteria Pendukung	Kondisi/Faktor Kunci	Status
Data dasar pengelolaan	Profil awal mengenai sistem perikanan, wilayah tangkap, komoditas, rantai pasok, tata kelola, dan para pihak telah tersedia sebagai baseline awal.	Hijau
Kapasitas monitoring	Kapasitas masyarakat untuk melakukan pencatatan dan monitoring perikanan secara sistematis masih perlu dibangun dan diperkuat.	Kuning
Data tren perikanan gurita	Belum tersedia rangkaian data jangka waktu yang memadai untuk membaca tren CPUE, ukuran tangkapan, musim, dan perubahan stok gurita.	Merah
Organisasi pengelola	Belum terdapat forum atau kelembagaan pengelola yang memiliki mandat, struktur,	Merah

	pembagian peran, dan mekanisme pengambilan keputusan yang disepakati.	
Kesepakatan pengelolaan	Belum terdapat kesepakatan pengelolaan perikanan gurita yang mengatur wilayah, waktu, aturan pemanfaatan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi.	Merah
Kapasitas kepemimpinan lokal	Terdapat tokoh masyarakat dan individu potensial yang dapat menjadi penggerak, tetapi proses identifikasi, penguatan kapasitas, dan regenerasi kepemimpinan masih diperlukan.	Kuning
Pengalaman pengelolaan berbasis komunitas	Belum terdapat sistem pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat yang berjalan secara terstruktur di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang.	Merah
Peluang pembelajaran dari lokasi lain	Terdapat pengalaman pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat di lokasi lain yang dapat menjadi sumber pembelajaran, dengan tetap menyesuaikan konteks Pulau Sembilan.	Hijau
Kesiapan kolaborasi multipihak	Aktor potensial telah teridentifikasi, tetapi mekanisme koordinasi, pembagian peran, dan pengambilan keputusan bersama masih perlu dibangun.	Kuning
Dukungan sosial terhadap proses pengelolaan	Terdapat kepentingan dan kebutuhan masyarakat terhadap keberlanjutan sumber daya, tetapi pilihan bentuk pengelolaan harus tetap dibangun melalui proses partisipatif dan persetujuan masyarakat.	Kuning

Kesenjangan terbesar pada aspek pelaksanaan berada pada jarak antara pengetahuan dan tindakan pengelolaan.

Masyarakat mengetahui wilayah tangkap. Masyarakat mengenali musim dan komoditas. Terdapat pengetahuan mengenai perubahan sumber daya. Para pihak telah dapat diidentifikasi. Namun, belum terdapat mekanisme yang secara sistematis mengubah seluruh informasi tersebut menjadi siklus: data → pembelajaran → kesepakatan → pelaksanaan → monitoring → evaluasi → penyesuaian pengelolaan.

Karena itu, pengembangan pengelolaan perikanan tidak tepat apabila langsung dimulai dengan menetapkan aturan atau mereplikasi suatu model dari lokasi lain. Proses perlu dimulai dari penguatan kapasitas masyarakat, pengumpulan dan pembacaan data bersama, pembelajaran mengenai kondisi sumber daya, serta pembangunan kesepahaman mengenai masalah yang ingin diselesaikan.

Pengalaman pengelolaan dari lokasi lain dapat menjadi sumber pembelajaran, tetapi bukan model yang dipindahkan secara langsung. Dalam perencanaan implementasi, pembelajaran dari pengalaman sebelumnya juga menekankan pentingnya bekerja bersama masyarakat, mengenali masalah dan kebutuhan, mengidentifikasi tokoh kunci dan calon *champion*, memperkuat monitoring, serta menjadikan profil perikanan sebagai rujukan dalam pengembangan tata kelola.



Gambar 18. Permukiman masyarakat pesisir di Pulau Kambuno

4.4. Sintesis Diagnosa Faktor-Faktor Kunci

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, kondisi pengelolaan perikanan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang dapat digambarkan sebagai kondisi yang memiliki modal sosial, pengetahuan, ekonomi, dan kelembagaan yang cukup kuat, tetapi belum terkonsolidasi menjadi sistem pengelolaan perikanan yang terstruktur.

Tabel 16. Sintesis Diagnosa Faktor-Faktor Kunci Pengelolaan Perikanan

Faktor Kunci	Modal/Kondisi yang Tersedia	Kesenjangan Utama	Implikasi Pengelolaan
Ketergantungan dan kepentingan terhadap sumber daya	Perikanan merupakan sumber penghidupan utama dan masyarakat memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutannya.	Kepentingan masih lebih banyak diwujudkan melalui strategi usaha individual.	Pengelolaan harus memberikan hubungan yang jelas antara konservasi sumber daya dan manfaat bagi penghidupan.
Pengetahuan lokal	Pengetahuan mengenai musim, taka', wilayah tangkap, komoditas, dan kondisi laut tersedia kuat di masyarakat.	Belum terintegrasi secara sistematis dengan data monitoring dan proses pengambilan keputusan.	Menggabungkan ilmu kampung dan ilmu ilmiah sebagai basis pembelajaran dan keputusan.
Data dan monitoring	Baseline awal telah tersedia melalui diagnosa perikanan.	Belum tersedia monitoring kontinu mengenai tangkapan, ukuran, upaya, lokasi, dan nilai ekonomi.	Membangun monitoring partisipatif sebagai fondasi pengelolaan adaptif.
Kelembagaan lokal	Terdapat kelompok, Pokmaswas, tokoh masyarakat, punggawa, dan	Belum terdapat kelembagaan yang secara khusus mengintegrasikan	Memperkuat kelembagaan yang ada dan membangun mekanisme pengelolaan

	struktur sosial lokal.	fungsi pengelolaan.	yang representatif.
Aturan pengelolaan	Terdapat norma sosial dan kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan sumber daya.	Belum terdapat kesepakatan pengelolaan yang operasional dan dijalankan bersama.	Aturan perlu lahir dari data, pembelajaran, dan kesepakatan masyarakat, kemudian diperkuat sesuai kebutuhan.
Wilayah tangkap bersama dan konflik	Masyarakat memiliki pengetahuan rinci mengenai wilayah pemanfaatan.	Pemanfaatan oleh banyak kelompok nelayan, termasuk dari luar wilayah, dapat menimbulkan tekanan dan konflik.	Membutuhkan dialog lintas pengguna, kejelasan pengaturan, dan penguatan pengawasan.
Rantai pasok dan punggawa-sawi	Pasar tersedia dan rantai distribusi telah terbentuk. Punggawa membantu akses modal dan pemasaran.	Ketergantungan modal dapat membatasi fleksibilitas sebagian nelayan dalam pemasaran dan posisi tawar.	Pelaku rantai pasok harus dilibatkan sebagai bagian dari solusi, bukan diposisikan semata sebagai masalah.
Peran perempuan	Perempuan berperan dalam pra-penangkapan, penjualan, rumput laut, ekonomi rumah tangga, bahkan penangkapan.	Peran dalam pengambilan keputusan pengelolaan belum terstruktur.	Memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna dalam proses pengelolaan.
Kolaborasi para pihak	Banyak aktor dengan kewenangan, pengetahuan, jaringan, dan sumber daya yang	Belum terdapat mekanisme kolaborasi yang rutin dan terstruktur.	Membangun mekanisme pengelolaan bersama dengan pembagian peran sesuai

	relevan telah teridentifikasi.		kewenangan dan kapasitas.
Kapasitas pelaksanaan	Terdapat tokoh kunci, pengetahuan lokal, pengalaman organisasi, dan peluang pembelajaran dari lokasi lain.	Belum terdapat siklus pengelolaan adaptif yang berjalan.	Penguatan kapasitas harus berjalan bersamaan dengan praktik nyata pengelolaan.

Hasil diagnosa memperlihatkan bahwa persoalan utama pengelolaan perikanan bukan karena tidak adanya modal untuk memulai pengelolaan, melainkan karena modal-modal tersebut belum terhubung.

- Masyarakat memiliki pengetahuan, tetapi belum didukung monitoring yang kontinu.
- Terdapat kepentingan menjaga sumber daya, tetapi belum sepenuhnya menjadi kesepakatan kolektif.
- Terdapat kelompok dan tokoh lokal, tetapi belum terbentuk mekanisme pengelolaan yang menghubungkan mereka.
- Terdapat pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, tetapi koordinasi dan pembagian peran pengelolaan belum terstruktur.
- Terdapat pasar dan rantai pasok, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bagian dari instrumen pengelolaan.
- Terdapat pengalaman pengelolaan dari wilayah lain, tetapi penerapannya harus dibangun berdasarkan konteks sosial, ekologi, ekonomi, dan kelembagaan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang.

Dengan demikian, faktor kunci yang perlu dijawab bukan sekadar “bagaimana mengatur penangkapan gurita”, tetapi bagaimana membangun sistem yang memungkinkan masyarakat dan para pihak menghasilkan pengetahuan bersama, membuat keputusan berdasarkan data, menyepakati aturan, menjalankannya, memantau hasilnya, dan menyesuaikan pengelolaan berdasarkan pembelajaran.

Diagnosa ini menjadi dasar bagi penyusunan BAB 5. STRATEGI DAN PETA JALAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PERIKANAN, sehingga strategi yang dirumuskan tidak berdiri sebagai daftar kegiatan program, tetapi secara langsung menjawab kesenjangan yang ditemukan dalam kondisi baseline.

BAB 5. STRATEGI DAN PETA JALAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PERIKANAN

Strategi pengembangan pengelolaan perikanan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang dirumuskan berdasarkan hasil diagnosa kondisi baseline dan faktor-faktor kunci pengelolaan pada bab sebelumnya. Strategi ini tidak dimaksudkan sebagai rencana kegiatan program yang bersifat tetap, tetapi sebagai arah pengembangan pengelolaan yang dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dan para pihak dalam membangun tata kelola perikanan secara bertahap, adaptif, dan berbasis pembelajaran.

Hasil diagnosa menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sejumlah modal penting, antara lain ketergantungan dan kepentingan yang kuat terhadap keberlanjutan sumber daya, pengetahuan lokal mengenai wilayah dan sumber daya perikanan, struktur sosial dan kelembagaan lokal, rantai pasar yang telah terbentuk, serta keberadaan berbagai pihak yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk mendukung pengelolaan.

Namun, modal tersebut belum sepenuhnya terhubung dalam suatu sistem pengelolaan. Data perikanan belum dikumpulkan secara konsisten, mekanisme pengambilan keputusan bersama belum terbentuk secara kuat, aturan pengelolaan spesifik belum tersedia, pengawasan masih menghadapi keterbatasan, dan kolaborasi antaraktor belum berjalan dalam mekanisme pengelolaan yang terstruktur.

Karena itu, pengembangan pengelolaan perlu dilakukan melalui proses yang menghubungkan data dan pengetahuan, peningkatan kapasitas, kelembagaan, kesepakatan pengelolaan, implementasi, monitoring, serta pembelajaran adaptif.

5.1. Arah Pengembangan Pengelolaan Perikanan

Arah pengembangan pengelolaan perikanan adalah membangun sistem pengelolaan yang mampu menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem sebagai basis penghidupan masyarakat, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama serta menghubungkan dukungan pemerintah, pengetahuan, pengawasan, dan rantai pasar.

Pengembangan tersebut didasarkan pada beberapa prinsip utama:

1. Berbasis masyarakat, dengan menempatkan nelayan dan masyarakat pengguna sumber daya sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran, perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi, monitoring, dan evaluasi.
2. Berbasis data dan pengetahuan, dengan menggabungkan pengetahuan lokal masyarakat, hasil monitoring perikanan, informasi ilmiah, dan pengalaman pengelolaan sebagai dasar pengambilan keputusan.
3. Partisipatif dan inklusif, dengan memastikan keterlibatan kelompok yang berbeda dalam sistem perikanan, termasuk nelayan skala kecil, perempuan, kelompok nelayan, tokoh masyarakat, pelaku rantai pasok, dan kelompok masyarakat lainnya.
4. Kolaboratif dan sesuai kewenangan, dengan menghubungkan masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan provinsi, lembaga pengawasan, akademisi, pelaku pasar, dan pihak lainnya sesuai mandat dan kapasitas masing-masing.
5. Bertahap dan adaptif, dengan mengembangkan pengelolaan berdasarkan proses pembelajaran, monitoring, evaluasi, dan penyesuaian terhadap perubahan kondisi sumber daya maupun sosial-ekonomi.
6. Berorientasi pada keberlanjutan sumber daya dan penghidupan, sehingga upaya menjaga sumber daya tidak dipisahkan dari kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada perikanan.

Perikanan gurita dapat menjadi salah satu pintu masuk pengembangan pengelolaan karena merupakan komoditas bernilai ekonomi, ditangkap oleh nelayan skala kecil, memiliki keterkaitan kuat dengan habitat terumbu karang, serta memungkinkan perubahan kondisi perikanan dipantau melalui data hasil tangkapan dan ukuran individu.

Namun, pengelolaan tidak perlu dibatasi hanya pada gurita. Sistem perikanan masyarakat bersifat multi-komoditas dan menggunakan ruang perairan yang sama. Karena itu, pembelajaran dari pengelolaan gurita dapat menjadi dasar untuk memperkuat tata kelola sumber daya perikanan dan wilayah secara lebih luas.

5.2. Strategi Pengembangan Pengelolaan Perikanan

Berdasarkan hasil diagnosa, terdapat enam strategi utama yang saling berkaitan.

Strategi 1 — Membangun Basis Data dan Sistem Monitoring Perikanan Berbasis Masyarakat

Faktor Kunci yang Dijawab

Belum tersedianya data perikanan yang dikumpulkan secara kontinu menjadi salah satu kesenjangan utama dalam kondisi baseline. Informasi mengenai wilayah tangkap, musim, komoditas, alat tangkap, rantai pasok, dan tata kelola telah tersedia melalui proses diagnosa, tetapi belum tersedia rangkaian data yang cukup untuk membaca perubahan kondisi perikanan dari waktu ke waktu.

Arah Strategi

Membangun sistem monitoring sederhana dan partisipatif yang memungkinkan masyarakat menghasilkan, memahami, dan menggunakan data sebagai dasar pembelajaran dan pengambilan keputusan.

Monitoring perikanan gurita dapat menjadi titik awal dengan mencatat sekurang-kurangnya jumlah tangkapan, berat dan/atau ukuran individu, lokasi penangkapan, waktu penangkapan, alat tangkap, upaya penangkapan, serta harga penjualan.

Data tidak hanya dikumpulkan untuk kepentingan dokumentasi, tetapi perlu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk informasi yang mudah dipahami sehingga dapat digunakan untuk membaca perubahan sumber daya.

Hasil yang Diharapkan

Terbangunnya sistem data yang memungkinkan masyarakat dan para pihak menjawab pertanyaan mendasar seperti:

- Apakah hasil tangkapan berubah?
- Apakah ukuran gurita berubah?
- Kapan dan di mana hasil tangkapan lebih tinggi?
- Bagaimana perubahan upaya penangkapan?
- Apakah tindakan pengelolaan memberikan perubahan terhadap kondisi perikanan?

Strategi 2 — Memperkuat Kapasitas, Kepemimpinan Lokal, dan Pembelajaran Bersama

Faktor Kunci yang Dijawab

Masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang kuat, tetapi kapasitas untuk mengubah pengetahuan dan data menjadi keputusan pengelolaan masih perlu diperkuat. Selain itu, keberlanjutan pengelolaan membutuhkan individu dan kelompok lokal yang mampu menjadi penggerak proses.

Arah Strategi

Penguatan kapasitas tidak hanya dilakukan melalui pelatihan teknis, tetapi melalui proses pembelajaran yang menghubungkan pengalaman masyarakat dengan informasi baru dan praktik pengelolaan.

Pembelajaran dapat mencakup ekologi sumber daya dan habitat, perikanan gurita, monitoring, analisis sederhana data perikanan, tata kelola, kepemimpinan, penyelesaian konflik, pengawasan, rantai nilai, serta hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya.

Identifikasi dan penguatan tokoh kunci atau penggerak lokal penting dilakukan agar proses pengelolaan tidak sepenuhnya bergantung pada fasilitator atau pihak eksternal.

Hasil yang Diharapkan

Munculnya individu dan kelompok masyarakat yang mampu: memahami kondisi sumber daya → membaca data → memfasilitasi diskusi → membangun kesepakatan → menjalankan tindakan → mengevaluasi hasil.

Strategi 3 — Memperkuat Kelembagaan dan Mekanisme Pengelolaan Bersama

Faktor Kunci yang Dijawab

Terdapat berbagai kelompok, Pokmaswas, tokoh masyarakat, Pemerintah Desa, serta struktur sosial lokal, tetapi belum terdapat mekanisme yang secara khusus menghubungkan aktor-aktor tersebut dalam proses pengelolaan perikanan secara terstruktur.

Arah Strategi

Pengembangan kelembagaan tidak harus selalu dimulai dengan membentuk organisasi baru. Langkah awal adalah memetakan fungsi kelembagaan yang telah tersedia dan menentukan mekanisme yang paling sesuai untuk menjalankan fungsi pengelolaan.

Kelembagaan pengelolaan sekurang-kurangnya perlu mampu menjalankan fungsi: representasi masyarakat, pembelajaran dan penggunaan data, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kesepakatan, monitoring, pengawasan, penyelesaian persoalan, serta evaluasi.

Representasi perlu memperhatikan keterlibatan nelayan dari kedua pulau, kelompok nelayan yang berbeda, perempuan, tokoh masyarakat, serta kelompok lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan sumber daya.

Hubungan antara kelembagaan masyarakat dengan Pemerintah Desa, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, dan pihak lain perlu dibangun sesuai kewenangan masing-masing.

Hasil yang Diharapkan

Terbangunnya mekanisme pengelolaan yang memiliki legitimasi sosial, representatif, memiliki pembagian peran yang jelas, dan mampu menghubungkan masyarakat dengan sistem pemerintahan serta para pihak lainnya.

Strategi 4 — Mengembangkan Kesepakatan dan Praktik Pengelolaan Berbasis Data

Faktor Kunci yang Dijawab

Belum terdapat aturan pengelolaan perikanan gurita yang secara spesifik mengatur pemanfaatan sumber daya berdasarkan data dan kesepakatan masyarakat.

Arah Strategi

Pilihan tindakan pengelolaan perlu dikembangkan melalui proses partisipatif berdasarkan hasil monitoring, pengetahuan masyarakat, kondisi habitat, karakter perikanan, serta pembelajaran dari praktik pengelolaan di wilayah lain.

Pilihan tersebut dapat mencakup pengaturan wilayah, waktu, ukuran tangkapan, alat atau praktik penangkapan, perlindungan habitat penting, atau bentuk pengelolaan lainnya yang dinilai sesuai berdasarkan hasil pembelajaran bersama.

Salah satu pilihan yang dapat dipelajari adalah sistem pengelolaan berbasis penutupan sementara atau buka–tutup, khususnya pada perikanan gurita. Namun, sistem tersebut tidak ditetapkan sejak awal sebagai satu-satunya pilihan. Penerapannya perlu didasarkan pada data, kesesuaian sosial-ekologi, kesepakatan masyarakat, kejelasan wilayah, kesiapan kelembagaan, serta mekanisme monitoring dan pengawasan.

Setiap aturan atau kesepakatan perlu menjawab secara jelas: apa yang diatur → mengapa perlu diatur → siapa yang terikat → di wilayah mana → berapa lama → siapa yang memantau → bagaimana pelanggaran ditangani → kapan aturan dievaluasi.

Hasil yang Diharapkan

Terbentuknya tindakan pengelolaan yang tidak sekadar berasal dari instruksi eksternal, tetapi dipahami, disepakati, dijalankan, dan dievaluasi oleh masyarakat bersama para pihak terkait.

Strategi 5 — Memperkuat Pengawasan dan Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Bersama

Faktor Kunci yang Dijawab

Wilayah perikanan Pulau Sembilan merupakan ruang yang digunakan oleh berbagai kelompok nelayan. Beberapa taka', terutama wilayah dengan sumber daya yang tinggi, dimanfaatkan oleh nelayan lokal maupun nelayan dari luar wilayah.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan tekanan terhadap sumber daya dan menimbulkan konflik. Pada saat yang sama, masyarakat juga mengidentifikasi praktik penangkapan merusak dan keterbatasan kemampuan pengawasan.

Arah Strategi

Pengawasan perlu dibangun melalui hubungan antara pemantauan berbasis masyarakat dan sistem pengawasan formal.

Pokmaswas dan masyarakat dapat berperan dalam pemantauan, dokumentasi, dan pelaporan, tetapi penanganan pelanggaran yang membutuhkan kewenangan formal perlu terhubung dengan lembaga yang memiliki mandat pengawasan dan penegakan hukum.

Untuk wilayah yang digunakan bersama, pendekatan pengelolaan tidak dapat hanya berbasis batas administratif desa. Dialog dan koordinasi dengan pengguna dari wilayah lain perlu dikembangkan apabila keputusan pengelolaan berpotensi memengaruhi akses terhadap wilayah tangkap bersama.

Hasil yang Diharapkan

Terbangunnya mekanisme yang lebih jelas untuk: pemantauan → dokumentasi → pelaporan → koordinasi → tindak lanjut → pembelajaran pencegahan konflik.

Strategi 6 — Menghubungkan Pengelolaan dengan Rantai Nilai dan Insentif Ekonomi

Faktor Kunci yang Dijawab

Rantai pasok telah terbentuk, tetapi posisi ekonomi nelayan dipengaruhi oleh hubungan permodalan, kualitas hasil, harga, akses pasar, serta hubungan dengan punggawa dan pengepul.

Keberlanjutan pengelolaan akan sulit dipertahankan apabila tindakan menjaga sumber daya hanya menghasilkan tambahan pembatasan bagi nelayan tanpa manfaat yang dapat dirasakan.

Arah Strategi

Pengembangan pengelolaan perlu dihubungkan dengan perbaikan aspek ekonomi melalui peningkatan kualitas penanganan hasil tangkapan, transparansi informasi harga, efisiensi rantai pasok, peningkatan posisi tawar, serta penjangkauan akses pasar yang dapat memberikan penghargaan terhadap praktik perikanan yang lebih baik.

Punggawa dan pengepul tidak diposisikan semata sebagai bagian dari persoalan. Mereka merupakan aktor penting karena memiliki fungsi dalam pembiayaan, pengumpulan, transportasi, dan pemasaran.

Karena itu, perubahan sistem perlu melibatkan mereka dalam mencari model yang dapat memberikan manfaat bagi nelayan sekaligus tetap realistis terhadap struktur ekonomi lokal.

Hasil yang Diharapkan

Terbangunnya hubungan yang lebih kuat antara: sumber daya yang dikelola dengan baik → kualitas produk → akses dan informasi pasar → nilai ekonomi → insentif untuk mempertahankan praktik pengelolaan.

5.3. Formulasi Strategi Berdasarkan Hasil Diagnosa

Strategi pengembangan dirumuskan dengan menghubungkan langsung antara faktor kunci, kondisi baseline, kebutuhan perubahan, dan arah intervensi.

Tabel 17. Formulasi Strategi Pengembangan Pengelolaan Perikanan

Faktor Kunci/Kesenjangan	Modal yang Tersedia	Perubahan yang Dibutuhkan	Strategi
Data perikanan belum tersedia secara kontinu	Pengetahuan lokal dan baseline awal tersedia	Data dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan secara berkala	Membangun basis data dan monitoring berbasis masyarakat
Pengetahuan belum sepenuhnya menjadi tindakan kolektif	Pengetahuan lokal dan kepentingan menjaga sumber daya relatif kuat	Masyarakat mampu membaca kondisi dan mengambil keputusan bersama	Penguatan kapasitas, kepemimpinan lokal, dan pembelajaran
Kelembagaan pengelolaan belum terstruktur	Kelompok, Pokmaswas, tokoh lokal, dan Pemerintah Desa tersedia	Fungsi dan hubungan antaraktor terhubung dalam mekanisme pengelolaan	Penguatan kelembagaan dan mekanisme pengelolaan bersama
Belum terdapat aturan pengelolaan spesifik	Terdapat kebutuhan terhadap pengaturan sumber daya	Tersedia kesepakatan yang berbasis data dan diterima masyarakat	Pengembangan kesepakatan dan praktik pengelolaan berbasis data
Tekanan pemanfaatan, konflik ruang, dan praktik merusak	Pengetahuan wilayah dan aktor pengawasan tersedia	Monitoring masyarakat terhubung dengan pengawasan formal dan koordinasi lintas wilayah	Penguatan pengawasan dan pengelolaan pemanfaatan ruang bersama
Manfaat ekonomi pengelolaan belum terhubung dengan pasar	Rantai pasok dan pasar telah tersedia	Praktik pengelolaan memberikan peluang manfaat ekonomi yang lebih baik	Penguatan rantai nilai dan insentif ekonomi

Formulasi tersebut menunjukkan bahwa strategi tidak berdiri sendiri. Monitoring menghasilkan data; data menjadi bahan pembelajaran; pembelajaran memperkuat kapasitas; kapasitas mendukung kelembagaan; kelembagaan memungkinkan kesepakatan; kesepakatan diterapkan dan diawasi; hasilnya kembali dimonitor dan dievaluasi.

Dengan demikian, pengelolaan merupakan siklus pembelajaran, bukan rangkaian kegiatan yang berhenti setelah suatu aturan ditetapkan.

5.4. Peta Jalan Pengembangan Pengelolaan Perikanan

Pengembangan pengelolaan perlu dilakukan secara bertahap karena kondisi baseline menunjukkan bahwa fondasi pengelolaan masih perlu dibangun sebelum sistem yang lebih kompleks dapat diterapkan.

Peta jalan berikut merupakan arah perkembangan yang diharapkan, bukan jadwal kegiatan yang kaku. Kecepatan setiap tahapan bergantung pada kesiapan masyarakat, perkembangan data, kapasitas kelembagaan, kondisi sumber daya, dukungan para pihak, serta hasil evaluasi pada setiap tahapan.

Tahap 1 — Membangun Fondasi: Data, Kepercayaan, dan Kapasitas

Fokus utama: memahami sumber daya dan membangun kapasitas untuk mengelolanya.

Prioritas pengembangan meliputi penguatan baseline, pembangunan sistem monitoring perikanan, peningkatan kapasitas masyarakat, identifikasi dan penguatan penggerak lokal, serta pengembangan ruang pembelajaran bersama.

Pada tahap ini, masyarakat mulai mengembangkan kebiasaan untuk tidak hanya membicarakan kondisi perikanan berdasarkan persepsi, tetapi juga menggunakan data sebagai bahan refleksi.

Hasil antara yang diharapkan: Data Tersedia → Masyarakat Mampu Membaca Data → Masalah dan Potensi Dipahami Bersama

Tahap 2 — Konsolidasi: Kelembagaan dan Kesepakatan Pengelolaan

Fokus utama: mengubah pembelajaran menjadi kapasitas kolektif untuk mengambil keputusan.

Pada tahap ini, fungsi kelembagaan pengelolaan diperkuat, representasi masyarakat dikonsolidasikan, hubungan dengan pemerintah dan para pihak dibangun, serta pilihan pengelolaan mulai dibahas berdasarkan data.

Kesepakatan pengelolaan dapat dikembangkan secara bertahap, termasuk penentuan wilayah, aturan pemanfaatan, mekanisme monitoring, pengawasan, serta evaluasi.

Hasil antara yang diharapkan: Data + Pengetahuan → Kelembagaan → Kesepakatan Pengelolaan

Tahap 3 — Implementasi: Pengelolaan Adaptif dan Pengawasan

Fokus utama: menjalankan dan menguji tindakan pengelolaan.

Kesepakatan mulai diterapkan pada wilayah atau perikanan yang telah disepakati. Monitoring dilakukan untuk melihat perubahan ekologis, perikanan, sosial, dan ekonomi.

Apabila dipilih masyarakat berdasarkan hasil pembelajaran dan data, praktik seperti buka–tutup perikanan gurita dapat diuji dan dievaluasi sebagai salah satu instrumen pengelolaan.

Pengawasan masyarakat diperkuat dan dihubungkan dengan mekanisme formal. Konflik atau persoalan implementasi menjadi bagian dari proses evaluasi.

Hasil antara yang diharapkan: Kesepakatan → Implementasi → Monitoring → Evaluasi → Penyesuaian

Tahap 4 — Penguatan Manfaat dan Keberlanjutan Sistem

Fokus utama: memastikan pengelolaan memberikan manfaat dan mampu bertahan.

Pengelolaan yang menunjukkan hasil positif diperkuat melalui kelembagaan, legitimasi aturan, integrasi dengan kebijakan, penguatan rantai nilai, peningkatan posisi tawar, serta pengembangan insentif ekonomi.

Pendanaan dan sumber daya untuk monitoring, kelembagaan, dan pengawasan perlu secara bertahap tidak hanya bergantung pada dukungan proyek.

Hasil antara yang diharapkan: Sumber Daya Terkelola → Manfaat Ekologi Dan Ekonomi → Insentif Menjaga Pengelolaan → Keberlanjutan

Tahap 5 — Pembelajaran, Pengembangan, dan Replikasi

Fokus utama: memperluas pembelajaran berdasarkan bukti.

Pengalaman pengelolaan didokumentasikan dan digunakan untuk memperbaiki sistem. Praktik yang terbukti efektif dapat dikembangkan pada wilayah atau komoditas lain berdasarkan kesesuaian kondisi, bukan melalui replikasi mekanis.

Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang dapat berkembang menjadi ruang pembelajaran mengenai pengelolaan perikanan skala kecil berbasis masyarakat di Pulau Sembilan dan wilayah Teluk Bone yang lebih luas.

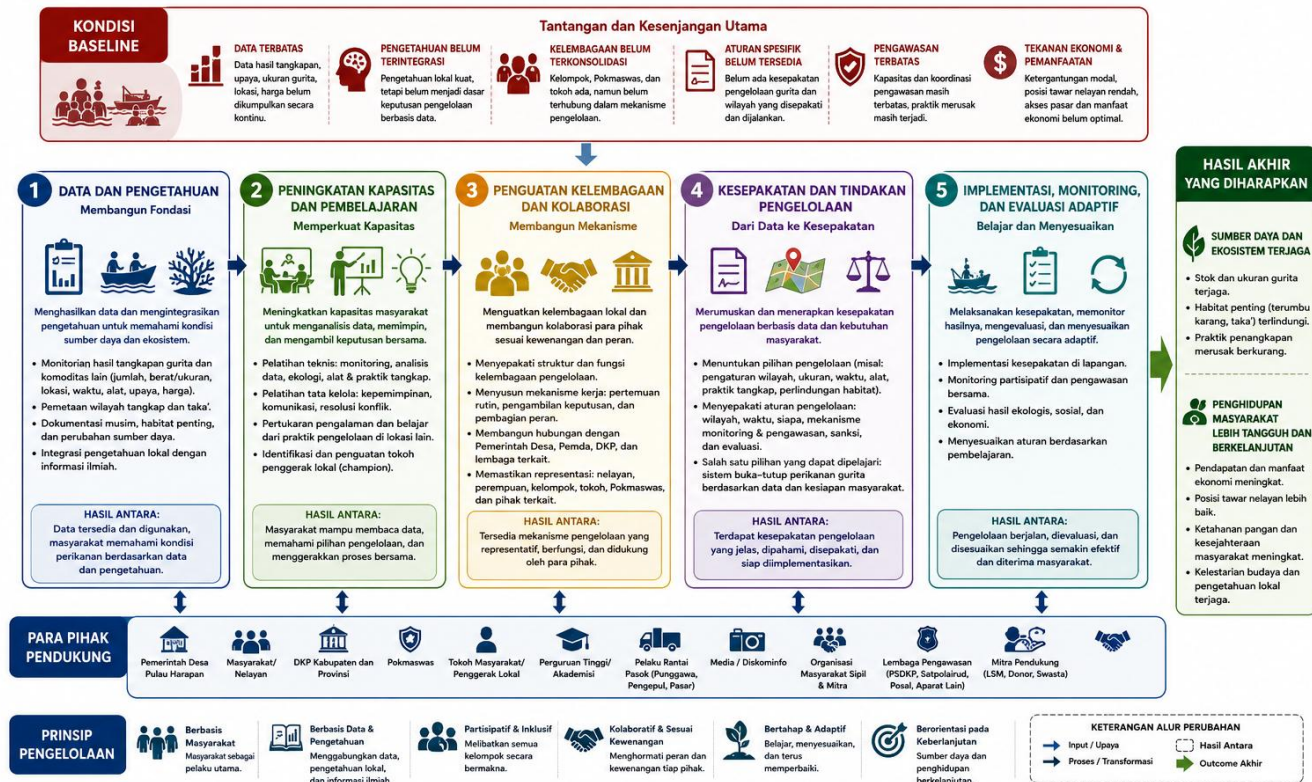
Tabel 18. Peta Jalan Pengembangan Pengelolaan Perikanan

Tahap	Fokus	Agenda Utama	Kondisi yang Diharapkan
1. Fondasi	Data, kapasitas, dan kepercayaan	Baseline, monitoring, pembelajaran, penguatan penggerak lokal	Masyarakat memahami kondisi perikanan berdasarkan data dan pengetahuan
2. Konsolidasi	Kelembagaan dan kesepakatan	Penguatan kelembagaan, kolaborasi para pihak, formulasi pilihan dan aturan pengelolaan	Terdapat mekanisme pengambilan keputusan dan kesepakatan yang legitim
3. Implementasi	Tindakan pengelolaan adaptif	Penerapan kesepakatan, monitoring, pengawasan, evaluasi	Tindakan pengelolaan berjalan dan dapat dievaluasi berdasarkan hasil
4. Keberlanjutan	Manfaat, legitimasi, dan insentif	Penguatan rantai nilai, kebijakan, pembiayaan, kelembagaan dan pengawasan	Pengelolaan memberikan manfaat dan memiliki dukungan untuk bertahan
5. Pengembangan	Pembelajaran dan replikasi	Dokumentasi, adaptasi, pengembangan wilayah/komoditas	Praktik baik berkembang berdasarkan bukti dan kesesuaian konteks

5.5. Kerangka Perubahan Pengelolaan Perikanan

KERANGKA PERUBAHAN PENGELOLAAN PERIKANAN PULAU KAMBUNO DAN PULAU LIANG-LIANG

Perubahan menuju pengelolaan perikanan berbasis masyarakat, adaptif, dan berkelanjutan



Gambar 19. Kerangka Perubahan Pengelolaan Perikanan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang

Kerangka perubahan menggambarkan proses transformasi dari kondisi baseline perikanan yang belum sepenuhnya terkelola secara terstruktur menuju pengelolaan perikanan berbasis masyarakat yang adaptif dan berkelanjutan. Kerangka ini disusun berdasarkan hasil diagnosa terhadap kondisi perikanan, tata kelola, rantai pasok, kelembagaan, serta para pihak di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang.

Kerangka tidak menggambarkan proses yang berhenti pada pembentukan kelembagaan atau penerapan suatu aturan pengelolaan. Perubahan dibangun melalui rangkaian yang saling berhubungan, yaitu data dan pengetahuan → peningkatan kapasitas dan pembelajaran → penguatan kelembagaan dan kolaborasi → kesepakatan dan tindakan pengelolaan → implementasi, monitoring, dan evaluasi adaptif, yang pada akhirnya diarahkan pada terjaganya sumber daya dan ekosistem serta semakin tangguh dan berkelanjutannya penghidupan masyarakat.

Kondisi Baseline: Tantangan dan Kesenjangan Utama

Pada kondisi baseline, masyarakat telah memiliki pengetahuan, pengalaman, kelembagaan sosial, dan sistem ekonomi perikanan yang berkembang dari praktik sehari-hari. Namun, hasil diagnosa menunjukkan sejumlah kesenjangan yang membatasi berkembangnya pengelolaan secara kolektif dan berbasis data.

Data hasil tangkapan, ukuran gurita, upaya penangkapan, lokasi, harga, dan perubahan sumber daya belum dikumpulkan secara kontinu. Pengetahuan lokal mengenai musim, taka', wilayah tangkap, dan kondisi sumber daya cukup kuat, tetapi belum terintegrasi secara sistematis dengan data dan informasi ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kelembagaan seperti kelompok nelayan, Pokmaswas, tokoh masyarakat, dan Pemerintah Desa telah tersedia, tetapi belum seluruhnya terhubung dalam suatu mekanisme pengelolaan perikanan yang memiliki fungsi dan pembagian peran yang jelas. Demikian pula, belum terdapat aturan spesifik mengenai pengelolaan perikanan gurita dan wilayah yang disepakati serta dijalankan secara kolektif.

Pengawasan juga masih menghadapi keterbatasan kapasitas dan koordinasi, sementara wilayah perikanan dimanfaatkan oleh berbagai kelompok nelayan sehingga terdapat potensi tekanan sumber daya dan konflik pemanfaatan. Pada sisi ekonomi, ketergantungan terhadap modal, posisi tawar nelayan, akses pasar, serta manfaat ekonomi dari pengelolaan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.

Kondisi tersebut menjadi titik awal perubahan, tetapi tidak seluruhnya dipandang sebagai kelemahan. Pengetahuan lokal, struktur sosial, pengalaman masyarakat, rantai pasar yang telah terbentuk, serta keberadaan berbagai pemangku kepentingan merupakan modal dasar yang dapat diperkuat dan dihubungkan dalam sistem pengelolaan.

1. Data dan Pengetahuan: Membangun Fondasi Pengelolaan

Tahap pertama menempatkan data dan pengetahuan sebagai fondasi pengelolaan. Pengambilan keputusan mengenai sumber daya perlu didasarkan pada pemahaman yang memadai mengenai kondisi perikanan dan ekosistem, bukan semata-mata asumsi atau persepsi.

Monitoring hasil tangkapan menjadi salah satu instrumen utama, khususnya untuk perikanan gurita. Informasi yang dapat dicatat mencakup jumlah dan berat tangkapan, ukuran individu, lokasi dan waktu penangkapan, alat tangkap, upaya penangkapan, serta harga. Monitoring tersebut dapat dikembangkan secara bertahap untuk komoditas lain sesuai kebutuhan pengelolaan.

Data monitoring kemudian dipadukan dengan pemetaan wilayah tangkap dan taka', kalender musim, dokumentasi habitat penting, serta pengetahuan lokal masyarakat. Dengan demikian, data ilmiah dan pengetahuan masyarakat tidak ditempatkan sebagai dua sumber pengetahuan yang terpisah, tetapi saling melengkapi.

Perubahan yang diharapkan pada tahap ini adalah tersedianya data yang digunakan oleh masyarakat untuk memahami kondisi dan perubahan perikanan secara lebih objektif.

2. Peningkatan Kapasitas dan Pembelajaran: Memperkuat Kemampuan Masyarakat

Data tidak akan menghasilkan perubahan apabila masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk memahami dan menggunakannya. Karena itu, tahap kedua diarahkan pada peningkatan kapasitas dan proses pembelajaran bersama.

Penguatan kapasitas dapat mencakup monitoring dan analisis data sederhana, pemahaman ekologi dan perikanan, praktik penangkapan, kepemimpinan, komunikasi, tata kelola, serta penyelesaian konflik. Pertukaran pengetahuan dengan masyarakat atau lokasi lain yang memiliki pengalaman pengelolaan juga dapat digunakan sebagai ruang pembelajaran.

Pada tahap ini penting pula mengidentifikasi dan memperkuat tokoh kunci atau penggerak lokal (*local champions*). Mereka diharapkan tidak sekadar menjadi

penerima manfaat kegiatan, tetapi berkembang sebagai penggerak pembelajaran, komunikasi, dan pengorganisasian masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas diarahkan untuk menghasilkan perubahan dari masyarakat sebagai objek penerima informasi menjadi pelaku yang mampu memahami kondisi, menilai pilihan, dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

3. Penguatan Kelembagaan dan Kolaborasi: Membangun Mekanisme Pengelolaan

Tahap ketiga menghubungkan kapasitas masyarakat dengan kelembagaan dan para pihak yang memiliki peran dalam pengelolaan.

Penguatan kelembagaan tidak selalu berarti membentuk organisasi baru. Kelembagaan yang telah tersedia perlu terlebih dahulu dipetakan dan diperkuat berdasarkan fungsi yang dibutuhkan. Mekanisme pengelolaan setidaknya perlu mampu menjalankan fungsi pembelajaran, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, monitoring, pengawasan, penyelesaian persoalan, dan evaluasi.

Representasi juga menjadi prinsip penting. Nelayan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang, perempuan, kelompok nelayan, Pokmaswas, tokoh masyarakat, dan kelompok terkait lainnya perlu memiliki ruang yang sesuai untuk berpartisipasi.

Kelembagaan masyarakat kemudian perlu terhubung dengan Pemerintah Desa Pulau Harapan, pemerintah kabupaten dan provinsi, DKP, lembaga pengawasan, akademisi, pelaku rantai pasok, serta pihak lainnya sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing.

Hasil yang diharapkan bukan sekadar terbentuknya organisasi, tetapi berfungsinya suatu mekanisme pengelolaan yang representatif, memiliki legitimasi, dan mampu menghubungkan masyarakat dengan para pihak.

4. Kesepakatan dan Tindakan Pengelolaan: Dari Data Menjadi Keputusan

Tahap keempat merupakan proses menerjemahkan data, pengetahuan, kapasitas, dan kelembagaan menjadi kesepakatan serta tindakan nyata pengelolaan.

Pilihan pengelolaan dapat berkaitan dengan pengaturan wilayah, ukuran tangkapan, waktu penangkapan, alat atau praktik penangkapan, perlindungan habitat penting, maupun bentuk pengelolaan lainnya berdasarkan persoalan yang ingin diselesaikan.

Dalam konteks perikanan gurita, sistem buka–tutup perikanan dapat menjadi salah satu pilihan yang dipelajari. Namun, buka–tutup tidak ditempatkan sebagai hasil

yang telah ditentukan sejak awal. Pilihan tersebut perlu lahir dari proses pembelajaran, ketersediaan data, kesesuaian kondisi sosial-ekologi, dan kesepakatan masyarakat.

Kesepakatan yang dikembangkan perlu memiliki kejelasan mengenai wilayah yang diatur, waktu atau periode penerapan, pihak yang terikat, mekanisme monitoring, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan evaluasi.

Dengan pendekatan tersebut, aturan tidak sekadar hadir sebagai dokumen, tetapi memiliki dasar pengetahuan dan legitimasi sosial untuk dijalankan.

5. Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi Adaptif: Belajar dan Menyesuaikan

Kesepakatan pengelolaan kemudian diterapkan dan dipantau. Tahap ini merupakan inti dari pengelolaan adaptif, karena suatu tindakan pengelolaan tidak dianggap selesai hanya karena telah dilaksanakan.

Monitoring digunakan untuk mengetahui apakah tindakan menghasilkan perubahan terhadap kondisi sumber daya, hasil tangkapan, kondisi sosial, maupun manfaat ekonomi. Hasil monitoring kemudian dibahas bersama untuk menilai efektivitas pengelolaan.

Apabila suatu aturan tidak memberikan hasil yang diharapkan, terdapat perubahan kondisi sumber daya, atau muncul persoalan baru, pengelolaan dapat disesuaikan berdasarkan hasil pembelajaran.

Dengan demikian, terbentuk siklus: **IMPLEMENTASI → MONITORING → EVALUASI → PEMBELAJARAN → PENYESUAIAN → IMPLEMENTASI KEMBALI.**

Siklus tersebut memungkinkan pengelolaan berkembang secara bertahap berdasarkan bukti dan pengalaman, bukan menjadi aturan yang bersifat statis.

Para Pihak sebagai Pendukung Seluruh Proses Perubahan

Pada bagian bawah kerangka, para pihak ditempatkan sebagai fondasi pendukung yang bekerja lintas tahapan, bukan hanya terlibat pada satu kegiatan tertentu.

Pemerintah Desa Pulau Harapan memiliki posisi penting dalam legitimasi dan tata kelola lokal. Masyarakat dan nelayan merupakan pelaku utama pengelolaan. DKP kabupaten dan provinsi berperan sesuai kewenangan dalam pembinaan, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya. Pokmaswas dan lembaga pengawasan mendukung fungsi pemantauan dan pengawasan.

Tokoh masyarakat dan penggerak lokal berperan dalam membangun legitimasi sosial dan menggerakkan proses kolektif. Perguruan tinggi dan akademisi dapat mendukung penelitian, data, dan pengetahuan ilmiah. Pelaku rantai pasok—

termasuk punggawa, pengepul, dan pasar—memiliki posisi strategis dalam hubungan antara pengelolaan dengan insentif ekonomi. Media dan Diskominfo mendukung penyebaran informasi, sedangkan organisasi masyarakat sipil dan mitra pendukung dapat berkontribusi pada fasilitasi, penguatan kapasitas, sumber daya, dan pembelajaran.

Artinya, pengelolaan tidak dibangun oleh satu lembaga, melainkan melalui pembagian fungsi berdasarkan kepentingan, kapasitas, dan kewenangan masing-masing pihak.

Prinsip yang Menjaga Arah Perubahan

Seluruh tahapan dalam kerangka dijalankan berdasarkan enam prinsip, yaitu berbasis masyarakat; berbasis data dan pengetahuan; partisipatif dan inklusif; kolaboratif dan sesuai kewenangan; bertahap dan adaptif; serta berorientasi pada keberlanjutan.

Prinsip tersebut penting karena keberhasilan pengelolaan tidak hanya ditentukan oleh *apa* tindakan yang dilakukan, tetapi juga *bagaimana* keputusan tersebut dibangun dan dijalankan.

Masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama, tetapi pengelolaan tetap harus terhubung dengan kewenangan pemerintah dan para pihak lainnya. Pengetahuan lokal dihargai, tetapi diperkuat dengan data dan informasi ilmiah. Keputusan dibuat secara partisipatif, tetapi tetap memperhatikan representasi kelompok. Pengelolaan juga tidak dipaksakan sekaligus, melainkan dikembangkan secara bertahap berdasarkan kesiapan dan pembelajaran.

Hasil Akhir yang Diharapkan

Kerangka perubahan diarahkan pada dua hasil akhir yang saling bergantung.

Pertama, sumber daya perikanan dan ekosistem terjaga, yang tercermin antara lain melalui kondisi stok dan ukuran sumber daya yang lebih baik, habitat penting seperti terumbu karang yang tetap terjaga, serta berkurangnya praktik penangkapan yang merusak.

Kedua, penghidupan masyarakat menjadi lebih tangguh dan berkelanjutan, melalui manfaat ekonomi yang lebih baik, peningkatan posisi tawar nelayan, ketahanan pangan dan kesejahteraan, serta tetap terpeliharanya pengetahuan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir.

Kedua hasil tersebut tidak dapat dipisahkan. Perlindungan sumber daya tanpa memperhatikan penghidupan masyarakat akan sulit memperoleh dukungan

jangka panjang, sementara peningkatan manfaat ekonomi tanpa menjaga sumber daya akan melemahkan basis penghidupan itu sendiri.

Dengan demikian, inti kerangka perubahan ini adalah membangun hubungan berulang:

DATA & PENGETAHUAN → KAPASITAS & PEMBELAJARAN → KELEMBAGAAN & KOLABORASI → KESEPAKATAN & TINDAKAN → IMPLEMENTASI & MONITORING → EVALUASI & ADAPTASI → SUMBER DAYA TERJAGA + PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN.

Kerangka ini sekaligus menunjukkan bahwa tujuan akhirnya bukan sekadar terbentuknya kelompok, tersusunnya aturan, atau diterapkannya buka-tutup perikanan gurita. Ukuran perubahan yang lebih mendasar adalah ketika masyarakat dan para pihak memiliki sistem yang berfungsi untuk memahami kondisi sumber daya, mengambil keputusan bersama, menjalankan tindakan, menilai hasilnya, dan terus menyesuaikan pengelolaan berdasarkan pembelajaran.

5.6. Arah Implementasi dan Prioritas Pengembangan

Berdasarkan strategi, peta jalan, dan kerangka perubahan yang telah dirumuskan, pengembangan pengelolaan perikanan di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang perlu dilakukan secara bertahap. Prioritas tidak ditentukan semata-mata berdasarkan besarnya persoalan, tetapi juga mempertimbangkan urutan perubahan yang diperlukan, kesiapan masyarakat, ketersediaan data, kapasitas kelembagaan, serta kewenangan para pihak.

Pada kondisi baseline, prioritas awal adalah membangun fondasi yang memungkinkan masyarakat dan para pihak mengambil keputusan pengelolaan secara lebih baik. Karena itu, pengumpulan data, peningkatan kapasitas, dan penguatan kelembagaan perlu berjalan lebih dahulu dan saling mendukung sebelum pilihan pengelolaan yang lebih spesifik diterapkan.

Tabel 19. Prioritas Pengembangan Pengelolaan Perikanan

Prioritas	Fokus Pengembangan	Arah Tindakan	Hasil yang Diharapkan
Prioritas 1	Data dan monitoring perikanan	Membangun monitoring partisipatif, terutama perikanan gurita; mencatat hasil tangkapan, ukuran/berat, waktu, dan harga; serta mengembangkan mekanisme pengelolaan	Tersedia data berkala yang dapat digunakan untuk memahami perubahan kondisi perikanan dan mendukung

		dan pembacaan data bersama.	keputusan pengelolaan.
Prioritas 2	Kapasitas dan pembelajaran masyarakat	Memperkuat pemahaman mengenai ekologi, perikanan, monitoring, tata kelola, serta kemampuan membaca dan menggunakan data; mengembangkan pertukaran pengetahuan lokal dan ilmiah.	Masyarakat mampu memahami kondisi sumber daya, mengenali persoalan, dan menilai pilihan pengelolaan berdasarkan data dan pengetahuan.
Prioritas 3	Penggerak dan kelembagaan lokal	Mengidentifikasi dan memperkuat tokoh/penggerak lokal; memperjelas fungsi kelompok dan kelembagaan yang tersedia; membangun mekanisme representasi dan pengambilan keputusan.	Tersedia kapasitas kepemimpinan lokal dan mekanisme kelembagaan yang mampu menggerakkan proses pengelolaan.
Prioritas 4	Kolaborasi dan pembagian peran para pihak	Menghubungkan masyarakat, Pemerintah Desa, DKP, Pokmaswas, pemerintah daerah, pengawasan, akademisi, pelaku rantai pasok, dan pihak pendukung sesuai fungsi dan kewenangan.	Terdapat pembagian peran dan mekanisme koordinasi yang mendukung pengelolaan secara kolaboratif.
Prioritas 5	Kesepakatan dan tindakan pengelolaan	Menggunakan data dan pembelajaran untuk menentukan persoalan prioritas, wilayah, pilihan tindakan, aturan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi.	Tersedia kesepakatan pengelolaan yang dipahami, diterima, dan dapat dijalankan bersama.
Prioritas 6	Pengawasan dan pengelolaan ruang bersama	Memperkuat pemantauan masyarakat, sistem pelaporan, koordinasi dengan lembaga berwenang, serta dialog terkait pemanfaatan wilayah tangkap bersama.	Pengawasan lebih terhubung dan potensi konflik serta praktik pemanfaatan yang merusak dapat ditangani lebih baik.

Prioritas 7	Rantai nilai dan manfaat ekonomi	Memperbaiki penanganan hasil, informasi pasar, posisi tawar, hubungan dengan pelaku rantai pasok, dan menjajaki insentif ekonomi bagi praktik pengelolaan yang lebih baik.	Manfaat ekonomi semakin mendukung kepatuhan dan keberlanjutan pengelolaan.
Prioritas 8	Evaluasi, adaptasi, dan pengembangan	Mengevaluasi perubahan ekologis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan; menyesuaikan pengelolaan; mendokumentasikan pembelajaran dan mengembangkan praktik yang terbukti efektif.	Terbentuk sistem pengelolaan adaptif yang mampu belajar, memperbaiki diri, dan berkembang berdasarkan bukti.

Prioritas tersebut tidak sepenuhnya berjalan secara linear. Beberapa proses dapat berlangsung bersamaan. Monitoring, misalnya, perlu dimulai sejak awal dan terus berlangsung sepanjang proses pengelolaan. Demikian pula peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, keterlibatan perempuan, dan koordinasi para pihak merupakan proses lintas tahapan.

Namun, terdapat urutan logis yang perlu dijaga. Keputusan pengelolaan sebaiknya tidak mendahului pemahaman terhadap kondisi sumber daya dan kesiapan masyarakat. Aturan yang dibangun tanpa data, proses pembelajaran, dan legitimasi sosial berisiko sulit diterapkan dan dipertahankan.

Perikanan Gurita sebagai Pintu Masuk Pengelolaan

Dalam konteks Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang, perikanan gurita memiliki karakteristik yang memungkinkan komoditas ini digunakan sebagai salah satu pintu masuk untuk membangun praktik pengelolaan berbasis masyarakat.

Gurita telah menjadi bagian dari pola perikanan masyarakat, memiliki nilai ekonomi, ditangkap menggunakan alat tangkap relatif sederhana, serta memiliki keterkaitan dengan habitat terumbu karang dan taka' yang menjadi ruang penting bagi berbagai sumber daya perikanan lainnya.

Karakter tersebut memungkinkan monitoring gurita digunakan sebagai ruang belajar awal untuk membangun hubungan antara aktivitas penangkapan, kondisi sumber daya, data, manfaat ekonomi, dan keputusan pengelolaan.

Namun, penetapan gurita sebagai pintu masuk tidak berarti seluruh sistem pengelolaan hanya diarahkan pada satu komoditas. Nelayan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang memiliki karakter perikanan multi-komoditas, dengan gurita, ikan dasar, tenggiri, mairo/teri, rumput laut, dan sumber daya lainnya yang dimanfaatkan menurut musim dan kondisi perairan.

Selain itu, taka' sebagai wilayah penangkapan merupakan ruang ekologis yang digunakan untuk berbagai komoditas dan oleh berbagai kelompok pengguna. Karena itu, pengelolaan gurita perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses yang lebih luas untuk memperkuat pengelolaan perikanan dan ruang laut berbasis masyarakat.

Buka–Tutup sebagai Salah Satu Pilihan Pengelolaan

Sistem buka–tutup dapat menjadi salah satu pilihan yang dipelajari dalam pengembangan pengelolaan perikanan gurita. Pengalaman dari wilayah lain menunjukkan bahwa pengaturan waktu dan wilayah penangkapan dapat digunakan sebagai instrumen pengelolaan apabila didukung oleh kondisi sosial, ekologis, kelembagaan, dan pengawasan yang memadai.

Namun, hasil diagnosa ini tidak secara otomatis merekomendasikan penerapan buka–tutup tanpa proses lebih lanjut.

Keputusan untuk menerapkannya perlu didasarkan pada sekurang-kurangnya:

1. tersedianya data yang cukup mengenai kondisi perikanan dan wilayah yang akan dikelola;
2. pemahaman masyarakat mengenai tujuan, manfaat, risiko, dan konsekuensi pengelolaan;
3. kesepakatan mengenai batas wilayah dan periode pengaturan;
4. kejelasan pihak yang memiliki akses dan terikat oleh kesepakatan;
5. kesiapan kelembagaan untuk menjalankan dan mengevaluasi pengelolaan;
6. mekanisme monitoring dan pengawasan yang dapat dilaksanakan; dan
7. persetujuan masyarakat yang dibangun melalui proses partisipatif.

Dengan demikian, buka–tutup ditempatkan sebagai instrumen, bukan tujuan akhir pengelolaan. Bentuk pengelolaan dapat berkembang atau berubah berdasarkan hasil monitoring dan pembelajaran.

Indikasi Perubahan yang Perlu Dipantau

Untuk mengetahui apakah proses pengembangan bergerak menuju kondisi yang diharapkan, perubahan perlu diamati tidak hanya dari jumlah kegiatan yang dilakukan, tetapi dari perubahan pada kondisi sumber daya, kapasitas masyarakat, kelembagaan, tata kelola, dan manfaat ekonomi.

Tabel 20. Indikasi Perubahan dalam Pengembangan Pengelolaan Perikanan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang

Dimensi Perubahan	Indikasi Perubahan yang Perlu Diamati
Data dan pengetahuan	Monitoring berjalan secara konsisten; data semakin lengkap; masyarakat mampu memahami dan menggunakan hasil monitoring.
Kapasitas masyarakat	Meningkatnya kemampuan masyarakat membaca kondisi sumber daya, berdiskusi berdasarkan data, dan mengambil keputusan bersama.
Kepemimpinan lokal	Muncul dan berfungsinya penggerak lokal yang mampu memfasilitasi proses tanpa ketergantungan penuh pada pihak eksternal.
Kelembagaan	Terdapat mekanisme pertemuan, pembagian peran, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan evaluasi yang berjalan.
Partisipasi dan inklusi	Nelayan dari kelompok berbeda, perempuan, dan kelompok terkait memiliki ruang yang bermakna dalam proses pengelolaan.
Aturan pengelolaan	Kesepakatan disusun berdasarkan data, dipahami oleh pengguna, dilaksanakan, dan dievaluasi secara berkala.
Pengawasan	Pemantauan dan pelaporan berjalan serta memiliki hubungan yang jelas dengan tindak lanjut sesuai kewenangan.
Kondisi perikanan	Perubahan hasil tangkapan, ukuran, upaya, musim, dan indikator lain dapat diketahui dan dianalisis dari waktu ke waktu.
Rantai nilai	Penanganan hasil membaik, informasi harga lebih tersedia, dan terdapat peluang peningkatan manfaat ekonomi bagi nelayan.
Kolaborasi	Para pihak menjalankan peran sesuai kewenangan dan berkontribusi dalam penyelesaian persoalan pengelolaan.

Indikasi tersebut belum dimaksudkan sebagai indikator kinerja program yang kaku. Indikasi ini berfungsi sebagai arah pengamatan jangka menengah dan panjang untuk menilai apakah sistem pengelolaan benar-benar mengalami perubahan.

Arah Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, pengelolaan perikanan di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang diarahkan menuju sistem pengelolaan berbasis masyarakat yang semakin mandiri, adaptif, dan berkelanjutan. Masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami kondisi sumber daya berdasarkan data dan pengetahuan, mengambil keputusan bersama, menjalankan kesepakatan pengelolaan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasilnya.

Kelembagaan lokal diharapkan mampu menjalankan fungsi pengelolaan secara berkelanjutan dengan tetap terhubung dengan pemerintah dan para pihak sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing. Dengan demikian, keberlanjutan pengelolaan tidak bergantung sepenuhnya pada keberadaan program atau fasilitasi eksternal.

Pada akhirnya, pengembangan pengelolaan diarahkan pada terciptanya sumber daya perikanan dan ekosistem yang tetap terjaga serta penghidupan masyarakat yang lebih tangguh dan berkelanjutan.



Gambar 20. Lanskap pesisir Pulau Kambuno sebagai wilayah penghidupan masyarakat nelayan

BAB 6. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Diagnosa perikanan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang memberikan gambaran kondisi awal sistem perikanan sebagai dasar bagi pengembangan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat. Hasil diagnosa menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat memiliki ketergantungan yang kuat terhadap sumber daya laut, dengan karakter perikanan skala kecil yang bersifat multi-komoditas dan adaptif terhadap musim, kondisi perairan, ketersediaan sumber daya, serta peluang ekonomi.

Gurita merupakan salah satu komoditas penting dalam sistem tersebut. Penangkapan dilakukan menggunakan alat tangkap sederhana dan memanfaatkan taka' serta habitat terumbu karang sebagai wilayah penangkapan. Meskipun dapat ditangkap hampir sepanjang tahun, hasil tangkapan berfluktuasi menurut musim dan kondisi sumber daya. Karakter tersebut menjadikan perikanan gurita potensial sebagai salah satu pintu masuk untuk membangun pembelajaran mengenai pengelolaan perikanan berbasis data.

Masyarakat memiliki pengetahuan yang kuat mengenai wilayah tangkap, musim, kondisi perairan, taka', dan sumber daya yang diperoleh melalui pengalaman antargenerasi. Namun, pengetahuan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem monitoring yang mampu menghasilkan data secara kontinu mengenai hasil tangkapan, ukuran, upaya penangkapan, lokasi, dan perubahan kondisi sumber daya. Kesenjangan data ini menjadi salah satu faktor mendasar yang perlu diperkuat agar keputusan pengelolaan dapat dibangun berdasarkan pengetahuan dan bukti yang memadai.

Dari sisi sosial-ekonomi, sistem perikanan masih dipengaruhi oleh hubungan tradisional punggawa-sawi dan peran pengepul dalam penyediaan modal, sarana produksi, serta akses pasar. Sistem tersebut memberikan kemudahan bagi nelayan dalam memperoleh modal dan menjual hasil tangkapan, tetapi pada sebagian kondisi juga membentuk keterikatan ekonomi yang dapat memengaruhi pilihan pemasaran dan posisi tawar nelayan. Perempuan memiliki peran penting dalam sistem perikanan, mulai dari mendukung persiapan melaut, aktivitas rumput laut, penjualan hasil tangkapan, pengelolaan ekonomi rumah tangga, hingga pada beberapa kasus terlibat langsung dalam penangkapan.

Rantai pasok perikanan telah terbentuk dari nelayan, pengepul tingkat pulau, pengepul tingkat Kabupaten Sinjai, hingga pasar dan pembeli pada tingkatan berikutnya. Sistem ini menunjukkan bahwa pengembangan pengelolaan perikanan

tidak dapat hanya berfokus pada aktivitas penangkapan, tetapi perlu mempertimbangkan hubungan antara sumber daya, pembiayaan, penanganan hasil, pasar, dan insentif ekonomi.

Pada aspek tata kelola, terdapat berbagai modal yang dapat mendukung pengembangan pengelolaan, seperti kelompok masyarakat, Pokmaswas, tokoh masyarakat, Pemerintah Desa, pengetahuan lokal, serta keberadaan pemerintah dan para pihak yang memiliki kewenangan dan kapasitas terkait. Namun, modal tersebut belum sepenuhnya terhubung dalam mekanisme pengelolaan yang terstruktur. Belum terdapat sistem monitoring yang berjalan secara kontinu, mekanisme pengambilan keputusan bersama yang kuat, maupun kesepakatan pengelolaan perikanan gurita yang secara khusus dibangun berdasarkan data dan dijalankan secara kolektif.

Pemanfaatan wilayah tangkap bersama oleh nelayan dari berbagai wilayah, keterbatasan pengawasan, serta keberadaan praktik pemanfaatan yang berpotensi merusak juga menunjukkan bahwa pengelolaan membutuhkan pendekatan yang melampaui batas satu kelompok atau desa. Kolaborasi masyarakat dengan pemerintah, lembaga pengawasan, pengguna sumber daya lainnya, akademisi, pelaku rantai pasok, dan pihak terkait menjadi bagian penting dalam pengembangan pengelolaan ke depan.

Secara keseluruhan, hasil diagnosa menunjukkan bahwa tantangan utama bukan ketiadaan modal untuk membangun pengelolaan, melainkan belum terhubungnya modal-modal yang telah tersedia menjadi suatu sistem yang berfungsi. Pengetahuan perlu dihubungkan dengan data, data dengan pembelajaran, pembelajaran dengan kelembagaan, kelembagaan dengan kesepakatan, dan kesepakatan dengan implementasi, monitoring, evaluasi, serta penyesuaian pengelolaan.

Karena itu, arah pengembangan pengelolaan perlu dilakukan secara bertahap melalui penguatan data dan monitoring, kapasitas dan kepemimpinan lokal, kelembagaan dan kolaborasi, kesepakatan dan tindakan pengelolaan, pengawasan, serta hubungan antara pengelolaan dan manfaat ekonomi.

Perikanan gurita dapat digunakan sebagai salah satu pintu masuk untuk membangun proses tersebut. Namun, pilihan instrumen pengelolaan—termasuk kemungkinan penerapan sistem buka–tutup—perlu ditentukan melalui proses pembelajaran berbasis data, kesesuaian kondisi sosial-ekologi, kesiapan kelembagaan, dan kesepakatan masyarakat. Dengan demikian, suatu model pengelolaan tidak menjadi tujuan akhir, melainkan instrumen untuk membangun kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara kolektif dan adaptif.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil diagnosa, pengembangan pengelolaan perikanan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang perlu memprioritaskan beberapa hal berikut:

1. Membangun sistem monitoring perikanan secara partisipatif, terutama untuk perikanan gurita, sehingga tersedia data berkala mengenai hasil tangkapan, ukuran atau berat, upaya, lokasi penangkapan, waktu, dan nilai ekonomi yang dapat digunakan sebagai dasar pembelajaran dan pengambilan keputusan.
2. Memperkuat kapasitas masyarakat dan penggerak lokal dalam memahami ekologi dan perikanan, melakukan monitoring, membaca data, memfasilitasi pembelajaran, membangun kesepakatan, serta menjalankan dan mengevaluasi pengelolaan.
3. Memperkuat fungsi kelembagaan yang telah tersedia sebelum membentuk kelembagaan baru, dengan memastikan adanya representasi masyarakat Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang, nelayan, perempuan, kelompok masyarakat, Pokmaswas, tokoh lokal, serta hubungan yang jelas dengan Pemerintah Desa dan pemerintah daerah.
4. Membangun pilihan dan kesepakatan pengelolaan berdasarkan data dan proses partisipatif. Pengaturan wilayah, waktu, ukuran tangkapan, praktik penangkapan, perlindungan habitat, maupun sistem buka–tutup perlu dipertimbangkan berdasarkan persoalan yang ingin diselesaikan, kondisi sumber daya, dan kesiapan masyarakat.
5. Memperkuat pengawasan dan pengelolaan wilayah pemanfaatan bersama, termasuk sistem pemantauan dan pelaporan masyarakat, koordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, serta dialog dengan kelompok pengguna lain pada wilayah tangkap yang dimanfaatkan bersama.
6. Mengintegrasikan pelaku rantai pasok dalam proses pengembangan pengelolaan. Punggawa dan pengepul perlu dilibatkan sebagai aktor ekonomi yang memiliki fungsi penting dalam pembiayaan dan pemasaran, sekaligus didorong untuk mendukung perbaikan penanganan hasil, transparansi informasi, dan insentif bagi praktik perikanan yang lebih baik.
7. Memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna, tidak hanya berdasarkan perannya dalam penjualan, rumah tangga, dan aktivitas ekonomi perikanan, tetapi juga dalam ruang pembelajaran, perencanaan, dan pengambilan keputusan pengelolaan.

8. Membangun kolaborasi para pihak berdasarkan fungsi dan kewenangan, sehingga dukungan pemerintah, masyarakat, akademisi, lembaga pengawasan, pelaku pasar, dan pihak pendukung lainnya saling melengkapi dan tidak berjalan secara terpisah.
9. Menerapkan pendekatan pengelolaan adaptif, dengan memastikan setiap tindakan pengelolaan dipantau dan dievaluasi. Hasil monitoring perlu dikembalikan menjadi bahan pembelajaran untuk mempertahankan, memperbaiki, atau menyesuaikan aturan dan tindakan pengelolaan.
10. Menempatkan keberlanjutan penghidupan sebagai bagian integral dari pengelolaan sumber daya. Upaya menjaga sumber daya perlu berjalan seiring dengan penguatan manfaat ekonomi, posisi tawar, ketahanan penghidupan, dan kapasitas adaptasi masyarakat.

6.3. Penutup

Dokumen ini merupakan potret kondisi baseline, bukan gambaran yang bersifat tetap mengenai perikanan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang. Sistem perikanan terus berubah mengikuti dinamika sumber daya, musim, pasar, teknologi, kebijakan, dan kehidupan masyarakat. Karena itu, informasi dalam dokumen ini perlu terus diperbarui melalui monitoring dan pembelajaran selama proses pengelolaan berlangsung.

Diagnosa ini juga bukan dimaksudkan untuk menentukan sejak awal satu model pengelolaan yang harus diterapkan. Dokumen ini menyediakan dasar untuk memahami apa yang telah tersedia, apa yang masih menjadi kesenjangan, siapa yang perlu terlibat, dan arah perubahan yang perlu dibangun.

Pengelolaan yang berkelanjutan pada akhirnya membutuhkan proses jangka panjang yang memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi pengguna sumber daya, tetapi memiliki kapasitas dan ruang yang kuat untuk terlibat dalam memahami, merencanakan, mengambil keputusan, menjalankan, dan mengevaluasi pengelolaan sumber daya yang menjadi dasar penghidupannya.

Dengan mempertemukan pengetahuan lokal dan data, masyarakat dan para pihak, keberlanjutan sumber daya dan kebutuhan penghidupan, Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang memiliki modal untuk mengembangkan pengelolaan perikanan yang semakin berbasis masyarakat, adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. (2025). *Kecamatan Pulau Sembilan dalam Angka 2025*. Sinjai: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai.

Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai. (2025). *Data Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Kabupaten Sinjai*. Sinjai: Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025). *Data dan informasi kinerja ekspor produk perikanan Indonesia tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Yayasan Konservasi Laut Indonesia. (2026a). *Hasil Riset Aksi Partisipatif Masyarakat untuk Diagnosa Perikanan Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai*. Makassar: YKL Indonesia. Dokumen tidak dipublikasikan.

Yayasan Konservasi Laut Indonesia. (2026b). *Survei Rantai Pasok Perikanan Skala Kecil Kabupaten Sinjai*. Makassar: YKL Indonesia. Dokumen tidak dipublikasikan.

Dokumen ini disusun sebagai hasil diagnosa perikanan berbasis riset aksi partisipatif sekaligus baseline kondisi sosial-ekonomi dan sistem perikanan di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Dokumen ini memuat profil dan karakteristik perikanan, dengan perhatian khusus pada perikanan gurita; wilayah dan pola penangkapan; musim dan komoditas; alat dan teknik penangkapan; biaya operasional dan hubungan permodalan; penanganan hasil dan rantai pasok; struktur pengelolaan; peran perempuan; perspektif masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya; para pihak; serta diagnosa faktor-faktor kunci yang memengaruhi pengembangan pengelolaan perikanan.

